



**VAKSIN  
GOTONG ROYONG  
UNTUK NYAWA  
RAKYAT ATAU  
NYAWA BUMIH**

**AIRLANGGA DAN  
ERICK THOHIR  
CARI UNTUNG**

**5,89 RIBU ORANG  
SUMSEL KELUAR  
DARI KEMISKINAN**

**MERINTIS PEMULIHAN  
WISATA DENGAN  
PESTA KESENIAN**

# info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

**RP 75.000.000**

IKLAN 1 HALAMAN

**RP 50.000.000**

IKLAN ADVERTORIAL

**RP 50.000.000**

CENTER SPREAD

**RP 80.000.000**



*Kami Hadir  
Memberikan  
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**

**PENDIRI**

Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin

**DIREKTUR / PEMIMPIN UMUM**

Usman Rizal

**PEMIMPIN REDAKSI**

Gunawan Effendi

**REDAKTUR PELAKSANA**

Rio Taufiq Adam

**REDAKTUR**

Raden Mohd Solehin, Andyanto,  
Aprilia Rahapit, Rahmad R,  
Rusdiyono, Benni Martha Daya, Yuliani

**REPORTER**

Desi Wulandari, Anugrah Dany, Rifky Ilmi,  
Pras Budi Presetya,  
Ahmad Yani, Yuni Watiana,  
Mario Ananta, Khoirur Rozi, Rahmad KR, Iwan  
Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina  
Iskandar, Jifran, Dian Taresa  
(Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan  
Timur), Basri (Kalimantan Utara), Rizky  
Ananda (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar  
Usman (Kepulauan Bangka Belitung)

**EDITOR & GRAFIS**

Al Amin

**TATA LETAK**

Sujatmiko

**MEDIA SOSIAL**

Haidir Ali

**KEUANGAN**

Dra Nurhamida

**SEKRETARIS REDAKSI**

Ega Tri Agustin

**PENGEMBANGAN BISNIS**

Kiki Ibrahim  
RM Solehin

**DISTRIBUSI**

Abdul Muchtar

**BANK ACCOUNT**

A/N : PT. Wahana Multimedia  
BCA : No Rek : 553-041-4321  
KCP Otista Jakarta Timur

**JULI**

**S**emester II (Juli-Desember), juga triwulan III (Juli-September) yang suram sudah di depan mata. Lonjakan kasus positif Covid-19, kasus aktif, angka kematian, sistem layanan kesehatan (sumber daya manusia dan infrastrukturnya) sudah jelas memerlukan tindakan nyata antisipasi. Juga dampaknya terutama ekonomi. Kesehatan dan ekonomi adalah dua hal jalin berkelindan di tingkat perorangan maupun negara.

Di sisi lain, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang terjadwal pada 3-20 Juli 2021 justru seiring dengan kenaikan angka positif Covid-19 yang kian merepotkan: Krisis tabung oksigen, tenaga kesehatan gugur, juga krisis daya tampung rumah sakit, dan warga yang meninggal saat isolasi mandiri. Bantuan datang dari luar negeri, bersamaan dengan warga asing yang juga meninggalkan Indonesia. Sejumlah negara menutup pintu kedatangan dari Indonesia hingga akhir Juli ini.

Kabar perpanjangan masa PPKM Mikro Darurat mulai menyebar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 12 Juli 2021. Tentu dampak ekonomi yang langsung terkait dengan pembicaraan eksekutif dan legislatif itu.

Menteri Ani juga memaparkan skenario ringan hingga berat. Yang ringan, jika kasus Covid-19 melandai mulai minggu kedua Juli 2021 dan seterusnya, pelanggaran PPKM dapat berlangsung pada pekan pertama Agustus 2021. Selanjutnya, aktivitas ekonomi mulai dapat lebih dinamis secara bertahap pada pertengahan Agustus 2021. Pada pertengahan Agustus itu, tepatnya 17 Agustus, kita memperingati 76 tahun proklamasi kemerdekaan.

Toh jika skenario ringan gagal, yang berat akan terjadi. Mobilitas masyarakat turun hingga 50 persen jika kasus Covid-19 terus memuncak melampaui minggu kedua Juli 2021. Pelonggaran PPKM darurat baru dimulai minggu ketiga Agustus 2021. Pemulihan aktivitas ekonomi secara bertahap mundur menjadi September 2021.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah sangat berhati-hati dan memperhitungkan dampak kebijakan PPKM Darurat. Ibarat membengkokkan sesuatu mesti ada batasnya, kalau melewati batas, akhirnya patah dan tak berfungsi. Luhut menginginkan penurunan terjadi pada minggu ketiga Juli 2021.

Akhirnya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah telah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat. Dengan embel-embel darurat militer pula. Sebuah isyarat pengetatan akan berlangsung dalam perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.

Setiap masyarakat menghasilkan kerentanan epidemi spesifiknya sendiri. Yang membentuknya adalah struktur sosial masyarakat, standard hidup, dan prioritas politik. Kita melihat Indonesia pada Juli ini. ●

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:**

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)  
Telp / Fax : 021-278 123 97

**Twitter** : @1Infoindonesia  
**Facebook** : infoindonesia.id  
**Instagram** : @infoindonesia.idn  
**Email** : redaksi@infoindonesia.id



# DAFTAR ISI

EDISI  
BULAN  
JULI  
2021



## 6 INFO UTAMA

Pendapatan kotor nasional Indonesia mengalami penurunan. Turun pula kelas ekonomi Indonesia yang sempat bertengger di tingkat menengah atas.



## 18 INFO SUMSEL

Selain Wisma Atlet Jaka Baring, Pemerintah Provinsi Sumsel menyiapkan Asrama Haji Palembang untuk menambah kapasitas ruang perawatan warga yang positif Covid-19.



## 26 INFO INOVASI

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini sedang fokus memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional. Hal fundamental yang akan dilakukan BRIN ialah mengintegrasikan seluruh lem baga riset milik pemerintah.

## 80 INFO SELEBRITI

Di tengah situasi pandemi yang tak menentu, para insan perfilman tetap berupaya melahirkan karya-karya terbaik. Semua itu demi menjaga marwah perfilman Indonesia tetap kreatif dan bergerak meski banyak keterbatasan.





## 30 INFO PROFIL

Kebiasaan baik pada anak perlu ditanamkan sejak dini. Terutama kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut penting, karena sekecil apapun perilaku menjaga lingkungan, dapat berdampak baik terhadap keberlangsungan bumi.



## 70 INFO SPORT

Pesta olahraga terbesar akhirnya datang juga. Kali ini tuan rumahnya, kota megapolitan di Negeri Sakura, Tokyo. Sebanyak 28 atlet dari Indonesia akan bersaing memperebutkan medali sebagai yang terbaik. Berharap Merah-Putih berkibar di langit Jepang pada 23 Juli-8 Agustus mendatang.



## 82 INFO KHUSUS

Berdalih mempercepat kekebalan komunal atau herd immunity, pemerintah bersama PT Kimia Farma sepakat untuk menjual vaksin jenis Sinopharm kepada masyarakat. Walau pada akhirnya ditunda, tapi keputusan itu sudah blunder dan melukai hati rakyat.

- 3 DARI REDAKSI
- 50 INFO EKONOMI
- 59 INFO POLITIK
- 62 INFO ISTANA
- 66 INFO TEKNOLOGI
- 74 INFO WISATA
- 98 KAJI



FOTO-FOTO: REPRO

# TURUN KELAS AKIBAT PANDEMI COVID-19

Pendapatan kotor nasional Indonesia mengalami penurunan. Turun pula kelas ekonomi Indonesia yang sempat bertengger di tingkat menengah atas.

**B**ukan saja sulit keluar dari kelompok negara yang terperangkap di tingkat penghasilan menengah, pukulan kembali menghantam ekonomi Indonesia. Alhasil, pendapatan kotor nasional (gross national income, GNI) per kapita Indonesia merosot dari 4.050 dolar AS pada 2019 menjadi 3.870 dolar AS pada 1 Juli 2021.

Jika dikonversi dengan kurs dolar Amerika Serikat pertengahan Juli 2021 senilai Rp14.500 per satu dolar, maka GNI per kapita Indonesia turun dari Rp58,80 juta per tahun menjadi Rp56,2 juta setahun. Namun, bukan selisih penurunan itu yang memukul, melainkan konsekuensi penurunan itu.

Konsekuensinya, Indonesia turun kelas dari negara berpenghasilan menengah atas (upper middle class) ke menengah bawah (lower middle income). Itulah perhitungan Bank Dunia paling mutakhir yang keluar pada 1 Juli 2021 lalu

"Indonesia, Mauritius, Rumania, dan

Samoa sangat dekat dengan ambang batas klasifikasi pada 2019 dan semuanya mengalami penurunan Atlas GNI per kapita terkait COVID-19, yang mengakibatkan klasifikasi lebih rendah pada 2020," ungkap pernyataan Bank Dunia yang dirangkum oleh tiga ekonomnya: Nada Hamadeh Catherine Van Rompaey Eric Metreau.

Bank Dunia tahun ini mengubah klasifikasi GNI untuk menentukan peringkat tiap negara. Klasifikasi berubah karena di setiap negara, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi GNI per kapita. Pada 2019, klasifikasi GNI per kapita untuk negara Low Income di level US\$ 1.035, Lower Middle Income di level US\$ 1.035- US\$ 4,045, Upper Middle Income di level US\$ 4.046 - US\$ 12.535, dan High Income di level lebih dari US\$ 12.535. Sedangkan per 2020, untuk Low Income di level US\$ 1.046, Lower Middle Income di level US\$ 1.046-US\$

4,095, Upper Middle Income di level US\$ 4.095 - US\$ 12.695, dan High Income di level lebih dari US\$ 12.695.

Nah, yang mengalami penurunan dari kelompok negara berpendapatan menengah atas bersama Indonesia adalah Belize dan Iran. Kedua negara ini masing-masing memiliki GNI per kapita 2021 senilai 3.970 dan 2.870 dolar. "Di Belize, pariwisata sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19, membuat penurunan besar dalam Atlas GNI per kapita. Untuk Iran, Atlas GNI per kapita diperbarui untuk memperhitungkan lebih baik beberapa nilai tukar yang berlaku," ungkap Bank Dunia.

Kementerian Keuangan menyebut penurunan pendapatan per kapita hampir terjadi di semua negara di dunia. Penyebabnya adalah pandemi Covid-19. "Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir semua negara, termasuk Indonesia pada tahun 2020. Dengan demikian, penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari," kata Kepala Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Kamis, 8 Juli 2021.

Meski turun kelas, Febrio menyebut perekonomian Indonesia pada 2020 masih bisa tumbuh minus 2,1 persen. Menurut Kemenkeu, ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara peers G-20 dan ASEAN. Antara lain India minus delapan persen, Afrika Selatan minus tujuh persen, Brasil minus 4,1 persen, dan Thailand minus 6,1 persen. Selanjutnya, Filipina minus 9,5 persen dan Malaysia minus 5,6 persen.

Selain itu, Kemenkeu menyebut hanya beberapa negara yang masih dapat tumbuh positif di tahun 2020. Di antaranya yaitu Cina 2,3 persen, Turki 1,8 persen dan Vietnam 2,9 persen.

Toh anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) menyebut pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan pembenaran atas turunnya kasta ekonomi Indonesia itu. Hanya ada beberapa negara yang turun kasta di tengah pandemi ini, seperti Belize, Iran, Haiti, Samoa, dan Tajikistan.

"Status baru Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah sudah terlihat sejak akhir 2019. Ketika itu terjadi penurunan pertumbu-

han ekonomi," jelas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat IV itu, Sabtu, 10 Juli 2021.

Mengutip data BPS, politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, pada kuartal IV-2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,97 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year). Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal III-2019 yang bisa tumbuh sebesar 5,02 persen.

Sepanjang 2019, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya tumbuh 5,02 persen, melambat dibanding 2018 yang bisa tumbuh sebesar 5,17 persen. Ekonomi makin memburuk ketika memasuki awal 2020. Pada kuartal I-2020 pertumbuhan ekonomi turun lagi menjadi 2,97 persen.

"Memang pada 2 Maret 2020 sudah diumumkan ada kasus Covid-19 untuk yang pertama kali. Namun, pember-

kami, jika ingin kokoh menyandang status sebagai Upper Middle Income Country, maka GNI per kapita harus dinaikkan secara signifikan jauh di atas batas syarat Upper Middle Income Country," sambungnya.

Berkaitan dengan upaya itu, Hergun menyerukan evaluasi kebijakan ekonomi secara fundamental yang menjadi keniscayaan. Pandemi Covid-19, kata dia, telah menjatuhkan perekonomian ke jurang resesi. Dalam empat kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi negatif terus. Sementara pada 2020 akumulasi pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar minus 2,07 persen dari tahun sebelumnya.

Salah satu penyebab terkontraksinya perekonomian karena melemahnya daya beli masyarakat. Pada 2020, konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar minus 2,63 persen. Bahkan kontraksi tersebut berlanjut hingga ke kuartal



**Komisi XI DPR RI Heri Gunawan**

lakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) baru diberlakukan pada 10 April 2020 di Jakarta. Hal tersebut memperkuat bukti bahwa penurunan ekonomi pada akhir 2019 hingga awal 2020 belum terkait dengan pandemi Covid-19," tandas Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini.

Dia menambahkan, posisi upper middle income yang diduduki Indonesia pada pertengahan 2020 sebenarnya hanya tipis di atas ambang batas per 2019. Sehingga, kata Hergun, ketika mengalami penurunan GNI sedikit saja, maka langsung turun kelas. "Simpulan

I-2021 yang mencatatkan angka minus 2,23 persen. Padahal, komponen konsumsi rumah tangga menyumbang 56,9 persen dari total PDB.

"Melemahnya konsumsi rumah tangga secara eksplisit menggambarkan melonjaknya angka pengangguran dan kemiskinan. Semakin banyak yang menganggur dan jatuh miskin maka tingkat konsumsi rumah tangga akan semakin terpukul," papar Hergun.

Toh GNI per kapita lebih menyoroti pendapatan atau income. Bagaimana kinerja mesin pendapatan yang membuat Indonesia turun kasta itu? ●



FOTO-FOTO: REPRO

# HANYA TERSEDIA SEDIKIT PILIHAN

Gambaran tentang pendapatan nasional per kapita Indonesia yang merosot sudah terdata sejak awal 2021. Menjelang setahun pandemi Covid-19 di Indonesia terhitung sejak pengumuman warga positif Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020.

**S**ekitar sebulan sebelum pengumuman temuan warga terkonfirmasi positif Covid-19, Badan Pusat Statistik sudah menyodorkan data penurunan itu. "PDB per kapita 2020 turun karena pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi dan di sisi lain jumlah penduduknya bertambah," kata Kepala BPS (saat itu) Suhariyanto dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 5 Februari 2021.

Suhariyanto menjelaskan, pendapatan per kapita masyarakat Indone-

sia 2020 sebesar 3.911,7 dolar AS setara Rp56,9 juta, padahal pada 2019 masih 4.174,5 dolar setara Rp59,1 juta. Angka 2020 itu malah lebih rendah dibandingkan posisi pada 2018, saat pendapatan per kapita Indonesia mencapai 3.927 dolar AS --namun kurs saat itu menghasilkan konversi Rp56 juta.

Pada 2020, PDB Indonesia mencapai Rp15.434,2 triliun, sedangkan pendapatan per kapitanya Rp56,9 juta atau AS\$3.911,7. Sementara, jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa lebih.

Belakangan, pemerintah berupaya mendongkrak lagi produk domestik bruto yang pada gilirannya akan menjadi pembilang terhadap pendapatan per kapita Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2021 mencapai 7,1-8,3 persen.

Presiden Jokowi, misalnya, mengemukakan masih optimistik ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh positif tujuh persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua tahun ini. Kembali positifnya laju ekonomi ini berkat faktor low based effect serta didorong perbaikan sejumlah indikator. "Kita semua masih optimistis, dari sebelumnya kuartal I 2021 minus 0,74 persen, pada kuartal II 2021 tumbuh Insya Allah kurang lebih tujuh persen," kata Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021.

Menurut Presiden, perkiraan ekonomi tumbuh tujuh persen itu didukung oleh perkembangan sejumlah indikator. Presiden menyebutkan, indeks penjualan ritel, misalnya, menurut catatan Bank Indonesia (BI) kembali positif pada Mei lalu sebesar 12,9 persen. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, di periode yang sama indeks keyakinan konsumen (IKK) juga naik hingga menyentuh level optimistis sebesar 104,4. Selain itu, pada Mei 2021, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia juga dalam tahap ekspansif mencapai 55,3.

Namun, kasus baru Covid-19 yang melonjak terutama sejak akhir Juni hingga awal Juli 2021 membuat pemerintah kembali memperketat pembatasan sosial, bahkan lebih ketat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Alhasil, banyak ekonom menyebut target pertumbuhan itu sulit tercapai. Peneliti Center of Reforms on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet, misalnya, menilai proyeksi pemerintah terlampau tinggi. "Proyeksi kami pertumbuhan pada kuartal II tahun ini di kisaran 5-6 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pemerintah," ujarnya pada April 2021 lalu.

Tingkat konsumsi masyarakat

juga masih negatif, meskipun sedikit membaik. Pada tahun lalu, konsumsi masyarakat minus 2,63 persen, dan pada kuartal I/2021 sebesar minus 2,23 persen. Dilihat dari lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sektor andalan Indonesia, seperti pengolahan, perdagangan, dan transportasi juga masih merah.

Konsumsi masyarakat sulit diharapkan melonjak dalam waktu dekat. Krisis ekonomi akibat pandemi demikian dalamnya. Dampak langsungnya adalah pemutusan hubungan kerja besar-besaran selama 2020 dan hingga kini

masih terjadi. Selain itu, jutaan pekerja yang lain dirumahkan atau pendapatannya menurun.

Perekonomian Indonesia sepanjang 2020 terkontraksi 2,07 persen akibat pandemi Covid-19. Jauh dibandingkan dengan 2019 yang tercatat 5,02 persen atau 2018 yang masih 5,17 persen. Di luar pandemi Covid-19, penurunan kemampuan menghasilkan pendapatan itu adalah sektor penunjangnya yang merosot, yaitu tingkat investasi tertahan yang pada gilirannya berdampak pada tingkat kemampuan konsumsi rumah tangga



Peneliti Center of Reforms on Economics, Yusuf Rendy Manilet.

## • INFO UTAMA

penduduk Indonesia.

Pada 2020 konsumsi rumah tangga tumbuh negatif 2,63 persen, padahal per 2019 masih tumbuh 5,04 persen. Sedangkan investasi pada 2020 mengalami penurunan hingga minus 4,95 persen, padahal per 2019 masih tum-

Sektor industri pengolahan (manufaktur), misalnya, mengalami kontraksi minus -2,93 persen, konstruksi (-3,26 persen), perdagangan (-3,72 persen), dan pertambangan (-1,95 persen). Hanya sektor pertanian yang masih mencatatkan pertumbuhan yang

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2020, 6,4 juta pekerja kehilangan nafkahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan, mengutip BPS, mencatat, sepanjang 2020 ada 2,56 juta pekerja yang menganggur akibat pageblug Covid-19. Pada saat yang sama, 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja. Dua hal itu jelas membuat banyak orang kehilangan atau penurunan pendapatan.

Konfirmasi datang dari Bank Dunia yang menggelar dua survei berseri tentang dampak Covid-19 terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Survei pertama berlangsung pada Juni 2020. Selanjutnya yang kedua pada Oktober 2020. Menurut rencana, survei akan berlanjut hingga empat kali untuk mengukur perubahan dan kesinambungan setiap kuartal (triwulan).

Survei pertama yang mencakup 850 perusahaan usaha kecil (dengan karyawan kurang dari lima orang) hingga perusahaan besar yang memiliki lebih dari 100 karyawan, menunjukkan sekitar 64 persen perusahaan tutup di periode awal pandemi. "Hanya 36 persen perusahaan yang tetap buka sejak Maret 2020," tulis laporan penelitian pada Juni 2020 itu.

Dari 64 persen yang tutup itu, 40 persen antaranya buka kembali pada Juni setelah pembatasan oleh pemerintah mulai longgar. Namun, 22 persen perusahaan lainnya masih tutup atas keinginan pemiliknya.

Lebih dari 80 persen perusahaan mengaku angka penjualannya merosot dibandingkan dengan catatan tahun sebelumnya. Selanjutnya, 64 persen perusahaan menerapkan penekanan biaya tenaga kerja yang berarti pengurangan jam kerja hingga PHK.

Dalam periode yang sama, 93 persen perusahaan menyatakan tak mendapat bantuan pemerintah. Sedangkan tujuh persen lainnya mengaku mendapat bantuan kredit (satu persen), bantuan fiskal (satu persen), dan bantuan lainnya (lima persen). Bantuan lainnya ini lebih mengarah ke perusahaan besar berupa keringanan



Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad.



Suhariyanto

buh 4,45 persen. Yang meningkat adalah belanja pemerintah yang masih tumbuh positif pada 2020.

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mengalami penyusutan volume produksi barang maupun jasa. Setidaknya, laju pertumbuhannya melambat.

positif (1,75 persen).

Datangnya pandemi menyebabkan ribuan perusahaan tutup atau mengurangi tingkat produksinya. Dampak ikutannya adalah jutaan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja, jutaan lainnya dirumahkan, sebagian bahkan tak digaji (no work no pay).

pajak.

Sedangkan dalam survei kedua pada Oktober 2020, terlihat 73 persen perusahaan yang beroperasi pada Juni tetap buka per Oktober 2020. Sedangkan yang semula tutup pada Juni, hanya 16 persen yang buka pada Oktober 2020. Alhasil, 89 persen perusahaan tetap beroperasi pada Oktober 2020. Sekitar 11 persen tetap tutup.

Persoalan pun bergeser. Meskipun angka penjualan masih cenderung tertekan, penurunan biaya tenaga kerja pada Oktober 2020 hanya mencakup 40 persen perusahaan dibandingkan 64 persen pada Juni 2020. Masalah biaya tenaga kerja ini memang lebih dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki karyawan di atas 100 orang.

Yang menggembirakan, jika pada Juni 2020 hanya tujuh persen perusahaan mengaku mendapat bantuan pemerintah, pada Oktober 2020 angkanya terlihat melonjak. Per Oktober 2020, sekitar 49 persen perusahaan mengaku mendapat bantuan pemerintah. "Dari 49 persen yang mengaku mendapat bantuan pemerintah, yang terbesar adalah perusahaan mikro (61 persen), juga perusahaan kecil dan menengah (38 persen)," ungkap laporan itu.

Sedangkan salah satu jalan keluar jitu yang menjadi pilihan perusahaan-perusahaan di masa pandemi adalah mengintensifkan penjualan barang dan jasa secara online. Ringkasnya, otomatisasi dan digitalisasi.

Dalam konteks ini, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyatakan, pemulihan ekonomi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan per kapita nasional memang banyak ditentukan oleh bagaimana hasil pengendalian pandemi Covid-19.

Tauhid menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih lemah kini kian memburuk karena situasi pandemi. Situasinya akan lebih memburuk jika tidak didukung pertumbuhan atau peningkatan dari sisi tenaga kerja, modal atau investasi, dan teknologi.

Ia menambahkan faktor teknologi masih kurang di Indonesia. Ia mencontohkan di Cina, investor wajib me-

miliki kemitraan dengan perkembangan teknologi. "Mereka harus mampu mendesain, mencari material, research and development (R&D), perguruan tinggi dilibatkan, untuk membangun teknolog akhirnya mereka bisa bersaing dalam hal teknologi dan ini bisa menopang ekonomi dalam jangka panjang," kata Tauhid.

Bersandar data Kementerian Perindustrian, kesiapan industri yaitu industri manufaktur memasuki era otomasi yang diukur dalam indeks INDI 4.0 memang masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan hampir seluruh sektor masih berada pada tahap awal otoma-

hingga tujuh persen. Untuk mencapai target itu, syarat dan ketentuan pun berlaku: Antara lain konsumsi meningkat rata-rata 5,4-5,6 persen per tahun. Juga tersedia 2,7-3 juta lapangan kerja baru setiap tahun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengakui persoalan penciptaan lapangan kerja akan menjadi masalah serius. "Kita juga sedang ada bonus demografi yang puncaknya 2030. Sementara anak mudanya banyak lulus dari perguruan tinggi, tetapi karena ekonominya tidak mengalami pertumbuhan signifikan maka lapang-



**Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira.**

si atau berada di bawah 2,5 poin yang menjadi standard memulai era otomasi dan robotisasi.

Persoalan yang menghadang di depan mata jika intensifikasi penerapan teknologi mulai dari otomatisasi dan robotisasi hingga digitalisasi, bahkan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) adalah kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia. Terlebih, sebagaimana data BPS, pendapatan per kapita turun karena jumlah penduduk bertambah seiring dengan kontraksi ekonomi.

Sebagai pengingat saja, pemerintah menargetkan pertumbuhan rata-rata per tahun berkisar antara 6,6

an kerjanya menjadi sangat terbatas," ujarnya.

Situasi ekonomi yang buruk juga, kata Bhima, selanjutnya akan semakin menguatkan kecenderungan Indonesia terjebak dalam kelompok negara yang terjebak dalam pendapatan menengah (middle income trap). "Seharusnya setelah upper middle income country kita menjadi high income country. Berarti untuk menjadi negara maju makin terlambat," ujarnya.

Dengan begitu, hanya tersedia sedikit pilihan: Memulihkan kondisi ekonomi dengan terlebih dulu mengendalikan wabah Covid-19 dan berupaya keras naik kelas lagi. ●

# SUDAH MISKIN CORONA PULA

Sudah jatuh tertimpa  
tangga pula  
Sudah ekonomi keruh,  
tambah corona pula

**B**egitulah adanya. Jumlah warga Indonesia yang miskin bertambah dalam jangka waktu setahun pandemi antara Maret 2020 dan Maret 2021.

Memang, harapan muncul melihat jumlah warga miskin per Maret 2021 justru menurun dibandingkan dengan catatan pada September 2020. Namun, lonjakan kasus Covid-19 sejak awal hingga pertengahan Juli 2021 ini, membuat harapan itu kembali suram.

Soal warga miskin, Badan Pusat Statistik mengemukakan, pada Maret 2021 jumlahnya mencapai 27,54 juta orang. "Naik 1,12 juta orang dibandingkan dengan angka Maret 2020," kata Kepala BPS Margo Yuwono, Kamis, 15 Juli 2021.

Namun, dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin turun tipis 0,01 juta orang. Berdasarkan persentasenya, penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen atau turun 0,05 persen dari angka September 2020 yang sebesar 10,19 persen.

Margo menjelaskan, penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret

2021 sejalan dengan perekonomian domestik yang membaik. Hal ini tercermin dari kontraksi ekonomi yang mengecil pada kuartal I pada 2021 sebesar minus 0,74 persen. Seiring dengan hal itu, beberapa indikator yang mempengaruhi adalah penurunan angka pengangguran, dari 7,07 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,26 persen pada Februari 2021.

BPS juga mencatat jumlah penduduk yang bekerja meningkat pada periode tersebut dikarenakan mobilitas masyarakat yang membaik. Hal ini terjadi walau terdapat 15,72 persen pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

Lebih jauh Margo menjelaskan, tingkat penduduk miskin pada Maret 2021 di perkotaan naik sebesar 0,01 persen, sementara di pedesaan turun 0,10 persen. "Terlihat penurunan di tingkat pedesaan lebih bagus, ini menunjukkan berbagai program desa dan dana desa berdampak baik pada penurunan kemiskinan di desa," ucapnya.

Secara persentase, jumlah penduduk miskin di perkotaan hanya naik

Kepala BPS  
Margo Yuwono



0,01 persen poin, dari sebelumnya 7,88 persen pada September 2020 menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Margo memaparkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan sekitar 140 ribu orang, dari sebelumnya 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021.

Namun, jumlah penduduk miskin di pedesaan justru menurun 145 ribu orang, dari sebelumnya 15,51 juta orang pada September 2020 menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021. Berdasarkan persentase, penurunan penduduk miskin di pedesaan sebesar 0,10 persen, dari sebelumnya 13,2 persen pada September 2020 menjadi 13,10 persen pada Maret 2021. Menurut Margo, penurunan jumlah penduduk miskin di desa karena keberhasilan berbagai program pembangunan di desa, termasuk adanya penyaluran dana desa.

Pemerintah, kata Margo, bisa mengentaskan warga miskin dengan mengendalikan harga barang yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Salah satunya, beras yang berkontribusi paling besar terhadap garis kemiskinan dengan sumbangan 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di pedesaan.

Standard garis kemiskinan pada Maret 2021 versi BPS adalah pengeluaran Rp 472.525 per kapita per bulan. Garis kemiskinan makanan Rp 349.474 per kapita per bulan atau setara 73,96 persen pengeluaran dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 123.051 per kapita per bulan, setara 26,04 persen pengeluaran.

Beberapa komoditas makanan yang mempengaruhi angka kemiskinan di antaranya beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk, kue basah, tempe, dan tahu. Sedangkan komoditas bukan makanan yang mempengaruhi angka kemiskinan yakni perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Pada Maret 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan rumah tangga miskin secara rata-

rata adalah sebesar Rp 2.121.637 per rumah tangga miskin per bulan.

Margo juga menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi belum merata. Masih ada provinsi yang mengalami kontraksi ekonomi dalam, seperti Bali, tetapi ada yang sudah tumbuh positif seperti Yogyakarta. "Jadi secara nasional, terjadi pemulihan ekonomi di Semester I,

4. Sumatera Utara 1,34 juta atau setara 7,77 persen
  5. Nusa Tenggara Timur 1,16 juta atau setara 20,99 persen
- Bandingkan dengan sebaran pandemi Covid-19 menurut provinsi per 15 Juli 2021:
1. DKI Jakarta, jumlah kasus 689,236 (26,4 persen)



tapi pada tingkat provinsi terjadi divergensi," jelas Margo.

Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk terbanyak, menunjukkan pula angka kemiskinan warga yang besar. Per Maret 2021, tiga provinsi di Jawa mendominasi jumlah penduduk termiskin paling banyak di Indonesia:

1. Jawa Timur 4,57 juta atau secara persentase setara 11,4 persen
2. Jawa Barat 4,19 juta atau setara 8,4 persen
3. Jawa Tengah 4,11 juta atau setara 11,79 persen

2. Jawa Barat, jumlah kasus 467,144 (17,9 persen)
3. Jawa Tengah, jumlah kasus 297,742 (11,4 persen)
4. Jawa Timur, jumlah kasus: 203,372 (7,8 persen)
5. Kalimantan Timur, jumlah kasus : 88,457 (3,4 persen)

Dengan lonjakan pandemi Covid-19 pada awal hingga pertengahan Juli 2021 terutama di Pulau Jawa, sangat boleh jadi derita warga miskin kian bertambah. Sudah miskin corona pula. ●



FOTO-FOTO: REPRO

# KASUS COVID-19 MEROKET, EKONOMI MEROSOT

Membuka semester II sekaligus triwulan III 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19. Dampak ekonominya perluantisipasi serius.

Laporan situasi Covid-19 dari organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) edisi 14 Juli 2021, menyoroti peningkatan kasus di Indonesia hingga 44 persen dan 69 persen peningkatan kematian pada periode 5-11 Juli 2021 dibandingkan dengan sepekan sebelumnya. Sedangkan per 14 Juli 2021, Pemerintah Indonesia melaporkan 2.670.046 (bertambah 54.517) kasus terkonfirmasi Covid-19, dengan 69.210 (bertambah 991) kematian, dan 2.157.363 kasus sembuh dari 510 kabupaten di 34 provinsi.

Selama sepekan, antara 5-11 Juli 2021, seluruh provinsi mengalami peningkatan jumlah kasus dibandingkan minggu sebelumnya. Ada 15 provinsi mengalami peningkatan 50 persen

atau lebih, termasuk lima dengan peningkatan lebih dari 100 persen: Nusa Tenggara Barat (200 persen), Gorontalo (194 persen), Maluku (169 persen), Sulawesi Utara (139 persen) dan Kalimantan Utara (107 persen). Provinsi lain yang mengalami lonjakan kasus di atas 50 persen adalah Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Lampung.

Semakin banyak kasus, menurut WHO, berarti lebih banyak keperluan rawat inap, semakin repotnya petugas kesehatan dan sistem kesehatan, juga meningkatkan risiko kematian. Ada kebutuhan mendesak untuk menekan penularan COVID-19

yang berfokus pada penerapan ketat kesehatan masyarakat dan langkah-langkah sosial, termasuk pembatasan pergerakan. Dorongan vaksinasi yang ada juga perlu diperkuat, terutama berfokus pada peningkatan cakupan di antara populasi yang lebih tua dan berisiko tinggi dengan risiko penyakit parah dan kematian.

Padahal, pada saat yang sama, Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat antara 3-20 Juli 2021. Malah, pemerintah sudah mengantisipasi lonjakan kasus hingga 40 ribu per hari.

"Kami sudah hitung worst case scenario, jika lebih dari 40.000 (kasus per hari), bagaimana suplai oksigen, obat, dan rumah sakit semua sudah kami hitung," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa, 6 Juli 2021 yang dikutip Kantor Berita Antara.

Namun angka itu terlampaui sudah pada Senin, 12 Juli 2021. Selanjutnya lonjakan angka positif Covid-19 masih terjadi sebagaimana gambaran dari WHO.

Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, penerapan PPKM Darurat sampai saat ini bermasalah karena pelaksanaannya kurang konsisten serta kualitasnya masih rendah. Dia menyebutkan, hal ini salah satunya terlihat dari rasio pemeriksaan dan pelacakan kontak Indonesia.

"Kita bagus di kertas tapi buruk di implementasi. Hal ini berbahaya karena bicara tentang testing dan tracing, sesungguhnya kita bicara mengenai strategi yang sangat fundamental. Itu yang menyebabkan kita ini situasinya memburuk dan ini harus segera diperbaiki," kata Dicky.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, meski kasus virus korona sudah menyentuh 40 ribuan orang, tapi diduga belum menggambarkan kondisi sepenuhnya. Sebab, rasio kasus positif atau positivity rate Indonesia masih tinggi bahkan mencapai 30-an persen. Rasio kasus positif ini juga terlihat dalam tren kenaikan, terutama sejak pertengahan Juni 2021.

Dicky Budiman menambahkan,

kendati telah dilaksanakan selama lebih dari satu minggu, PPKM Darurat terbukti belum efektif menekan jumlah penambahan pasien virus corona. Hal ini terjadi karena pembatasan tersebut juga belum dilakukan melebihi masa inkubasi penyakit tersebut yang berada di kisaran 10-12 hari.

Dia pun berpendapat, PPKM Darurat sebaiknya dilakukan paling tidak selama enam minggu agar terlihat hasilnya berupa penurunan jumlah kasus Covid-19. Artinya, kata Dicky,



penurunan jumlah kasus virus korona baru bisa terlihat pada akhir Agustus nanti.

Nah, terkait dengan perkembangan terakhir itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan skenario kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat yang bisa diperpanjang hingga enam minggu guna menurunkan angka kasus Covid-19. Dia mengatakan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Penerapan PPKM darurat diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat.

"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," jelasnya dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin, 12 Juli 2021.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyampaikan belanja APBN akan terus diperkuat untuk merespon dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dengan skenario PPKM yang lebih panjang. Kemenkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berkisar antara 3,7 persen hingga 4,5 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 diperkirakan akan melambat ke kisaran 4,0-5,4 persen yoy.

Maka pemerintah akan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 ini ke perekonomian. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan refocusing maupun realokasi anggaran untuk mendukung pendanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 31 triliun.

Anggaran ini diambil dari anggaran belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 26 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 5 triliun. Proses ini akan diselesaikan pada Juli 2021 ini juga.

Di sisi lain, dia menilai diperlukan akselerasi vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021. Adapun, pemerintah menargetkan 1 juta dosis vaksin Covid-19 bisa disuntikkan per hari pada Juli 2021 dan 2 juta dosis vaksin pada Agustus 2021.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

## • INFO UTAMA

menyampaikan PPKM darurat yang diberlakukan untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 dapat berdampak pada penurunan mobilitas, khususnya konsumsi masyarakat.

lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yang titik tengahnya 4,6 persen. Asesmen kami menunjukkan jika PPKM darurat dilakukan sebulan dan bisa menurunkan Covid-19 secara baik,



**Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.**



**Ekonom senior Didin S Damanhuri.**

Oleh sebab itu, BI kembali menurunkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 3,8 persen, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen.

"Asesmen awal kami menunjukkan pertumbuhan ekonomi di 2021 akan

maka pertumbuhan ekonomi kita akan turun ke 3,8 persen," ungkap Perry.

Sebelum lonjakan Covid-19 di awal Semester II ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan indikator perekonomian khususnya dari kegiatan produksi juga memberikan rasa optimisme terhadap pereko-

nomian Indonesia, utamanya pada kuartal II/2021. Hal tersebut terlihat dari Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang berada di level ekspansi di 53,5 pada Juni 2021.

Lalu kegiatan perdagangan internasional juga dinilai dapat mendorong perekonomian Indonesia, terlihat dari surplus neraca perdagangan yang sudah berlangsung selama 13 bulan berturut-turut, serta ditopang oleh peningkatan harga komoditas global. Meski begitu, Airlangga memprediksi bahwa perekonomian di kuartal III/2021 dan ke depannya sangat tergantung kepada kondisi Covid-19 yang semakin menunjukkan peningkatan, serta penanganannya.

"Tantangan utama tentunya di kuartal III [2021] yang sebelumnya diprediksi positif, namun eskalasi Covid-19. Khususnya varian Delta menjadi salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi nasional selanjutnya," ujarnya.

Dalam hal ini, Airlangga lebih menoleh ke perdagangan internasional. Terlebih, Indonesia mengalami surplus perdagangan internasional selama 14 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, termasuk pada Juni 2021 sebesar 1,32 miliar dolar AS. Secara historis, surplus pada 2020 bahkan mencapai rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dengan mencatatkan nilai sebesar 21,62 miliar dolar AS.

"Performa Neraca Perdagangan yang cukup resilience di tengah pandemi tersebut perlu diapresiasi. Namun, untuk menjaga keberlanjutan surplus perdagangan ke depan, perlu terus dicermati beberapa faktor kunci," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis, 15 Juli 2021.

Airlangga menjelaskan bahwa faktor kunci tersebut akibat stabilitas pertumbuhan permintaan global khususnya pada pasar utama serta peran dan fungsi perwakilan perdagangan (Perwadag) dalam mendorong peningkatan ekspor. Lalu, dinamika perkembangan harga dan volume ekspor komoditas utama dan potensial dan strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan impor khususnya pada komponen impor konsumsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, (BPS) nilai ekspor tercatat 18,55 miliar dolar dan impor 17,23 miliar dolar. Nilai ekspor pada Juni 2021 ini mencatatkan rekor tertinggi sejak Agustus 2011, sedangkan nilai impor merupakan tertinggi sejak Oktober 2018. Jumlah ekspor tersebut meningkat 54,46 persen secara tahunan. Sedangkan impor naik 60,12 persen dari 10,76 miliar dolar di Juni 2020 menjadi 17,23 miliar. Angka ekspor Indonesia

Tiongkok. Indeks PMI manufaktur di kedua negara tersebut masih berada di level ekspansif, yakni AS 62,1 dan Tiongkok 51,3. Masih tingginya permintaan global telah mendorong aktivitas produksi dalam negeri untuk memenuhi hal itu sehingga indeks PMI Manufaktur Indonesia berada di level 53,5 dan kinerja ekspor Indonesia meningkat di Juni 2021.

"Secara garis besar, pada Juni 2021, Indonesia mengalami surplus neraca

dapatan per kapita 70 dolar per tahun.

Namun, saat ini Korsel telah masuk negara kaya sejak 1980 dengan pendapatan per kapita pada 2019 mencapai 33.000 dolar. Sementara itu Malaysia dengan berbagai kebijakan dan strateginya berhasil mencapai income per kapita pada 2019 sebesar 12.500 dolar. Sedangkan Indonesia masih berkutat di tingkat 3.900-4.000 dolar, malah turun dari 4.050 pada 2019 menjadi 3.870 dolar pada 2020.



ini memiliki performa yang lebih baik dibandingkan negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan (39,8 persen), Taiwan (25,6 persen), dan Vietnam (20,4 persen).

"Peningkatan impor bahan baku/penolong mencerminkan peningkatan kinerja sektor riil, sementara peningkatan barang modal juga cukup baik karena berdampak pada peningkatan kapasitas produksi," jelas Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa capaian kinerja neraca perdagangan juga dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas manufaktur negara mitra dagang utama, terutama Amerika Serikat dan

perdagangan nonmigas dengan beberapa negara, yakni Amerika Serikat (1,34 miliar dolar), Filipina (0,65 miliar dolar), dan Malaysia (0,32 miliar dolar). Sementara, Indonesia mengalami defisit dengan Tiongkok (minus 0,60 miliar dolar), Australia (minus 0,48 miliar dolar), dan Thailand (minus 0,33 miliar dolar)," ucapnya.

Namun, ekonom senior Didin S Damanhuri mengingatkan, kinerja perekonomian Indonesia masih tetap tertinggal oleh Malaysia dan Korea Selatan. Ketiga negara sebenarnya berangkat sama-sama menerapkan industrialisasi dengan start pada pen-

Meski tidak dapat disandingkan, kata Didin, masih ada sisi objektif yang bisa dibandingkan dari strategi industrialisasi yang dijalankan oleh Korsel, Malaysia serta Indonesia. "Kita memang telah 40 tahun lebih melakukan pembangunan ekonomi secara masif tetapi hasilnya secara pendapatan per kapita masih sepertiga dari Malaysia dan sepersepuluh dari Korea Selatan," ujarnya.

Jadi, di tengah pandemi, begitu banyak yang perlu diperbaiki. Jika tidak, jangan berharap ekonomi meroket. Salah-salah, roketnya tertelan pandemi. ●



FOTO-FOTO: REPRO

Sumsel Sigap Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

# GUBERNUR HD SIAPKAN 3 TOWER ASRAMA HAJI PALEMBANG

Selain Wisma Atlet Jaka Baring, Pemerintah Provinsi Sumsel menyiapkan Asrama Haji Palembang untuk menambah kapasitas ruang perawatan warga yang positif Covid-19.

**M**enyusul perkembangan situasi penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia yang menunjukkan perburukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengantisipasi dengan cepat. Antisipasi itu seiring pula dengan peringatan organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) yang menunjukkan ke-34 provinsi di Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah warga yang positif Covid-19 dalam periode 5-14 Juli 2021 dibandingkan dengan sepekan sebelumnya.

Di Sumatera Selatan, dampak peningkatan kasus Covid-19 antara lain meningkatnya rasio keterisian tempat

tidur di rumah sakit (bed occupancy ratio). Sebagai antisipasinya, Gubernur Sumsel H Herman Deru (HD) menyiapkan tiga gedung bertingkat (tower) di Asrama Haji Palembang dengan kapasitas tampung 500 orang.

Masing-masing adalah Tower Mekkah, Madinah dan Jeddah. Gubernur HD didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy, Kepala BPBD Sumsel Iriansyah, Direktur Swarna Dwipa Hotel, Rebo Iskandar, dan Kasat Pol PP Provinsi Sumsel Aris Saputra, mengunjungi ketiga tower yang berlokasi di Jalan Tanjung Api-api, Kebun Bunga, kawasan Sukarami, Palembang, pada Rabu, 14 Juli 2021. Dalam peninjauannya itu Gubernur HD

dan rombongan tampak mengecek kamar di Gedung Mekkah terlebih dahulu.

Tak hanya kesiapan tempat tidur, tapi fasilitas kamar mandi, sirkulasi dan lainnya juga menjadi perhatian HD. Setelah Tower Mekkah, rombongan ini melanjutkan peninjauannya di Tower Jeddah yang berada tak jauh dari gedung sebelumnya.

Usai peninjauan, HD mengatakan persiapan tambahan kamar ini tetap berlanjut meskipun di Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, juga akan dibuka dua tower lagi. Hal ini tak lain untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pasien Covid di Sumsel. "Ada tiga tower yang kita siapkan. Se-

dangkan kamar-kamarnya kita upayakan selalu siap termasuk tenaga kesehatan dan fasilitasnya” tegas HD.

Berdasarkan data terkini, kata HD, tingkat penyebaran Covid 19 di Sumsel cenderung fluktuatif. Bahkan yang cukup menggembirakan, sambungnyanya, saat ini tingkat kesembuhan pasien Covid 19 di Sumsel sangat tinggi mencapai 84 persen, lebih tinggi dari dari angka nasional yang tercatat 81 persen.

“Tingkat keterisian kamar atau BOR kita juga sudah turun terus. Dari 79 persen sekarang sudah 77 persen. Ini juga berkat upaya maksimal Pemprov Sumsel menyediakan layanan bagi saudara-saudara kita yang terpapar Covid,” jelas HD.

Sedangkan WHO melaporkan, selama sepekan 5-11 Juli 2021, semua provinsi mengalami peningkatan jumlah kasus dibandingkan minggu sebelumnya. Sedangkan 15 provinsi mengalami peningkatan 50 persen atau lebih, termasuk lima dengan peningkatan lebih dari 100 persen: Nusa Tenggara Barat (200 persen), Gorontalo (194 persen), Maluku (169 persen), Sulawesi Utara (139 persen) dan Kalimantan Utara (107 persen).

Sedangkan di Sumsel, data Satgas Covid-19 provinsi pada Selasa, 13 Juli 2021 menunjukkan angka penambahan kasus aktif mencapai 788 orang. Selanjutnya pada Rabu, 14 Juli 2021 bertambah lagi 760 orang. Sementara, kasus sembuh 200 orang dan meninggal 10 orang..

Untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 tersebut, Gubernur HD mengantisipasi dengan membuka Asrama Haji Palembang sebagai tempat isolasi pasien dengan gejala ringan. Menurut HD kamar-kamar di Asrama Haji itu diprioritaskan untuk pasien dengan gejala ringan atau OTG (orang tanpa gejala). Sementara untuk mereka yang bergejala berat diarahkan ke rumah sakit rujukan.

Selain itu, Herman Deru sudah menginstruksikan kepada kepala daerah di 17 kabupaten dan kota di Sumsel untuk menambah dan memperbanyak tempat isolasi mandiri. “Saya sudah tulis edaran kepada kepala daerah untuk menambah kapasitas tempat tidur di

wilayahnya masing-masing,” katanya.

Lebih jauh, Herman Deru mengatakan untuk skala provinsi BOR sangat variatif karena itu antarkepala daerah harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi Covid. Ia pun berharap setelah PPKM

di Wisma Atlet saat ini tercatat baru 78 kamar terisi dari 300 kamar yang tersedia.

“Jika di rumah ada anak kecil atau ada orang tua atau keluarga komorbid tidak perlu ragu cari tempat isolasi. Pemprov siapkan ini dengan gratis tanpa biaya tanpa pungutan,” ujarnya.



jumlah penyebaran Covid akan mengalami penurunan.

“Mari kita hadapi pandemi ini dengan ketangguhan psikologi dan kesiapan. Serta tidak panik. Karena panik dapat menurunkan imun,” jelasnya.

Berkaitan dengan itu, lanjut HD, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) dan rapid antigen, masyarakat hendaknya tidak perlu lagi ragu untuk melakukan isolasi mandiri (isoman). Menurut dia, kini Pemprov telah menyiapkan Wisma Atlet dan Asrama Haji sebagai tempat isolasi mandiri yang memadai. Untuk

Bahkan obat-obatan serta oksigen untuk penanganan Covid-19 pun telah disiapkan. “Jadi harapan saya, agar pasien Covid-19 yang tidak memiliki gejala ataupun bergejala ringan tidak langsung ke rumah sakit melainkan isolasi di sini saja,” ujarnya.

Sedangkan Kadinkes Provinsi Sumsel Lesty Nuariny mengatakan, sebanyak 500 kapasitas tempat tidur di Asrama Haji yang disediakan terdiri dari 270 kamar. Untuk isolasi mandiri, masing-masing kamar disediakan bagi 1-2 pasien. “Selain kita siapkan di Asrama Haji ini kita juga akan tambah dua tower lagi di Wisma Atlet,” ungkapnya. ●

# HERMAN DERU BERANGKATKAN PENDISTRIBUSIAN LIQUID OKSIGEN CSR SINAR MAS GRUP

## ► RS Rujukan Covid-19 di Sumsel Dapat Pasokan 1200 Ton Liquid Oksigen

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengajak pihak korporasi yang ada di Sumsel untuk peduli dengan menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya kepada masyarakat.

Seperti halnya yang telah dilakukan oleh PT OKI Pulp & Paper Mills yang telah menyalurkan CSR berupa liquid oksigen untuk di distribusikan sejumlah Rumah Sakit (RS) rujukan Covid-19 yang ada di wilayah Sumsel.

**"S**emoga bantuan berupa liquid oksigen yang telah dilakukan Sinar Mas Group ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya mengharapkan langkah ini diikuti

oleh korporasi lainnya. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berakhir," ucap Gubernur Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irijen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri saat

penyerahan dan pendistribusian bantuan CSR Liquid Oksigen dari Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas untuk Rumah Sakit rujukan Covid-19 di halaman Mapolda Sumsel, Senin (12/7).

Menurut Herman Deru PT OKI Pulp



& Paper Mills (Sinar Mas Grup) menjadi perusahaan yang pertama di Sumsel yang telah memberikan CSR-nya berupa bantuan oksigen. Hal ini sejalan dengan potensi daerah Sumsel yang telah berkontribusi banyak dalam memproduksi oksigen bagi Indonesia.

"Kita ucapkan terima kasih pada Kapolda yang telah menginisiasi mengajak perusahaan di Sumsel untuk menyalurkan bantuan medis bagi rumah sakit yang membutuhkan. Apa yang diinisiasi oleh Kapolda ini harus kita ikuti sebagai wujud peduli sesama," tambahnya.

Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, mengapresiasi Sinar Mas group yang telah menyalurkan CSR-nya berupa pemberian oksigen untuk di distribusikan pada rumah sakit rujukan di Sumsel.

"Kita mengapresiasi apa yang dilakukan PT Sinar Mas group yang telah menyalurkan CSR-nya berupa pemberian oksigen untuk kemudian diserahkan kepada dinas terkait yang ditugaskan mendistribusikan oksigen gratis ini ke rumah sakit yang membutuhkan," terang Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S, MM.

Dikatakan, pengiriman perdana dilakukan dengan menggunakan 2 unit ISO Tank, diangkut ke pusat distribusi dan nantinya akan dilakukan pengisian ke dalam tabung-tabung oksigen untuk segera didistribusikan kepada rumah sakit yang membutuhkan

"Dalam hal ini kita hanya memfasilitasi dan mengawal, sedangkan untuk pengaturan penyalurannya ke rumah sakit diatur oleh Dinas Kesehatan Provinsi," ucap Indra.

Dilain pihak Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin didampingi Kuasa Direksi PT OKI Pulp & Paper Mills Gadang Hartawan dan Perwakilan Manajemen APP Sinar Mas Effendi menegaskan, Sinar Mas Gorup berkomitmen untuk berpartisipasi dalam membantu pengadaan liquid oxygen dan gas oxygen demi memenuhi kebutuhan oksigen para pasien covid-19 di sejumlah daerah.

Dimana komitmen tersebut akan direalisasikan melalui pengadaan stok oksigen sebanyak 1,200 ton per bulannya yang akan dipasok oleh PT.

OKI Pulp & Paper Mills, PT. Indah Kiat Pulp & Paper- Perawang Mills dan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.

Dari kapasitas 1.200 ton liquid oxygen ini, sedianya akan mampu mengisi sekitar 1.000.000 tabung oksigen medis dengan volume 1 M3.

"Dengan mengoptimalkan produksi

oxygen ini, sedianya akan mampu mengisi sekitar 1.000.000 tabung oksigen medis dengan volume 1 M3 yang akan disebar kerumah sakit rujukan antara lain Rumah sakit Mohammad Husein, Rumah Sakit Siti Fatimah, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit BARI, Rumah Sakit AK. Gani, Rumah



FOTO: FOTO: REPRO

oksigen cair, kita bisa membantu mengatasi kekurangan oksigen di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan Pulau Jawa," demikian disampaikan Managing Director Sinar Mas Saleh Husin.

Dikatakan untuk 1.200 ton liquid

Sakit Siti Khodijah.

Hadir pula dalam kesempatan ini Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, S.Ip., S.Sos, Waka-polda Provinsi Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan, S.Ik., S.H., M. •



# PEMROV SUMSEL MAKSIMALKAN PENGAWALAN DISTRIBUSI OKSIGEN MEDIS UNTUK RS RUJUKAN COVID

## ► Jaga Ketersediaan Oksigen di Kabupaten/Kota

Plh Sekda Sumsel H. Akhmad Najib memimpin rapat koordinasi terkait distribusi oksigen medis untuk dibagikan ke RS rujukan Covid-19 di Sumsel. Rapat tersebut digelar di ruang rapat Setda Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (13/07).

Pada rapat tersebut Akhmad Najib mengajak pihak korporasi dan vendor penyuplai oksigen bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen di 47 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 yang tersebar di Sumatera Selatan.

"Tentunya kita harus cepat mengambil langkah cepat untuk menekan tersendatnya pelayanan pasien. Bukan hanya pasien covid-19 saja tapi

untuk pasien-pasien lainnya juga," kata Akhmad Najib.

Setelah PT. OKI Pulp dan Paper Mills (Sinar Mas Grup) menjadi perusahaan yang membantu dalam ketersediaan Oksigen di Sumsel, Sekda mengharapkan perusahaan BUMN di Sumsel terus menjalin sinergi pemerintah dalam memberikan bantuan untuk RS Rujukan Covid-19 di Sumsel.

"Yang kita inginkan saat ini adalah

sinergi kita tetap terjalin dalam membantu kebutuhan Rumah Sakit di Sumsel, dan itu tentunya bukan hanya berupa oksigen saja," tuturnya.

Menurut Sekda, penyediaan oksigen harus tetap terjaga di setiap Kabupaten dan Kota di Sumsel. Sehingga tenaga kesehatan dan pasien tetap tenang.

"Tentunya Pemprov dalam hal ini terus berupaya menjaga ketersediaan



oksigen secara merata di setiap Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dan barang medis yang lainnya agar tidak jadi kekurangan bagi pasien, kepedulian kita terus tujukan melalui gerakan kita semua,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Prov Sumsel, Dra. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes yang hadir dalam rapat tersebut, mengatakan bahwa kesiapan Oksigen yang telah diberikan PT Okipulp dan Paper Mills ( Sinar Mas Grup) akan segera disebar di 47 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Sumsel.

“Oksigen yang kemarin kita dapatkan juga akan segera kita bagikan ke Rumah Sakit di Kabupaten dan Kota di Sumsel. Sesuai dengan arahan Gubernur juga kita terus melakukan upaya agar ketersediaan oksigen tetap terjaga. Karena itu kita bekerja sama dengan membantu RS, tenaga kesehatan, dan masyarakat tetap tenang dan sehat,” ujar Lesty

Ditempat yang sama Pihak PTBA yang hadir dalam rapat tersebut juga

bersedia membantu dalam bentuk tabung oksigen.

Turut hadir juga dalam rapat tersebut, perwakilan dari berbagai perusahaan di Sumsel, PT. Pusri, PT. PTBA, PT. Samator Gas Industri, PT. OKI

Pulp, PT. Legasin, PT. Bukit Asam, dan Kepala Pelaksana BPBD, Kabid Dokkes Polda Sumsel, Wadir Krimsus Polda Sumsel, Kepala Dinas Kesehatan Prov Sumsel, dan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra. ●



Plh Sekda Sumsel H. Akhmad Najib.



# 5.89 RIBU ORANG SUMSEL KELUAR DARI KEMISKINAN

Memang masih belum lebih baik dibandingkan dengan kondisi tanpa pandemi Covid-19. Namun, upaya menekan laju jumlah warga miskin di Sumatera Selatan sudah menunjukkan hasil yang dapat memacu upaya lebih keras untuk mewujudkan visi maju bersama.

**P**asang-surut atau naik-turun jumlah warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih mengikuti kecenderungan umum secara nasional: Naik selama periode Maret-September 2020, namun perlahan mulai menurun pada periode September 2020-Maret 2021.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin secara nasional pada Maret 2020 tercatat 26,42 juta orang setara dengan 9,78 persen penduduk Indonesia. Angka itu naik pada September 2020 menjadi 27,55 juta orang atau 10,19 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan pada Maret 2021 penduduk miskin Indonesia mencapai 27,54 juta orang setara dengan 10,55 persen penduduk.

Di Sumsel, data resmi BPS mengungkapkan, pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 1,08 juta orang atau 12,66 persen total penduduk. Pada September 2020, angka itu meningkat menjadi hampir 1,12 juta orang lebih atau 12,98 persen penduduk Sumsel. Namun, pada Maret 2021, jumlah warga miskin di Sumsel turun menjadi 1,11 juta orang lebih





atau 12,84 persen dari seluruh warga provinsi ini.

Simpulannya, memang belum sebaik kondisi tanpa pandemi Covid-19. Baik di tingkat nasional maupun di Sumsel.

Toh selama enam bulan antara September 2020 hingga Maret 2021, jumlah warga miskin di Sumsel turun dari 12,98 persen menjadi 12,84 persen jumlah seluruh penduduk, dari hampir 1,12 juta menjadi 1,11 juta warga. "Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 5.890 orang," kata Kepala BPS Sumsel Zulkipli, Kamis, 15 Juli 2021.

"Bahkan penduduk miskin di Sumsel ada yang berhasil keluar dari kemiskinan. Itu menunjukkan kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik melalui intervensi berbagai program perlindungan sosial," ujarnya.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020-Maret 2021 atau dalam enam bulan terakhir, angka kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan. Angka kemiskinan di daerah perkotaan turun sebesar 0,16 persen atau setara 2.180 penduduk miskin. "Sedangkan angka kemiskinan di daerah pedesaan turun sebesar 0,13 persen poin atau setara 3.710 penduduk miskin," ujar Zulkipli.

Namun, angka perbandingan warga miskin itu juga patut menjadi catatan bahwa penduduk miskin di Sumsel lebih terkonsentrasi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Lebih dari sekadar catatan, ini juga menjadi tantangan Pemerintah Provinsi un-

tuk mengentaskan warga yang berada di wilayah pelosok.

Data BPS juga menunjukkan, sebagian besar beban kemiskinan warga di Sumsel berasal dari pengeluaran makanan. Angkanya mencapai 74,45 persen dari total pengeluaran. Sisanya, 25,55 persen pengeluaran tersedot oleh kebutuhan bukan makanan.

Pengeluaran biaya pangan yang paling banyak adalah untuk beras, rokok, daging ayam, telur, dan mi instan. Sedangkan untuk nonpangan yang terbesar adalah perumahan, bahan bakar minyak, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Sedangkan Zulkipli mengemukakan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa persentase dan jumlah penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu menurunkan angka kemiskinan, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan perbandingan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nah, pada periode September 2020 - Maret 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sumsel ternyata mengalami penurunan dari 2,261 pada September 2020 menjadi 2,260 pada Maret 2021 atau turun sebesar 0,001 poin. Penu-

runan indeks kedalaman kemiskinan dalam kurun waktu enam bulan terakhir mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan.

"Fenomena itu mengungkapkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin di Sumatera Selatan dalam kurun waktu enam bulan terakhir semakin membaik, bahkan mampu mengangkat sebagian kecil penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Kebijakan pemerintah telah mampu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan meningkatkan jumlah komoditas yang dikonsumsi penduduk miskin juga telah meningkatkan taraf kehidupan penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan," ujar Zulkipli.

Lalu, Indeks Keparahan Kemiskinan di Sumsel periode September 2020 - Maret 2021 mengalami penurunan dari 0,627 September 2020 menjadi 0,542 Maret 2021 atau turun sebesar 0,085 poin. "Penurunan indeks keparahan kemiskinan tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil," paparnya.

Apapun, data sudah berbicara. Catatan terakhir yang perlu menjadi perhatian, bagaimana menekan angka kemiskinan warga Sumsel hingga keluar dari dua digit. Saat sekarang masih berkisar antara 12 mendekati 13 persen jumlah penduduk menjadi, katakanlah sembilan persen saja. Terlihat hanya 3-4 persen, namun itu bukanlah pekerjaan yang akan selesai hanya dalam 1-2 tahun saja. ●

Badan Riset dan Inovasi Nasional

# NEGARA HADIR TANPA MENDOMINASI EKOSISTEM RISET



Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini sedang fokus memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional. Hal fundamental yang akan dilakukan BRIN ialah mengintegrasikan seluruh lembaga riset milik pemerintah.

**K**epala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam wawancara khusus dengan Info Indonesia pada Jumat (2/6/2021) lalu menjelaskan, lembaga-lembaga penelitian, sekaligus fungsi dan pengembangan penelitian, yang ada di kementerian atau lembaga, akan diintegrasikan dalam BRIN. Dalam hal ini, integrasi riset akan mencakup seluruh proses manajemen, anggaran, serta sumber daya manusia (SDM).

Namun, masih terdapat batu sandungan perkembangan riset di Indonesia. Dia mengatakan, lembaga riset di Tanah Air terlalu didominasi oleh pemerintah. Setidaknya, ada 48 penelitian dan pengembangan (Litbang) di berbagai kementerian dan lembaga.

"Itu yang sekarang lagi proses diintegrasikan baik dari SDM, infrastruktur, dan dari sisi anggaran," kata Handoko kepada Info Indonesia, Jumat (2/7/2021).

Dalam waktu dekat, badan yang dipimpin oleh fisikaawan lulusan Hiroshima University, Jepang ini, akan segera melanjutkan konsolidasi SDM dari eks Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) ditambah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Kemudian, ditambah dengan beberapa unit yaitu Pusat Penelitian Arkeologi Na-

sional, Badan Standarisasi Nasional, dan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia. Jumlah SDM yang sudah dikonsolidasi tahap pertama ini, sudah mencapai 11 ribu orang dari total 15 ribu orang.

Adapun dari sisi anggaran, BRIN mengonsolidasikannya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian

Setelah melakukan konsolidasi, BRIN diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus ke tiga arah tujuan. Pertama, integrasi kelembagaan. Kedua, SDM yang sudah diintegrasikan tersebut, BRIN diminta untuk bisa menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik. Ketiga, BRIN dapat berkontribusi kepada ekonomi.

BRIN sendiri dibentuk untuk menjadi penyedia infrastruktur riset berbagai bidang. Utamanya untuk meningkat-

hayati, keanekaragaman geografi dan keanekaragaman seni budaya yang ada di Tanah Air.

Menurut dia, kekayaan sumber daya alam di Indonesia harus ada intervensi dari riset dan inovasi. Sehingga nilai tambahnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

"Misalnya bagaimana kita mengeksplorasi, mengeksploitasi kekayaan arkeologi, kekayaan seni-budaya dalam bentuk digital," kata dia.



PPN/Bappenas).

"Kalau dari sisi anggaran sekitar Rp7 triliun dari target sebenarnya sekitar Rp16 triliun. Kalau dari sisi anggaran kurang dari separuhnya. Kemudian, konsolidasi akan kita lanjutkan di tahap kedua pada akhir tahun 2021," ujar dia.

kan nilai tambah kekayaan sumber daya alam lokal demi peningkatan ekonomi nasional.

Dikatakan Handoko, BRIN fokus menciptakan nilai tambah melalui riset dan inovasi dari berbagai sumber daya alam dan kekayaan, keanekaragaman

Menurutnya, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam akan membuat orang jadi penasaran atau ingin tahu. Hal itu juga akan merangsang minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Hadirnya wisatawan, tentu akan meningkatkan ekonomi berbasis



souvenir dan seni budaya yang sangat beragam itu.

Namun demikian, BRIN tetap mendorong pengembangan pesawat, bandara antariksa, dan teknologi nuklir. Karena hal itu sangat penting bagi masa depan bangsa. Kapasitas SDM yang mumpuni akan mudah melak-

sanakan berbagai kegiatan riset.

#### Jadi Fasilitator

Pria kelahiran Malang, 7 Mei 1968 itu mengatakan, fokus katau indikator kinerja BRIN yaitu, bisa menjadi fasilitator supaya dunia industri, swasta,

lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa masuk ke dalam penelitian dan pengembangan atau research and development (RnD).

Menurut dia, yang melakukan riset dan inovasi seharusnya bukan didominasi oleh pemerintah. Menurut Standar Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/ UNESCO) menerangkan, setidaknya 80 persen yang melakukan riset dan inovasi adalah pihak industri, swasta dan LSM, bukan pemerintah.

"Pemerintah hanya jadi fasilitator saja. Tapi di Indonesia justru sebaliknya, 80 persen riset dan inovasi dilakukan oleh pemerintah. Artinya ekosistem riset dan inovasi belum terbentuk. Karena swasta, LSM dan industri masih susah jika hendak melakukan riset," kata dia.

Dia meyakini BRIN mampu mem-



perbaiki ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Apalagi, saat ini sejumlah konsolidasi sudah dilakukan. Mulai dari SDM, infrastruktur, hingga anggaran. BRIN akan mampu memfasilitasi masyarakat dan industri, termasuk perguruan tinggi yang hendak melakukan riset dan inovasi.

Mantan Kepala LIPI itu juga mengatakan, BRIN sudah melakukan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. BRIN mendukung perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan memfasilitasi infrastruktur penelitian.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, untuk membuat infrastruktur lebih terbuka bagi penelitian atau open infrastructure. Sehingga mempermudah perguruan tinggi, serta menguntungkan pelaku usaha atau industri. Pelaku industri tidak perlu membuat laboratorium sendiri apabila ingin melakukan penelitian produknya dengan metode open infrastructure ini.

Sebab, kata dia, membuat laboratorium dan menyiapkan periset membutuhkan biaya besar. Padahal, hasil dari riset yang dilakukan belum tentu sesuai yang diharapkan.

"Inilah kehadiran pemerintah melalui BRIN, sehingga mereka bisa melakukan riset dengan investasi yang sangat minimal. Itulah ekosistem yang kita bangun," ujar peraih Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa pada 2009 silam.

### Hindari Benturan Regulasi

Sistem integrasi yang dibuat oleh BRIN diharapkan dapat membuat kebiasaan dalam membuat kebijakan yang berlandaskan ilmu pengetahuan atau science based policy. Handoko mengatakan, integrasi diperlukan yang dilakukannya untuk mencegah terjadinya benturan regulasi antara kementerian dan lembaga. Sebab, kerap kali ditemukan kebijakan yang berbenturan.

"Karena kementerian atau lembaga, tidak tahu bahwa



ada proses bisnis yang lain terkait dengan objek yang diatur dengan regulasi. Itu sering terjadi," jelas Handoko.

Apabila periset di kementerian dan lembaga diintegrasikan, secara otomatis, BRIN memiliki tanggung jawab untuk membuat rekomendasi kebijakan. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat benar-benar berbasis kajian ilmiah yang memadai.

Lebih lanjut, orang yang melakukan penelitian untuk membuat kebijakan adalah orang-orang yang punya perspektif lebih bagus. Peralnya, orang tersebut tidak hanya

melihat dari perspektif dan kepentingan satu kementerian.

"Dia lihat juga dari sisi lain, sehingga diharapkan aturan yang dikeluarkan lebih komprehensif. Itu tujuan integrasi. Nanti akan ada Deputi Kebijakan Ombudsman di BRIN yang khusus menangani itu," tegasnya.

Dia menegaskan, pemerintah tidak akan mengalami kerugian apapun, ketika memfasilitasi infrastruktur penelitian. Sebab, pemerintah itu bukan sebuah badan usaha. Kemajuan sebuah negara itu tergantung kemajuan pengusaha di negara tersebut, bukan karena pemerintah.

Jadi, pemerintah harus menjadi fasilitator dan regulator yang baik untuk kemajuan pengusaha. Keberhasilan pengusaha dalam menjalankan usahanya akan meningkatkan perekonomian. Meningkatnya perekonomian, otomatis akan membuat penerimaan pajak di Indonesia meningkat.

"Saya sampaikan, pemerintah tidak akan rugi. Karena saya menciptakan mekanisme yang baik dan benar," pungkasnya. ●





Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar

# MENJAGA MASA DEPAN HUTAN DAN ALAM

Kebiasaan baik pada anak perlu ditanamkan sejak dini. Terutama kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut penting, karena sekecil apapun perilaku menjaga lingkungan, dapat berdampak baik terhadap keberlangsungan bumi.





**Y**ang paling mudah adalah tidak membuang sampah sembarangan. Mengapa? Karena sampah menjadikan beban pada lingkungan atau alam kita,” ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, pada webinar Edukasi Lingkungan dengan tema “Berbagi Cerita: Menjaga Bumi, Melestarikan Alam”, Selasa (29/6/2021).

Di hadapan peserta webinar yang terdiri dari pelajar SD, SMP, dan SMA dari seluruh Indonesia ini, Siti berbagi cerita. Bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk turut menjaga bumi dan melestarikan alam. Membuang sampah pada tempatnya adalah salah satunya.

Siti mengatakan, untuk mengurangi timbunan sampah, sudah saatnya memisahkan barang-barang yang tidak dipakai untuk bisa diolah atau dipakai lagi. Penggunaan plastik sekali pakai juga harus dihindari. Agar tidak menambah sampah plastik, sehingga lingkungan sekitar tidak kotor atau banyak sampah.

“Jangan sampai sampah mengotori sumber-sumber air seperti sungai, laut, danau dan mata air, agar airnya tetap bersih dan bermanfaat. Dan jangan lupa,

kita juga harus menerapkan budaya hemat air, memakai air seperlunya,” pesannya.

Kebiasaan baik menjaga lingkungan selanjutnya yaitu menanam pohon. Menanam pohon bisa membantu melestarikan alam. Menanam pohon juga dapat menjaga air tetap tersedia, mengurangi banjir di musim hujan, mendapatkan air untuk persediaan di musim kemarau, dan mencegah bencana longsor.

“Kita harus menanam sebanyak-banyaknya pohon seumur hidup kita. Paling tidak 25 batang pohon setiap orang seumur hidupnya. Yaitu, ditanam 5 pohon saat di SD, 5 saat di SMP dan 5 saat di SMA dan 5 saat kuliah, serta nanti 5 lagi saat menikah. Jangan lupa, pohonnya dirawat dan dipelihara juga,” ujar Siti.

Siti juga berpesan agar anak Indonesia mencintai flora dan fauna. Banyak jenis tanaman dan satwa yang unik bahkan terancam punah, sehingga mereka juga perlu belajar agar dapat melestarikannya.

“Saya juga terus berharap, anak-anak untuk tetap semangat belajar, agar bisa mencapai cita-cita dan turut bersama-

ma melestarikan lingkungan,” harap dia.

Indonesia tengah menyongsong masa depan kehutanan maju. Diharapkan pembangunan kehutanan tidak lagi berorientasi pada ekstraksi kayu. Namun menjadi era kehutanan pascakayu yang berpedoman pada forest landscape management.

Secara khusus, Siti menyebutkan bahwa ide kehutanan pascakayu digagas dan diusung langsung oleh Presiden Jokowi. Makna utamanya ialah, bahwa kebijakan dan agenda kerja kehutanan pascakayu berkomitmen terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, adanya pembangunan kehutanan yang berkeadilan sekaligus pemeratakan distribusi penguasaan sumberdaya hutan bagi masyarakat, Melalui kebijakan dan program perhutanan sosial yang mampu menopang pengembangan sosial, ekonomi dan kelembagaan usaha.

“Presiden Jokowi melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif. Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka dan diaktualisasikan,” tegasnya.

Kehutanan pascakayu juga merupa-

## • INFO PROFIL

kan era kehutanan yang akan menjadi salah satu pilar bagi terwujudnya berbagai target pembangunan nasional maupun global. Mulai dari Sustainable Development Goal (SDG), pembangunan rendah emisi (Low Emission Development), pemenuhan NDC (Nationally Determined Contribution), kemandirian energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), kedaulatan pangan, dan program strategis nasional lainnya.

Salah satu tugas utama yang diemban KLHK adalah mencegah deforestasi atau hilangnya areal hutan akibat aktivitas manusia. Sejak Orde Baru, Indonesia disebut sebagai negara tropis dengan tingkat deforestasi tertinggi. Gambarnya, Indonesia pernah kehilangan hutan setara satu lapangan bola setiap menit.

Selama kepemimpinan Siti Nurbaya, tren deforestasi Indonesia relatif lebih rendah dan cenderung stabil. Pencapaian itu tak bisa lepas dari kebijakan moratorium hutan dan gambut melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Moratorium itu buah dari kepemimpinan Siti di KLHK.

Selain itu, penurunan itu terjadi berkat sejumlah kebijakan di KLHK seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian kerusakan gambut, pengendalian perubahan iklim, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor nonkehutanan (HPK), penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH/TORA), pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan dan lahan.

### **Birokrat Ahli Perencanaan**

Siti Nurbaya tercatat sebagai perempuan pertama yang duduk di kursi menteri yang menangani bidang lingkungan hidup maupun bidang kehutanan sejak Indonesia merdeka. Presiden Jokowi menunjuk Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Indonesia Maju selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

Penunjukan Siti sebagai Menteri LHK

untuk periode kedua dilatarbelakangi pada kinerja sebelumnya. Pada periode pertama, ia berhasil menunjukkan diri sebagai pekerja keras dan profesional di bidang perencanaan. Siti dinilai berhasil menyatukan dua kementerian dengan latar belakang dan budaya kerja yang berbeda.

Kinerjanya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup terbilang berhasil. Ia menjadikan kebersamaan dan dialog dengan beragam kalangan sebagai budaya kerja. Dengan cara itu, Siti kemudian melaksanakan sejumlah program dan aksi nyata.

Sebut saja, misalnya pemberian akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Serta penolakan impor sampah dan limbah dari negara maju.

Perempuan kelahiran Jakarta, 28 Agustus 1956, ini adalah anak dari pasangan Mochammad Bakar dan Sri Banon. Ayahnya adalah orang Betawi yang menjadi polisi dan pensiun pada 1977. Sedangkan ibunya, asal Lampung merupakan ibu rumah tangga.

Putri kelima dari delapan bersaudara ini, menghabiskan masa mudan-

ya di Jakarta bersama orang tua dan tujuh saudaranya.

Siti kecil mengenyam pendidikan dasarnya di SD Muhammadiyah III Matraman Jakarta, dan lulus 1968. Siti kemudian melanjutkan ke SMPN 50 Slamet Riyadi Jakarta, dan lulus tiga tahun berikutnya. Siti muda lalu meneruskan sekolah di sekolah unggulan di Jakarta, yakni SMAN 8 Bukit Duri Jakarta dan lulus 1974.

Setelah lulus SMA, Siti meneruskan pendidikan di Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus 1979. Setelah menggondol gelar insinyur, Siti menjadi pegawai negeri sipil di daerah asal ibunya, Lampung.

Tahun 1985, ia dikirim tugas belajar oleh Pemda Lampung untuk mengikuti pendidikan master di International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC), pada Jurusan Rural and Land Ecology Survey, Enschede, Belanda dan lulus 1988 dengan gelar Master of Science.

Kemudian, dia kembali ditugaskan belajar oleh Pemda Lampung untuk program S3 di almahaternya IPB tahun 1993. Siti menyandang gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Penaataan Ruang Wilayah dengan Peran Serta Masyarakat Menggunakan Sistem Informasi Geografis" di depan sidang dewan penguji pada 1998.

Disertasinya itu menunjukkan pengintegrasian metode inventarisasi lahan, evaluasi lahan, dan perencanaan lahan, serta penggunaan paralel informasi fisik biologi dan informasi sosial ekonomi untuk menghasilkan pola perencanaan tata ruang yang partisipatif.

Sebagian besar karir Siti Nurbaya dihabiskan sebagai birokrat di pemerintahan. Di Pemda Lampung, Siti menjadi penyuluh pertanian yang bersentuhan langsung dengan petani pada 1979-1981. Tahun 1981,



ia kemudian ditugaskan di Bappeda Lampung dan dipercaya sebagai Kepala Subbidang Analisis Statistik.

Kemudian, karirnya terus menanjak dengan menduduki sejumlah posisi di Bappeda Lampung, antara lain Kasi Penelitian Fisik, Kasi Pengairan, Kasi Tata Ruang, Kabid Penelitian, Kabid Prasarana Fisik, dan Wakil Kepala Bappeda Lampung.

Hampir 20 tahun Siti berkarya di Pemda Lampung dan 17 tahun di antaranya berada di Bappeda. Sukses berkarir di Bappeda dengan jabatan terakhir sebagai wakil kepala, Siti kemudian dipromosikan ke Jakarta pada Kementerian Dalam Negeri.

Siti menjabat kepala biro perencanaan Kemendagri sejak 1998. Kemudian, dia dipercaya memegang jabatan strategis sebagai Sekretaris Jenderal Depdagri tahun 2001-2005.

Selepas dari Kemendagri, Siti menjadi Dewan Komisaris Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Kementerian BUMN, hingga menghabiskan pengabdianya sebagai PNS dengan berkantor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ia menjabat Sekretaris Jenderal DPD RI tahun 2006-2013.

Setelah pensiun, Siti terjun ke dunia politik dengan bergabung Partai Nasdem dan menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem. Pada Pemilu 2014, Siti mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk daerah pemilihan Lampung I. Namun, Siti gagal lolos ke Senayan meski namanya cukup populer di Lampung.

Tidak lolos menjadi legislator di Senayan bukan berarti perjalanan karir Siti berhenti. Ia justru dipilih Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri LHK dalam Kabinet Kerja. Siti terpilih menjadi menteri sebagai perwakilan Partai NasDem yang menjadi salah satu partai pendukung Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Tahun 2019, Siti Nurbaya kembali dipercaya sebagai pembantu Presiden Jokowi. Ia kembali menduduki posisi yang sama sebagai Menteri LHK pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Sejumlah prestasi diraih Siti Nurbaya sepanjang karirnya sebagai ASN, antara lain mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2011. Pada 2004, Siti mendapatkan dua peng-



hargaan dari Presiden megawati Soekarnoputri, yaitu Bintang Jasa Satya Lencana Wirakarya dan PNS Teladan Nasional.

Tahun 2008-2010, Siti pernah menerima penghargaan sebagai 99 Most Powerful Women majalah Globe Asia dan penghargaan 100 Perempuan Terinspirasi majalah Kartini.

Tahun 2020, Siti Nurbaya menerima penghargaan atas keteladanan dan peran serta dalam mendorong kepatuhan dan kesadaran pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Terpilihnya Siti sebagai tokoh yang taat pajak diharapkan menjadi inspirasi keteladanan bagi masyarakat Indonesia. ●

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

# PENGATUR KAS NEGARA YANG DIPUJA DUNIA

Selaku Menteri Keuangan, Sri Mulyani lagi pusing-pusingnya. Dia cemas dicampur bingung mengurus uang negara.

**P**asalnya, di tengah lonjakan kasus COVID-19, kondisi kas negara kian menipis. Utang makin menumpuk. Di sisi lain, kematian mengancam rakyat, karena sejumlah implikasi akibat pandemi.

Hal ini membuat Sri Mulyani berpikir lebih keras, memutar otaknya, agar dapat menyelamatkan rakyat. Maka sempat muncul untuk merevisi UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Namun, belum selesai untuk direvisi, RUU KUP yang naskahnya sudah masuk di DPR, kemudian menjadi polemik. Muncul isu, bahwa negara akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah bahan pokok.

Tak mau semakin berkepanjangan, mantan Gubernur Bank Indonesia itu, buru-buru meralat wacana mengubah UU KUP. Dia menerangkan, bahwa bahan pokok yang akan dikenakan pajak ketika undang-undangnya disahkan DPR adalah yang jenis premium. Sementara yang dijual di pasar atau kebutuhan masyarakat, akan bebas pajak.

"Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional, yang menjadi kebutuhan masyarakat umum," tulis Sri Mulyani, melalui akun Instagram @smindrawati dengan menampilkan video dia sedang berbelanja di Pasar Santa, Jakarta Selatan, pada 14 Juni 2021.

Dalam unggahan tersebut, dia menjelaskan, pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara. Namun disusun untuk azas keadilan. "Misalnya beras produksi petani seperti Cianjur, Rojolele,

Pandan Wangi, dan lain-lain, yang merupakan bahan pangan pokok, dan dijual pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak," terang dia.

Dia menjelaskan, niat untuk merevisi UU KUP, adalah untuk mengembalikan keuangan negara, sekaligus mereformasi sistem perpajakan. Terlebih di situasi sulit seperti ini.

"Dalam menghadapi dampak COVID-19 yang berat, saat ini pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintah," jelasnya.

"Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti



yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut. Diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa, dan guru," sambungnya.

Untuk itu dia meminta kepada masyarakat, agar tidak mudah terma-kan isu yang sengaja memecah belah bangsa. Fokus pemerintah adalah untuk melindungi rakyat, ekonomi, dan dunia usaha agar mampu bertahan dan kembali lebih kuat saat pandemi berakhir. "Ayo kita jaga dan pulihkan bersama ekonomi kita," ajak Sri Mulyani.

### Selamatkan Resesi

Selain COVID-19, salah satu ancaman paling besar yang menghantui Sri Mulyani ialah resesi ekonomi. Pasalnya, sejak pandemi menghantam Tanah Air sejak kuartal II tahun lalu, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.

Tekanan ekonomi yang negatif secara berturut-turut, membawa Indonesia ke jurang resesi. Mau tidak mau, pemerintah terpaksa membuka keran utang demi menyelamatkan keuangan negara yang anjlok akibat banyaknya sektor bisnis yang terdampak pandemi.

Utang yang naik signifikan berdampak pada defisit anggaran yang semakin lebar. Pada 2020 ditargetkan 1,8 persen, naik signifikan hingga 3 persen.

"APBN yang bekerja sangat luar biasa, terlihat timbulkan defisit cukup signifikan. 2020 meningkat ke 6,1 persen dan tahun ini 5,7 persen. Ini sebabkan tren utang negara-negara meningkat saat ekonomi menurun, merosot," ujarnya dalam webinar bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).

Menurutnya, pinjaman harus dilakukan pemerintah untuk membiayai belanja negara yang meningkat signifikan untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tapi hampir seluruh negara di dunia. Ini tercermin dari utang dan rasio utang negara-negara ini yang meningkat tajam.

Bahkan dibandingkan negara lainnya, Indonesia masih dalam posisi moderat, karena perekonomian negara lainnya adalah yang lebih tertekan dalam. Selain itu, dari posisi utang, banyak negara yang alami defisit anggaran hingga double digit.

"Namun dengan 6,1 persen, defisit kita tidak kita katakan bahwa kita tidak perlu waspada, namun negara lain jauh lebih apakah dihitung dari debt to GDP rasio dan nanti terkait beban utang," jelasnya.

Kebijakan tersebut diklaim menempatkan ekonomi Indonesia tidak kontraksi terlalu dalam. Pada 2020 ekonomi Indonesia minus 2,07 persen. Meskipun kuartal I-2021, ekonomi masih minus 0,74 persen namun kuartal II diharapkan

batas maksimal 3 persen.

"Kita mulai harus lakukan langkah menyehatkan APBN kita dengan terus fokus sehatkan ekonomi dan masyarakat," tegasnya.

### Makan Telur Dadar Dibagi Dua Belas

Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjung Karang, nama lama dari Kota Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962. Anak ketujuh dari Profesor Satmoko ini dikenal



bisa kembali ke jalur positif dengan pertumbuhan sekitar 7-8 persen.

Beberapa indikator sudah terlihat membaik. Mulai dari perkembangan manufaktur hingga neraca dagang Indonesia yakni ekspor dan impor. Dia berharap semua elemen pemulihan bisa tetap dijaga, sehingga proses perbaikan ekonomi tetap berjalan dan APBN bisa kembali sehat dengan defisit kembali ke

sebagai anak yang cemerlang sejak dini.

Sebagai putri seorang akademisi, kehidupan Sri Mulyani kecil tidak seindah kelihatannya. Kehidupan sewaktu di Bandar Lampung terbilang pahit dan jauh dari berkelimpahan.

Apalagi Sri Mulyani lahir di sebuah keluarga besar, dengan sembilan keluarga kandung lainnya. Meski demikian, sulitnya ekonomi menjadi bagian pendidi-

## • INFO PROFIL

kan dari orang tuanya.

“Ibu saya itu orang yang sangat baik. Beliau kan dosen, dengan anak 10 pasti uangnya tidak cukup banyak. Tapi kalau ada orang datang, minta tolong, ada yang sakit, sunatan, kawinan, mau sekolah tidak punya uang, itu kemudian beliau habis dapat honor mengajar lalu ada orang datang ya dikasih saja,” kata

dibagi 12 potong untuk seluruh anggota keluarga. Konsep pendidikan serupa pun, diterapkan Sri Mulyani kepada anak-anaknya, meski dengan pola dan cara yang berbeda.

“Karena kalau (dulu) saya anak bersepuluh, barangkali empati itu menjadi otomatis karena ya memang kita harus toleran kan. Satu kamar berisi enam

rindang dipayungi pohon asam, hiking di Gunung Pati, Gashuku Semarang-Ungaran, belanja di Pasar Bulu dan Dukderan di Pasar Johar, main dan makan di Simpang Lima,” ujar dia dalam akun Instagramnya, Sabtu (1/8/2020).

Setelah lulus SMA, Sri Mulyani hijrah ke Jakarta. Dia mengenyam bangku pendidikan kuliah tinggi di Universitas Indonesia, jurusan Fakultas Ekonomi. Selama lima tahun dia berkuliah, mengenakan almamater kuning.

Setelah lulus, dia langsung mengabdikan diri untuk UI sebagai pengajar. Pengabdian ini bahkan terus dilakukan sampai sekarang.



“

Pada Agustus 2008, Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia.



Sri Mulyani dalam wawancara khusus dengan kumparan, untuk program My Mom My Inspiration.

Dia menilai hal tersebut sebagai pendidikan empati yang diajarkan ibunya sedari dia kecil. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang tak berkelimpahan di suatu keluarga besar, ujarnya, sikap empati dan toleransi itu pun kemudian tumbuh dengan sendirinya.

Termasuk ketika harus berbagai makanan, seperti telur dadar yang harus

orang gitu kan biasa atau kalau cerita klasiknya satu telur dibagi 12 gitu kan biasa, telur dadar. Kalau zaman mereka (anak-anak Sri Mulyani) enggak ada lagi kan?” ujarnya.

Ketika memasuki masa remaja, Sri Mulyani pindah ke Semarang. Di sana dia masuk ke SMAN 3 Semarang. Kota Atlas memiliki tempat tersendiri di hati ibu tiga orang anak ini.

“Naik sepeda sepanjang Jalan Pemuda dan Jalan Kalisari menikmati jalan

Tak puas hanya menyanggah gelar sarjana, Sri Mulyani melanjutkan pendidikan strata II di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat. Setelah mendapat gelar Master of Science of Policy Economics, dia langsung melanjutkan sampai mendapatkan gelar profesor di kampus yang sama.

Sembari belajar, dia juga membantu sebagai asisten profesor. Namun, setelah menyelesaikan pendidikan di Negara Paman Sam, Sri Mulyani langsung pulang ke Tanah Air, mengabdikan diri sebagai staf ahli bidang analisis kebijaksanaan Oto-Bappenas.

Nama Sri Mulyani mulai naik ke permukaan ketika era Reformasi. Dia dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid sebagai anggota Dewan Ekonomi Na-

sional pada 1999-2001. Kemudian pada 2002, ditunjuk menjadi Executive Director International Monetary Fund mewakili 12 negara Asia Tenggara selama dua tahun pada 2002-2004.

Saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden Keenam RI, Sri Mulyani dipercaya membantunya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Tapi hanya setahun amanah itu diembannya.

Walaupun singkat, tapi dia sukses membantu SBY, mendapatkan dana investasi dari luar negeri yang terus mengalami peningkatan. Pada 2004, dia mampu meraih USD4,6 miliar, namun setahun setelahnya meningkat USD8,9 miliar.

Setelah itu dia ditunjuk SBY membantu uang negara sebagai Menteri Keuangan. Salah satu kebijakan yang cukup drastis adalah memecat petugas korup di lingkungan departemen keuangan. Atas keberhasilannya itu, dinobatkan sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney.

Selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6.6 persen, tertinggi sejak krisis finansial di Asia pada 1997. Namun pada 2008 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6 persen akibat perlambatan dalam ekonomi global.

Pada Juli 2008, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, menggantikan Boediono yang mengambil jabatan di Bank Indonesia.

Pada Agustus 2008, Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia.

Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia menggantikan Juan Jose Daboub, yang menyelesaikan empat tahun masa jabatannya pada 30 Juni 2010, yang mengatur dan bertugas atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara.

Pengunduran dirinya berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8 persen.

Nilai rupiah turun hampir 1 persen dibandingkan dolar.

Merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan. Kejadian ini disebut sebagai "kerugian Indonesia, dan keuntungan dunia".

Setelah enam tahun berkantor di Washington DC, Sri Mulyani akhirnya pulang ke Indonesia. Kepulangannya itu disambut bahagia oleh Joko Widodo yang telah terpilih sebagai presiden.

Dia lalu meminta Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan sejak 27 Juli 2016 sampai sekarang. Alasan dia kembali ke Tanah Air adalah kedua orang tua. Pasalnya, orang tuanya memiliki semangat nasionalisme dan harapan besar adanya perbaikan di negara.

"Almarhum orang tua saya pasti akan merasa senang saya kembali Indonesia. Mereka pasti mengharapkan saya bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat. Orang tua saya kan dua-duanya guru besar jadi hatinya perhatiannya selalu terhadap sumber daya manusia atau kualitas SDM," jelasnya lewat diskusi daring,

pada 17 Agustus 2020 lalu.

Dia pun mengungkapkan bahwa saat Presiden Jokowi memintanya pulang kembali dan menjabat sebagai Menteri Keuangan merupakan suatu panggilan yang terhormat dan sekaligus menjadi amanah yang perlu dijaga dengan baik.

Menurutnya, pengabdian kepada Negara menjadi prioritas yang perlu dipenuhi oleh setiap warga, khususnya dirinya sendiri. "Seolah-olah jabatan

Menteri Keuangan dibandingkan Bank Dunia itu lebih enak di sana.

Tetapi kalau orang kerja itu kan tidak cari enak dan tidak enak," tutur dia. ●



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono

# ANAK KOLONG YANG DOYAN MENABUH DRUM DAN MEMBANGUN INFRASTRUKTUR

Ada saja tingkah kocak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang mencuri perhatian.

**S**osok menteri satu ini memang dikenal dengan pembawaannya yang nyentrik, dan jenaka. Maka tak heran, Basuki dikagumi kalangan anak muda.

Tidak hanya kabar soal kelucuannya saja, Basuki Hadimuljono juga serius membangun Indonesia.

Basuki adalah salah satu menteri Presiden Joko Widodo yang dipertahankan hingga periode kedua pemerintahannya. Kinerjanya mumpuni. Ia dianggap berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, program prioritas Jokowi.

Selama menjabat Menteri PUPUR pada periode pertama, Basuki sudah menyelesaikan banyak infrastruktur yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Pencapaian menteri yang lebih dari 30 tahun berkarya di Kementerian Pekerjaan Umum itu meliputi bidang sumber daya air, konektivitas pembangunan jembatan dan jalan, serta di bidang perumahan dan permukiman.

Pada 2018, sembilan bendungan baru terwujud berkat kepemimpinannya. Yakni Payaseunara, Nipah, Bajulmati, Jatigede, Titb, Rajui, Teritip, Raknamo dan Tanju. Selain itu, Basuki juga masih melanjutkan pembangunan 49 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia juga berhasil membangun 860.015 hektare jaringan irigasi baru dan merehabilitasi lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi.

Akhir Juni lalu, masih di bawah komando Basuki, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan tambahan tiga bendungan baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tiga bendungan multifungsi tersebut yakni Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung; Bendungan Pasellor-eng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; dan Bendungan Kuningan di Kuningan, Jawa Barat.

Menyusul kemudian jalan berkelok-kelok Bukit Sibeabea yang sempat viral di media sosial. Hanya dalam waktu kurang dari setahun terhitung sejak April 2020, jalan akses menuju lokasi wisata Patung Yesus sepanjang 2,5 kilometer itu rampung.

Selain akses menuju wisata rohani Puncak Bukit Sibeabea, Kementerian PUPR juga membangun sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan, untuk mendukung konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba. Di antaranya pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba sepanjang 4 km, preservasi jalan dan jembatan ling-

Jembatan Pak Kasih Tayang, Jembatan Petuk, dan Jembatan Sigandul. Ia juga membangun empat flyover di Brebes dan Antapani, Bandung dengan teknologi Corrugated Mortar Busa Pustajan (CMP).

Basuki mengaku sudah menyelesaikan 1.852 kilometer jalan tol selama lima tahun terakhir masa tugasnya. Dia menilai, Indonesia sangat terlambat dalam pembangunan jalan tol dan tertinggal jauh, dari negara lain di Asia Tenggara.

"Bukan untuk wah-wahan. Seperti yang saya bilang. Kita ini ketinggalan," kata Basuki di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

gung jawab mengelola anggaran di Kementerian PUPR senilai Rp131,82 triliun, dari pagu anggaran semula Rp149,81 triliun atau dikurangi Rp17,99 triliun. Selanjutnya, pagu revisi Kementerian PUPR menjadi sebesar Rp134,89 triliun karena terdapat percepatan penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) Rp2,91 triliun dan luncturan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp0,18 triliun.

Pada semester 1-2021, Kementerian PUPR telah menyerap anggaran negara senilai Rp53,16 triliun. Basuki menargetkan serapan anggaran tahun ini mencapai 98,12 persen atau senilai Rp137,23 triliun.



kar Samosir, serta membangun Jembatan Aek Tano Ponggol dengan panjang penanganan 294 meter.

Pembangunan jalan Bukit Sibeabea menambah deretan pencapaian Basuki di bidang konektivitas. Selama periode pertamanya, Kementerian PUPR berhasil memfasilitasi pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa.

Tak hanya itu, Basuki sukses merampungkan empat jembatan bentang panjang, yakni Jembatan Merah Putih,

Di bidang perumahan, ia berhasil menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Umbulan yang dimulai 2017, renovasi dan pembangunannya 33 venue di DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat untuk Asian Games.

Terasuk, pembangunan 44.893 unit rumah susun di seluruh Indonesia. Selanjutnya perpustakaan Apung di Tambak Lorok Semarang, pembangunan 473.165 unit rumah swadaya, dan 2.358 unit rumah khusus.

Tahun 2021, Basuki disertai tang-

"Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19," kata Basuki, Senin (5/7/2021), dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR.

Salah satunya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Sejuta Rumah. Menurut dia, di masa pandemi COVID-19, rumah menjadi kebutuhan

## • INFO PROFIL

penting masyarakat agar terhindar dari penularan virus.

"Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi," kata Basuki pada 12 Juli 2020.

binet pemerintahan akan datang.

"Bukan berarti pembangunan dilarang. Tapi pembangunan baru harus selektif dan harus bisa diselesaikan pada 2024. Minimal progres pembangunan tinggal sedikit lagi selesai, dan tidak ada yang mangkrak di 2024," ujar Basuki

operasi, dan rehabilitasi. Semisal, pemeliharaan Jalan Lintas Timur Selatan (Jalin Tim) di Riau maupun Jembatan Nibung yang rusak akibat diterjang bencana banjir musiman di Kabupaten Bangka Tengah.

Ia meyakini, konektivitas yang semakin lancar akan mengurangi biaya angkut kendaraan logistik. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

### Anak Kolong

Basuki memiliki sejumlah julukan. Ada yang menjulukinya, "Daendels RI". Ada juga yang menyebutnya "Bapak Infrastruktur".

Lahir di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah pada 5 November 1954. Sejak kecil ia dan

keluarga terbiasa berpindah-pindah tempat tinggal, mengikuti penugasan ayahnya, seorang ang-



Bahkan, ia menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56,5 persen menjadi sebesar 70 persen atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga.

Melihat anggaran APBN yang semakin terbatas akibat banyaknya pengeluaran imbas pandemi dan bencana alam, Basuki memastikan, kementeriannya sampai 2024, akan sangat selektif dalam program pembangunan infrastruktur. Pada prinsipnya, ia tidak ingin meninggalkan isu dan proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak kepada ka-

saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021, Senin (15/3/2021) seperti dilansir dari Antara.

Basuki menegaskan, tahun depan harus memberikan perhatian lebih kepada kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui optimalisasi, pemeliharaan,



gota TNI Angkatan Darat. Ia adalah anak ke empat dari delapan bersaudara.

Basuki remaja menamatkan SMP di Papua dan melanjutkan SMA di sana. Tetapi lagi-lagi, ia harus pindah sebelum lulus. Basuki akhirnya menyelesaikan SMA di Surabaya, Jawa Timur.

Setelah lulus SMA pada 1975, Basuki kemudian pergi ke Bandung untuk melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun keinginannya itu kandas. Lantaran kampus impiannya itu tidak menerima dirinya.

Kemudian ia pergi ke Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada (UGM). Basuki diterima menjadi mahasiswa di Teknik Geologi UGM dan meraih gelar insinyur pada 1979.

Berbekal gelar insinyur itu, Basuki mendapat pekerjaan sebagai PNS di Kementerian Pekerjaan Umum. Selama berkarier di instansi tersebut, dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan master dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat. Di sana ia meraih gelar master bidang teknik pada 1989, kemudian doktor tiga tahun kemudian. Ia tercatat sebagai PNS pertama di lingkungan PU yang menyandang gelar doktor.

Selama bekerja di kementerian, ia pernah dinobatkan sebagai pegawai teladan, dan kariernya terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Bahkan di luar instansi, Basuki juga dipercaya menangani sejumlah kerusakan akibat bencana, bersama tim di masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seperti, penanggulangan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur; rehabilitasi pasca-tsunami Aceh; kerawanan pangan Yahukimo, Papua; dan kerusakan jalan tol Purbaleunyi, Bandung, Jawa Barat

Karier Basuki terus menanjak, hingga di usianya yang ke-49 tahun, ia berhasil menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA). Lalu, ia berganti jabatan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU. Pada tahun 2007 hingga 2013, Basuki dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU.

Setelah itu, ia berganti jabatan sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Ke-

menterian PU selama satu tahun, yakni sampai 2014. Hingga akhirnya, di periode pertama Presiden Jokowi, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR, mulai dari 2014 hingga 2019.

Basuki terkenal sebagai sosok yang sederhana, dan berhati besar. Bahkan, rumahnya yang ia bangun di kawasan Bekasi Timur digusur karena terdampak

Hal ini diketahui melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 2019. Mobil Toyota Yaris yang terdaftar pada LHKPN 2014 diganti dengan mobil Royal Enfield dan nilai mobil Honda Accord yang ikut menurun, sehingga total nilai koleksi kendaraan milik Basuki jadi sebesar Rp190 juta.



proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Basuki juga mengatakan, pertama kalinya dalam sejarah rumah menteri akan digusur. Dia berencana, di rumahnya yang baru nanti, akan memakai kompor induksi.

Selain dikenal sebagai satu-satunya menteri yang tak memiliki akun Whatsapp karena menggunakan ponsel 'jadul'. Basuki juga diketahui tidak terlalu gemar mengoleksi mobil mewah.

Sebagai birokrasi tulen, dia juga sangat kreatif dan doyan bermain alat musik drum. Posisinya sebagai drummer di band Kabinet Kerja Jilid I, yaitu 'Elek Yo Band' bahkan tidak tergantikan.

Saat ditanya soal kabar band tersebut usai kabinet periode pertama Jokowi dibubarkan, Basuki menjawab kepada awak media dengan judul lagu ciptaan Didi Kempot, "Suket Teki". Jawaban itu mengandung arti "harapan yang sia-sia". •

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim

# CAHAYA TERANG DI UJUNG JALAN PENDIDIKAN

Baru-baru ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengungkapkan, Indonesia membutuhkan lebih dari 2,2 juta guru untuk menyesuaikan standard kurikulum yang berlaku saat ini.

Jumlah tersebut sangat kurang dibandingkan fakta di lapangan yang saat ini hanya tersedia sekitar 1,3 juta guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Maka masih dibutuhkan 900 ribu tenaga pendidik lagi di sekolah negeri, demi menjawab kebutuhan pendidikan di masa kini.

"Bahkan jika diperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun tahun ini, kita membutuhkan lebih dari 1 juta guru," papar Nadiem dikutip dari laman Kemendikbudristek, Kamis (8/7/2021).

Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pendidik menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Di mana guru profesional berperan dalam membentuk karakter peserta didik.

"Guru profesional dengan kompetensi

unggul menjadi kunci terlaksananya pendidikan yang berkualitas. Ketersediaan dan penjaminan kesejahteraan guru profesional merupakan tugas pemerintah," tuturnya.

Atas kondisi tersebut, pemerintah membuka perekrutan guru ASN dengan perjanjian kerja PPPK pada yang dilaksanakan pada 2021. Seleksi ini diselenggarakan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta pemerintah daerah.

atau tidak mengambil SKS sama sekali atau sedang menunggu kelulusan.

"Ini bukti bahwa kita mendengar dan berupaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis COVID-19 ini. Kerangka regulasi ini kita berikan agar semua perguruan tinggi negeri bisa segera melakukan keringanan UKT untuk membantu mahasiswanya yang terdampak," papar Nadiem pada 5 Januari 2021 lalu.

Bantuan UKT atau biaya perkuliahan diberikan kepada 410.000 mahasiswa semester III, V, dan VII, menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan

kuota internet bagi siswa, guru, dan dosen selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk periode waktu September-Desember 2020.

Perjuangan anggaran yang dilakukan Nadiem dilakukan hingga ketersediaan kuota gratis terus berlanjut hingga tahun ini, menyusul lonjakan COVID-19 belum juga mereda. Kuota gratis dibagikan mulai setiap pada 11-15 Maret dan setiap bulannya. Kuota juga berlaku selama 30 hari sejak diterima.

Rincian kuota tersebut yaitu peserta didik PAUD 7GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 10 GB per bulan, jenjang pendidi-



Perhatian Nadiem terhadap tugas kementerian yang dinakhodainya tidak hanya soal sumber daya manusia. Ada pun di tengah pandemi COVID-19, Nadiem juga memberikan bantuan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta dan negeri, di wilayah yang paling terdampak COVID-19.

Pihaknya juga telah memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhadap mahasiswa yang terdampak pandem. Mahasiswa juga tidak wajib membayut UKT jika tengah cuti kuliah,

Pendidikan.

Termasuk memberikan bantuan subsidi upah kepada 1.634.832 PTK PUAD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, 374.836 PTK Pendidikan Tinggi, dan 48.000 pelaku budaya seni. Lebih dari itu Kemendikbud juga di tengah pandemi, memberikan bantuan kuota data internet kepada pelajar untuk menjalani pembelajaran secara daring.

Misalnya, sejak Agustus 2020 lalu, Nadiem telah mengucurkan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk membelikan

kan menengah atas 12 per GB, dan mahasiswa serta dosen 15 GB per bulan

Tidak hanya, dia membuat program Guru Penggerak sebagai rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Pendidikan Guru Penggerak sendiri merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program tersebut mencakup pelatihan daring, lokakarya, konferensi hingga pendampingan selama sembilan bulan bagi calon Guru Penggerak.

Kebijakan Nadiem menyikapi kondisi

## • INFO PROFIL

pandemi COVID-19 dan mengelola pendidikan nasional sempat dipuji pengamat pendidikan, Itje Chodidjah. Dia mengaku yang dilakukan Nadiem membuat tata kelola pendidikan Indonesia lebih baik.

“Sekarang kebijakan yang dimunculkan

Kemampuan yang dimiliki Nadiem sebagai pendiri super app, Gojek, memang telah menjadi daya tarik kuat yang dilirik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama ketika mempercayainya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju.



kan Mas Menteri membuat saya adem. Memang yang dilakukan Kemendikbud era Nadiem tidak akan satu kali jadi. Pasti ada tantangan. Tapi, saya melihat cahaya di ujungnya,” paparnya melalui keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Itje juga kagum dengan program Merdeka Belajar yang digagas Nadiem. Dia menilai sangat membantu guru di seluruh Indonesia. “Sebagai pelatih guru, bagi saya ini betul-betul program unggulan,” tutur Itje.

Bikin Jokowi Terpakau

Nama Nadiem pun semakin melejit sebagai salah satu generasi milenial, yang menjabat kedudukan paling tinggi di negeri ini. Sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu, dan dituntut oleh sebuah standar yang sama. Nah kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi aplikasi sistem yang bisa mempermudah membuat loncatan. Sehingga hal-hal yang dulu dirasa tak mungkin sekarang menjadi mungkin. Itu kenapa dipilih Mas

Nadiem,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2021).

Jokowi mengungkapkan bahwa Nadiem pernah bercerita kepadanya, Indonesia berpeluang untuk merealisasikan hal itu, dibantu dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memumpuni.

“Beliau bercerita kepada saya apa yang akan dikerjakan. Kita butuh kualitas SDM nanti betul-betul bisa terjadi. Ada peluang besar ada terobosan untuk melakukan itu,” tuturnya.

Jokowi juga yakin kepada Nadiem untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk dari segi pengembangan teknologi. Dalam hal ini yaitu big data. Untuk memproteksi selera konsumen, politik, hingga cara berperilaku generasi muda saat ini, yang pengelolaannya menggunakan internet.

“Big data ini penting sekali, sehingga yang namanya pengelolaan dengan menggunakan internet of think, artificial intelligent. Menggunakan big data ini memerlukan sosok yang mengerti betul, tahu betul,” sambung Jokowi.

Jauh sebelum dipercayai Presiden Jokowi, Nadiem besar sebagai putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie yang lahir di Singapura 4 Juli 1984.

Ayahnya, Anwar Makarim merupakan pengacara asal Pekalongan. Ibunya, Atika berasal dari Pasuruan.

Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Nadiem lulus pendidikan menengah atas United World College of Southeast Asia, Singapura. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 jurusan Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat.

Ia dikenal aktif selama menjalani kuliah, bahkan sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics dalam satu tahun. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Harvard Business School, Amerika Serikat jurusan administrasi bisnis.

Dalam perjalanan kariernya, Nadiem mulainya pada 2006 bekerja di perusahaan konsultan di Jakarta yang berpusat di Amerika Serikat, yakni McKinsey & Co selama tiga tahun.

Kariernya semakin berkembang di mana pada 2011, ia dipercaya sebagai Co-Founder dan Managing Director Indonesia, selama satu tahun, dan menjadi

Chief Innovation Officer Kartuku selama satu tahun.

Pengalaman dan tekad yang tertanam, membuat Nadiem semakin membuat langkah kariernya lebih jauh, dengan mendirikan Gojek pada 2011. Perusahaan itu semakin tumbuh dan mendapatkan dua investor pada 2014 yakni Redmart Limited dan Zimplistic Pte Ltd.

Kemajuan Gojek juga membuatnya masuk dalam majalah Forbes sebagai rising star pada 2017 lalu. Gojek bahkan telah menginjak sebagai startup decacorn dengan nilai valuasi USD10 miliar.

Perusahaan itu juga telah melayani lebih dari 50 kota di Indonesia dengan lebih dari 300 ribu driver yang tersebar di Indonesia. Nama Nadiem kemudian semakin mencuat, prestasinya membuat dirinya dipercaya sebagai Mendikbud.

Setelah perubahan nomenklatur, Nadiem kembali dilantik Jokowi untuk kedua kalinya. Bukan untuk pindah posisi, tapi penambahan tugas, karena Kemendikbud dilebur bersamaan dengan tugas riset dan teknologi. Pelantikan itu sekaligus dilakukan bersama Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Ini merupakan riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya. Dan merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan Kebudayaan," papar Nadiem Rabu, (28/6/2021).

Ia pun berharap generasi muda semakin berkualitas melalui pengembangan inovasi, dan riset. "Kami menginginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka," tuturnya.

Ia juga mendorong hadirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengoordinasikan semua kegiatan riset di semua kementerian dan lembaga. •



Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko

# CIPTAKAN EKOSISTEM RISET MENUJU INDONESIA MAJU 2045

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, kala dilantik pada 28 April 2021 lalu.



**H**andoko mengatakan, ekosistem riset dan inovasi di Indonesia tidak berkembang disebabkan minimnya aktivitas riset oleh swasta dan minimnya ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) serta anggaran penelitian.

Alhasil, kontribusi riset dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat minim.

"Kontribusi riset masih sangat minim dalam ekonomi kita, itu harus saya akui. Problemnnya apa? ada dua. Pertama aktivitas riset kita itu masih didominasi pemerintah. Kedua critical mass itu masih sangat rendah," jelas Handoko.

Critical mass peneliti ialah jumlah SDM, fasilitas, dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung aktivitas



profesional institusi penelitian. Di level mikro, di unit-unit yang melakukan penelitian, para periset mengeluhkan hal yang sama. Mereka mengeluh karena kekurangan infrastruktur, SDM, dan anggaran dalam melakukan penelitian.

"Itu masalah yang harus kita pecahkan dan itu sebenarnya problem dari lama. Itulah yang membuat ekosistem riset dan inovasi kita tidak berkembang. Karena pelaku riset saja complain semuanya, bagaimana bisa kita berharap mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan?," ujar Handoko.

Dia mengatakan, meningkatkan critical mass peneliti dan mengkonsolidasikan berbagai lembaga riset, baik milik pemerintah maupun swasta, merupakan pekerjaan rumah bagi BRIN saat ini.

Bila dua hal tersebut berhasil dibenahi, maka ekosistem riset dan inovasi di Indonesia dapat diperbaiki.

"Kami ingin menciptakan ekosistem supaya swasta bisa nimbrung. Menciptakan kondisi yang berguna untuk memberikan benefit bagi mereka (peneliti). Di situ kuncinya sebenarnya. Dengan itu akan terbentuk ekosistem itu. Itulah yang sedang kita lakukan

bulan-bulan ini," ujarnya.

Handoko menambahkan, pengembangan riset dan inovasi terus dilakukan pemerintah untuk dapat mencapai target Indonesia Maju 2045. Percepatan dilakukan, baik melalui integrasi dan kolaborasi lembaga pemerintah, juga dengan mengendepankan penciptaan SDM unggul.

Dia menyebut, visi Indonesia Maju 2045 bisa dicapai melalui empat pilar pembangunan, salah satunya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Jadi, Indonesia akan maju dengan berbasis pada ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Karena tanpa riset dan inovasi, kita tidak akan bisa memberikan nilai tambah pada suatu produk," ujarnya.

Ia mengatakan, kondisi perekonomian yang stagnan adalah karena rendahnya inovasi dan kualitas investasi. "Sehingga dengan terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendorong ke=omersialisasi hasil riset, akan membangun kapabilitas iptek untuk menjadi penghela pembangunan ekonomi berkelanjutan. targetnya, pertumbuhan

ekonomi di angka 5,4 hingga 6,0 persen pada 2024," ujarnya.

Untuk mencapainya, perlu dilakukan percepatan dengan melakukan integrasi sumber daya iptek, menciptakan ekosistem riset standar global terbuka dan kolaboratif, serta menciptakan pengingkatan ekonomi berbasis riset.

"Pertama tentunya adalah meningkatkan manusianya sebagai pelaku riset yang berkeaktivitas dan menciptakan sesuatu sebagai hasil olah pikir mereka. Barulah setelah itu kita melakukan transformasi digital," jelasnya.

Handoko menyatakan bahwa BRIN punya peran sebagai pendukung utama kebijakan berbasis iptek, terutama kebijakan pemerintah. BRIN memiliki para periset dan infrastruktur riset terintegrasi yang dapat diarahkan dan dimanfaatkan untuk mengakomodasi kebutuhan riset.

Dia mengatakan, dalam memenuhi permintaan setiap saat dari kementerian dan lembaga pada kondisi khusus, BRIN menyiapkan mekanisme internal untuk dapat memfasilitasi kebutuhan penelitian dan atau kajian ilmiah untuk mendukung keperluan kementerian/



lembaga.

Handoko menuturkan BRIN membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk kolaborasi kegiatan, di mana timnya fokus pada dukungan atas aspek riset atau kajian ilmiah. BRIN juga dapat melakukan peminjaman sementara sumber daya manusia untuk melakukan riset yang akan ditugaskan pada unit di kementerian/lembaga yang membutuhkan.

Selain itu, Handoko mengatakan perlu dibentuk skema bisnis dan relasi yang tepat antara BRIN dengan lembaga pemikir (think tank) dari lembaga swadaya masyarakat dan kementerian/lembaga sebagai pemakai.

"Teman-teman di BRIN diharapkan punya 'helicopter view' untuk melihat semua itu, sehingga punya riset cukup kuat secara kuantitatif, datanya solid, dan secara analisis kualitatif juga mumpuni. Itu menjadi bahan rekomendasi naskah akademis berbagai kebijakan untuk berbagai kementerian/lembaga. Itu yang diharapkan dari kami, yakni 'science based policy,'" ujar Handoko.

Fisikawan yang Aktif Ciptakan Inovasi

Handoko selama ini memang dikenal luas sebagai peneliti di bidang Fisika. Sejak 2018, pria kelahiran Lawang, Malang, Jawa Timur, pada 1968 itu memimpin Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Handoko pernah menempuh pendidikan tinggi di Jepang. Saat itu, dia tercatat sebagai peserta karyasiswa pemerintah Indonesia di bawah program OFP IV dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI era BJ Habibie.

Handoko sempat mengenyam bangku kuliah di jurusan fisika ITB selama beberapa bulan. Namun, karena mendapat beasiswa dari pemerintah itulah, dia akhirnya meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi ke Kumamoto University, Jepang.

Pada 1993, Handoko melanjutkan pendidikan jenjang master di Hiroshima University, hingga menyelesaikan program doktornya di bidang teori fisika partikel atau fisika energi tinggi pada 1998. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Handoko melanjutkan karir sebagai peneliti di lembaga-lembaga penelitian dunia, seperti The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics ICTP di Trieste Italia, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) di Hamburg Jerman, serta Department of Physics - Yonsei University di Korea Selatan.

Handoko juga merupakan Humboldt Fellow sejak 1999, serta ICTP Simons Associate periode 2014-2019. Sebagai peneliti, Handoko banyak berkiprah di LIPI, khususnya di Pusat Penelitian Fisika. Dia merupakan pionir penelitian di bidang pengetahuan lanjut dengan membangun Grup Fisika Teoritik dan Komputasi.

Di dunia penelitian, Handoko telah mendapatkan beberapa penghargaan, seperti PII Adhidarma Profesi Award dan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara (PB3N) pada tahun 2010. Dia juga meraih Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2009 untuk bidang sains.

Handoko pun masuk ke dalam tokoh dengan 101 Inovasi Paling Prospektif 2009 untuk Aplikasi TI Publik berbasis Data dan Komputasi Terdistribusi, meraih Satyalencana Wira Karya 2009 atas usahanya merintis aneka infrastruktur TI publik berbasis data dan komputasi terdistribusi, Achmad Bakrie Award untuk Bidang Sains 2008 atas penelitiannya terkait pencarian partikel Higgs, serta Habibie Award untuk Bidang Sains 2004 atas penelitiannya di bidang fisika teori dan Peneliti Muda Indonesia untuk Bidang IPA dan Lingkungan.

Prestasi internasional juga diraih saat mendapatkan kehormatan sebagai Simons Regular Associates Fellow di ICTP Trieste untuk periode 2014-2019, serta Humboldt Fellow sejak 1999.

Selain menjadi peneliti tetap LIPI di Kampus Puspiptek Serpong, Tangerang, Handoko juga menjadi pengajar BHMN di Departemen Fisika UI Kampus Depok sejak kepulangannya ke Indonesia tahun 2002. Di UI,

Handoko bergabung dengan Grup Fisika Nuklir dan Partikel bersama dengan Terry Mart.

Handoko memberikan mata kuliah lanjut untuk mahasiswa tingkat akhir dan pasca sarjana terkait fisika teori, seperti Fisika Kuantum Relativistik, Te-

rentan KKN.

Handoko juga menginisiasi sistem pendukung keterbukaan informasi publik KIP Online pertama di Indonesia. Sebagai kontribusi ke publik, dia juga membidani lahirnya beberapa portal ilmiah terkait, seperti fisik@net dan kom-



ori Medan, Teori Grup, Relativitas Khusus serta Fisika Partikel.

Selain di penelitian akademis, Handoko juga memiliki ketertarikan menciptakan inovasi bagi masyarakat. Dirinya termotivasi keresahan atas pola lama birokrasi yang bertele-tele. Contoh nyata inovasinya adalah implementasi sistem online penuh untuk Seleksi Penerimaan CPNS yang merupakan revolusi besar untuk mencegah proses penerimaan CPNS yang cenderung

put@si.

Selain itu, dia memiliki perhatian khusus atas manajemen informasi ilmiah yang ditunjukkan dengan merintis berbagai sarana seperti Indeks Ilmiah Indonesia, BUKU-e, IndoTeX, TESIS Online, OSS Indonesia, ISSN Online, Kompetisi Ilmiah, LIPI Press Online, Memory of the World Indonesia, serta LIPI-IR yang merupakan repositori institusi pertama yang diaktifkan di Indonesia dan teregister di openDOAR. •



# HERMAN DERU: GEKRAF HARUS JADIKAN UMKM SUMSEL LEBIH KREATIF PASARKAN PRODUK

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengharapkan jajaran Pengurus Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Nasional Wilayah Sumsel untuk lebih serius dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumsel agar di dalam menajalakan usahanya lebih kreatif dalam pemasaran produknya.

**"G**ekraf Sumsel ini dibentuk sebagai amanah yang diberikan oleh Pengurus Gekraf Pusat maka kerjakan dengan membina UMKM agar lebih kreatif di

dalam pemasaran produk," kata Herman Deru ketika menerima audiensi pengurus Gekraf Sumsel bertempat di ruang tamu gubernur, Selasa (13/7).

Menurut Herman Deru sebagai organisasi yang bermitra dengan peme-



rintah di sektor ekonomi, maka Gekraf sebagai penggerak ekonomi kreatif harus menjalankan fungsinya sebagai pertanggungjawaban pada kepengurusan ditingkat pusat.

"Gekraf ini sebagai motivator dalam menggerakkan ekonomi kreatif Sumsel agar tetap produktif dan survive di tengah pandemi seperti sekarang ini," ucapnya.

Di masa pandemi covid-19 lanjut Herman Deru, UMKM dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan usahanya agar dapat bertahan. Karena itu secara khusus gubernur meminta Pengurus Gekraf Wilayah Sumsel dapat memberikan solusi bagi UMKM yang kesulitan dalam permodalan, pelatihan dan pemasaran produknya.

"Saya harap dalam waktu dekat Gekraf ini sudah ada wilayah binaan bagi gerakan ekonomi kreatif sehingga UMKM di Sumsel ini menjadi se-

“  
Gekraf ini sebagai  
motivator dalam  
menggerakkan  
ekonomi kreatif  
Sumsel agar tetap  
produktif dan sur-  
vive di tengah pan-  
demi seperti seka-  
rang ini.

makin lebih kreatif," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Gekraf Wilayah Sumsel, Akbar Alfaro mengucapkan

terima kasih kepada Gubernur Sumsel Herman Deru sudah bekenan menerima kedatangannya untuk beraudiensi. Dia menyebut Gekraf dibentuk sejak enam tahun lalu yang diketuai langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf), Sandiaga Uno.

"Untuk kepengurusan di Sumatera Selatan dua minggu yang lalu sudah keluar SK-nya. Ini komunitas sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah," paparannya.

Turut hadir pada kesempatan ini, Plh. Asisten I Pemerintah dan Kesra Provinsi Sumsel, Supriyono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, Musiawati. Kemudian Sekretaris Gekraf Wilayah Sumsel, Iqbal Rudianto, Dewan Pakar Gekraf Wilayah Sumsel, Heri dan beserta Anggota Gekraf Wilayah Sumsel. ●

# MAKSIMALKAN PENYERAPAN ANGGARAN, HERMAN DERU TINGKATKAN SINERGITAS DENGAN KAKANWIL DPJB BARU

Di sela agenda kerjanya Rabu 14 Juli 2021, Gubernur Sumsel H.Herman Deru menerima audiensi jajaran pimpinan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel di ruang tamu Gubernur. Rombongan ini datang dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana M.M.

Selain menjadi ajang silaturahmi bagi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel yang baru, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas soal penyerapan anggaran baik itu mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dikatakan Kakanwil DJPb Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana M.M, sebenarnya ia telah ditugaskan di Sumsel sejak dua bulan lalu. Namun baru kali ini berkesempatan beraudiensi dengan orang nomor satu di Sumsel.

Tak hanya berkenalan, melalui audiensi ini Lydia juga bertujuan menda-

patkan arahan dari Gubernur Sumsel H.Herman Deru terkait penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Tujuan utamanya adalah silaturahmi, karena sejak dua bulan lalu Saya dipindahtugaskan di Sumsel. Sekaligus berkoordinasi mengenai realisasi transfer dana dan dana desa yang



menjadi prioritas kami," ujar Lydia.

Menurut Lydia dengan adanya audiensi dan arahan dari Gubernur Sumsel H.Herman Deru diharapkan dana alokasi untuk Sumsel senilai Rp1,9 triliun dapat terserap secara maksimal.

Sementara itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru menyambut baik kedatangan rombongan tersebut. Menurutnya komunikasi dan koordinasi memang diperlukan untuk meningkatkan sinergitas kedua belah pihak. Karena itu meski pandemi, ia mengaggas tetap dilakukan pertemuan secara rutin.

"Dulukan ada coffe morning namun sejak pandemi kegiatan menjadi terbatas. Tapi ini tidak menghalangi, koordinasi bisa tetap dilakukan secara virtual," jelasnya.

Menurut Herman Deru terkait penyerapan anggaran di Sumsel untuk KUR sangat tinggi di Sumsel. Hal itu tak

lepas dari upaya Pemprov yang mengangkat ribuan tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Petani (P2EP).

"Untuk dana desa itu Saya pikir perlu dilakukan penyederhanaan regulasi.

“

Tujuan utamanya adalah silaturahmi, karena sejak dua bulan lalu Saya dipindahtugaskan di Sumsel. Sekaligus berkoordinasi mengenai realisasi transfer dana dan dana desa yang menjadi prioritas kami.

Makanya kita harus rutin berkoordinasi satu sama lain. Sebab implementasinya butuh sinergitas yang kuat," tutup HD.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Umum Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Eko Budi-yanto SE, Kabid Pembinaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Mujiono, Kasi Pelaksanaan Anggaran 2.C Ditjen Perbendaharaan Prov Sumsel, Subur, Kepala Subbag TUTR Ditjen Perbendaharaan Prov Sumsel M.Unggul Yudianto, Pelaksana TUTR Ditjen Perbendaharaan Prov Sumsel, Suandi.

Sementara Gubernur Sumsel H.Herman Deru didampingi Plt. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Setda Sumsel Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM., M. Kes juga Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemrov Sumsel, Muzzakir. ●





# PEMROV SUMSEL DORONG BI PERLUAS IMPLEMENTASI QRIS KE KABUPATEN/KOTA

► Sekda Sumsel Hadiri FGD Monitoring Implementasi QRIS

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel untuk memperluas implementasi pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) hingga ke Kabupaten/kota.

**H**arapan tersebut disampaikan Plh Sekda Sumsel, Akhmad Najib saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Monitoring Implementasi QRIS di Wilayah Sumsel yang berlangsung di ruang rapat Kantor Perwakilan BI Sumsel Jalan Jend. Sudirman Palembang, Rabu (14/7/21).

Dijelaskan Akhmad Najib, kehadiran QRIS sebagai respon atas kemajuan teknologi yang begitu cepat berkembang dan dimanfaatkan di sektor transaksi perbankan.



“Sehingga produk bank mulai mengimplemetasikan QRIS ini. Kemajuan implementasi QRIS sudah kelihatan, tinggal bagaimana perluasannya saja agar mencapai ke kabupaten/kota, bahkan ke tingkat desa,” harapnya.

Dijelaskannya, salah satu upaya yang bisa dioptimalkan untuk memperluas implementasi QRIS tersebut, dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, sangat strategis penggunaan QRIS. Namun, masyarakat harus kenal dulu apa itu QRIS, agar bisa menggunakannya dengan kesadarannya sendiri. Saya sarankan, edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus,” ujarnya.

Selain itu, melakukan koordinasi antar pihak, termasuk kepala daerah menjadi cara kedua yang bisa dilaku-

“  
Kehadiran QRIS sebagai respon atas kemajuan teknologi yang begitu cepat berkembang dan dimanfaatkan di sektor transaksi perbankan.

kan. Namun, harus didukung adanya komitmen pemimpin, mulai dari Kabupaten/kota hingga level desa seperti kades.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumsel, Hari Widodo mengatakan, QRIS merupakan kanal pembayaran yang telah di launching pada 17 Agustus 2019 lalu, dan wajib diimplementasikan untuk QR pembayaran sejak 1 Januari 2020.

“Target nasional 12 juta merchant, dan Sumsel memiliki alokasi target 244.300 merchant. Hingga Mei 2021, 218.436 merchant telah tumbuh atau sebesar 95,01 persen di Sumsel. Dari jumlah tersebut, 95,93 persen diantaranya merupakan merchant UMKM dan sebagian besar didominasi Palembang dengan angka 62,47 persen,” ucapnya.

Dijelaskan Hari Widodo, jumlah merchant setiap sektornya telah menyasar pasar tradisional, minimarket, supermarket, masjid, gereja, pura, vihara, SPBU, pempek, instansi pemerintah, apotik, klinik, RS, dokter, hotel, Pnpes, universitas, sekolah, khursus, dnasi, songket dan lain sebagainya.

“Saat ini kita mulai menyasar ke lingkungan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sehingga dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan pemerintah,” tegasnya. ●

# KINERJA OTOMOTIF BIKIN HAPPY

## Balapan Jadi Pemain Top Kendaraan Listrik di Dunia

Industri otomotif memberi kabar bahagia di masa pandemi ini. Kinerjanya meningkat drastis, yang memberikan harapan untuk menjadikan Indonesia pemain top dalam industri kendaraan listrik.

**M**enteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, hingga saat ini industri otomotif di Tanah Air masih menjadi salah satu subsektor manufaktur, yang memberikan kontribusi gemilang pada industri nasional.

Ekspor produk otomotif untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih termasuk, komponen pada periode Januari-April 2021 tercatat sebesar Rp29,88 triliun. Sekitar Rp18,63 triliun di antaranya merupakan ekspor kendaraan Completely Build Up (CBU) dari Indonesia ke lebih dari 80 negara.

"Kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih periode Januari sampai dengan Mei 2021, tercatat sebesar 413 ribu unit, dan penjualan (wholesales) sebesar 320 ribu unit,"

kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

Saat ini, tercatat ada 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp71,35 triliun untuk kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun. Penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 38 ribu orang, serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

Selain itu, pemerintah terus mengakselerasi pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Antara lain melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem di Indonesia.

"Indonesia telah menetapkan roadmap atau peta jalan pengembangan EV melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV, dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal," ujar Agus.

Sebagai upaya mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik di dunia, pemerintah menciptakan ekosistem EV dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari produsen, produsen baterai, pilot project, konsumen, dan infrastruktur seperti

charging station, dan pilot project.

Roadmap pengembangan EV sudah dibuat hingga 2030. Targetnya, produksi EV pada 2030, dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.

"Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua," ucap Menperin.

Dalam roadmap tersebut, diperkirakan pembelian kendaraan listrik untuk roda empat akan mencapai 132.983 unit, sedangkan untuk kendaraan listrik roda dua akan mencapai 398.530 unit.

Selanjutnya untuk mempercepat popularisasi penggunaan EV, pemerintah akan menetapkan peraturan tentang roadmap pembelian EV di instansi pemerintahan. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan PPnBM sebesar 0 persen melalui Peraturan Pemerintah 74/2021, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 0 persen untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub 3/2020.

Kemudian BBN-KB sebesar 10 persen mobil listrik dan 2,5 persen sepeda motor listrik di Pemprov Jawa Barat, yang dituangkan dalam Perda 9/2019, uang muka minimum sebesar 0 persen dan suku bunga rendah untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/13/PBI/2020, diskon penyambungan dan penambahan daya listrik, dan lainnya.

"Produsen EV juga dapat memanfaatkan berbagai keuntungan seperti Tax Holiday, Mini Tax Holiday melalui Undang-undang 25/2007, Peraturan Menteri Keuangan (PMK 130/2020), Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 7/2020, tax allowance (PP 18/2015 Jo PP 9/2016, Permenperin 1/2018), Pembebasan Bea Masuk



Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) bersama Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo saat menghadiri IIMS 2021 di JIExpo, Jakarta 15 April 2021. (Istimewa)

(PMK 188/2015), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan Super Tax Deduction untuk kegiatan R&D (PP 45/2019, dan PMK No.153/2020),” jelas Menperin.

Hasil pertemuan antara Kementerian Perindustrian dengan para prinsipal industri otomotif di Jepang, pada Maret 2021 lalu, juga memberikan semangat agar tercapai investasi baru dari Toyota Motor Corporation sebesar Rp28,3 triliun pada 2024.

Selanjutnya, Honda Motor Company berkomitmen investasi sebesar Rp5,2 triliun hingga 2024, Suzuki Motor Corporation sebesar Rp1,2 triliun, dan Mitsubishi Motor Corporation sebesar Rp11,2 triliun sampai tahun 2024.

“Hal ini menunjukkan Indonesia masih menjadi negara tujuan utama investor dalam pengembangan industri kendaraan bermotor,” ujarnya.

Menperin menambahkan, baterai akan menjadi komponen paling penting dalam EV yang mewakili 35 persen dari biaya pembuatannya. Dalam hal ini, sektor manufaktur Indonesia memiliki keunggulan untuk memproduksi baterai yang terbuat dari Baterai Lithium Ion berbasis nikel. Saat ini ada sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai.

“Indonesia memiliki sumber daya berupa cadangan nikel terbesar secara global,” sebut Menperin.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meyakini, Indonesia bisa menjadi pemain utama di industri kendaraan listrik dunia. Apabila fokus dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki.

Pengembangan kendaraan listrik dapat mendorong penguasaan teknologi industri, dan rancang bangun kendaraan nasional, dan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB).

“Peluang untuk berhasil dalam mobil listrik seperti negara lain masih sangat besar karena perkembangan teknologi saat ini belum semapan combustion engine, dan starting point Indonesia relatif sama dengan negara lain,” ujar Moeldoko saat menjadi panelis dalam Investor Daily Summit 2021, Rabu (14/7/2021).

Moeldoko yang juga Ketua Umum

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengaku optimistis, Indonesia dapat mandiri memproduksi kendaraan listrik. Selain karena telah memiliki industri kendaraan konvensional yang matang, Indonesia juga merupakan salah satu negara pemilik cadangan nikel laterit terbesar dunia, yang merupakan bahan baku utama dari komponen termahal kendaraan listrik, baterai lithium.

“Artinya masih banyak potensi yang dapat dikembangkan. Sepanjang didukung dengan insentif fiskal maupun non fiskal yang menarik bagi pelaku industri dan investor, dukungan riset dan pengembangan teknologi

menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Dia bahkan mendorong perguruan tinggi untuk ikut ambil bagian dalam pengembangan prototipe kendaraan listrik.

Terbukti, sejumlah perguruan tinggi dan universitas di Indonesia memang menaruh minat terhadap riset kendaraan listrik. Melihat animo ini, mereka perlu mendapatkan dukungan dari pihak pabrikan otomotif agar bisa meningkatkan risetnya lebih baik lagi.

Namun, masih banyak kendala untuk mengembangkan riset kendaraan listrik lebih baik. Sehingga perguruan tinggi ujar Bamsuet, memerlukan bantuan dari pihak pabrikan otomotif.



**Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo melihat mobil listrik di IIMS 2021.**

dari BPPT maupun Universitas nasional, saya yakin Indonesia dapat memiliki kendaraan listrik karya anak bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global,” jelasnya.

Moeldoko menyatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan industri keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan skema pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.

“Selaku Kastaf, saya sudah mengundang pimpinan bank di Himbara untuk berdiskusi dalam mendukung pembiayaan kendaraan listrik. Sementara dari Periklindo akan melakukan sosialisasi kepada publik tentang kendaraan,” jelas Moeldoko.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung penuh kendaraan listrik,

“Spesifikasi kendaraan listrik yang dikembangkan Universitas Budi Luhur (UBL) masih menggunakan dinamo impor, dengan baterai lithium. Sebagai institusi pendidikan, UBL memiliki keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan kendaraan listrik. Sehingga perlu dukungan dari stakeholder otomotif,” ungkap pria yang akrab disapa Bamsuet tersebut pada Senin (6/7/2021).

UBL juga telah mengembangkan motor listrik BL EC-40, kolaborasi dengan Katros Garage. Memiliki spesifikasi kapasitas motor 9500 watt, baterai 15 Kwh, daya angkut maksimal 200 Kg, kecepatan maksimal 190 Km/jam, jarak tempuh maksimal hingga 160 Km dan waktu pengisian baterai hingga 6 jam,” urai Bamsuet. ●



Penerapan PPKM.

Menteri Kehilangan Sense of Crises

# PERMINTAAN MAAF LUHUT TERLAMBAT

Dalam situasi serba sulit ini, kelakuan para menteri malah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo. Kepala Negara kecewa kepada para pembantunya yang tidak berempati terhadap penderitaan rakyat.

**M**ulai dari Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan yang nantangin rakyat. Kemudian Menko Polhukam yang asyik menonton sinetron di saat PPKM Darurat. Hingga sejumlah menteri yang malah melancang ke luar negeri.

Para menteri itu seperti tidak punya 'sense of crisis'. Padahal negara sedang dalam kritis. Presiden Joko Widodo pun menyindir para pembantunya, agar lebih peka kepada rakyat.

"Presiden telah menegaskan bahwa

dalam PPKM Darurat ini tentunya 'sense of crisis' seluruh kementerian lembaga para pemimpin itu harus ada," ungkap Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Hal itu, menunjukkan bahwa Jokowi serius dalam menghadapi krisis multidimensi ini. Terlihat dari cara Jokowi yang selalu meng-update kebijakan terhadap COVID-19 ini. Bahkan ikut blusukan membagikan paket obat gratis dan multivitamin kepada warga yang melakukan

isolasi mandiri di Sunter, Jakarta Utara, pada Kamis (15/7/2021) malam.

Ironisnya, di saat Jokowi berkeliling ke rumah-rumah warga, Menko Polhukam, Mahfud MD, malah asyik berselancar di media sosial dan mendapat kritik warganet.

Lewat akun Twitter pribadinya, Mahfud mengaku memanfaatkan PPKM Darurat untuk mengikuti alur cerita sinetron fenomenal "Ikatan Cinta". Bahkan ia mengungkapkan pandangannya tentang pemahaman hukum si penulis



**Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.**

skenario sinetron. Para pengguna Twitter menilai komentar Mahfud sangat tidak penting untuk diutarakan, apalagi di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19.

Melihat banyaknya kekontrasan itu, pakar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai, hubungan antara Presiden Jokowi dengan para menterinya tidak berada dalam satu jalur yang sama, alias tidak nyambung.

"Menteri dan presidennya tidak connect. Presiden ke kanan, menteri-menterinya ke kiri. Mestinya presiden dan menteri-menterinya jalan seirama, se-iya dan se-kata," kata Ujang kepada Info Indonesia, tadi malam.

Dia mengatakan, saat ini banyak rakyat yang kesusahan dan perlu dibantu. Selain itu, rakyat juga tengah berjuang mati-matian agar tak terpapar COVID-19.

"Mestinya para menteri tergerak untuk bisa membantu rakyat dengan cara masing-masing. Bukan pelesiran apalagi nonton sinetron," tambah Ujang.

Ujang berpendapat, aksi Jokowi blusukan ke perkampungan warga Jakarta adalah sindiran keras kepada para menteri yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Agar (para menteri) memiliki rasa kepedulian yang tinggi pada rakyat. Apa susahny sih bantu sembako buat rakyat?" ujar Ujang.

Sementara itu, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan, presiden sebagai otoritas tertinggi di pemerintahan telah menunjukkan contoh yang baik. Sayangnya, para pembantunya tak mampu mengintegrasikan gaya kepemimpinan tersebut. Hal ini pada akhirnya membuat masyarakat bingung.

"Bila presiden blusukan dan membagi sembako ke warga, apakah itu dilakukan untuk melengkapi apa yang dilaksanakan para menterinya? Apakah blusukan sambil memberi sembako ke warga itu efektif? Hal ini yang acapkali menimbulkan pertanyaan publik," kata Siti Zuhro, kepada Info Indonesia.

Dia menambahkan, era disrupsi digital ini mengharuskan pejabat publik bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Dalam berkomunikasi dengan rakyat, pejabat harus memberikan tuntunan yang positif agar tidak semakin membingungkan dan meresahkan hati rakyat.

"Dalam kondisi seperti sekarang ini, diperlukan komunikasi politik yang mencerahkan dan mengedukasi rakyat," tegas Siti.

Dia tegaskan, Indonesia menghadapi masalah serius dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Mengelola negara kepulauan yang terdiri atas 542 daerah pemerintahan bukan urusan mudah, apalagi di dalam situasi bencana non-alam ini.

Dalam kondisi seperti ini, lanjut Zuhro, fungsi kepemimpinan sangat krusial. Pola komunikasi pemimpin akan berpengaruh terhadap masyarakat. Karenanya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 harus terintegrasi, baik antar tingkatan pemerintahan maupun di internal kabinet itu sendiri.

## • INFO POLITIK

Kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat harus dipatuhi dan dilaksanakan, khususnya oleh para menteri. Hal ini penting agar tidak menimbulkan keraguan publik.

Pengamat politik, Emrus Sihombing menilai, saat ini sudah saatnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin memecat menteri yang suka bikin gaduh. Terutama yang sehari-hari menangani aspek kesehatan, ketersediaan obat dan vaksin serta skema pembiayaan terkait COVID-19.

Figur pemimpin yang meledak-ledak, menantang sana-sini, dan selalu melihat masyarakat sebagai masalah utama penanganan pandemi, harus cepat diganti. Menurutnya, harus ada sosok yang berbicara apa adanya dan tidak berubah-ubah.

"Peran dan partisipasi wargalah yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah saat ini," kata Ray.

Tentu saja, lanjutnya, situasi seperti ini membutuhkan kejelian Presiden Jokowi, untuk memastikan seluruh pemban-

seperti tidak merasakan denyut nadi keemasan atau keputusasaan yang melanda rakyat. Selain ancaman terhadap kesehatan, wabah ini juga berpotensi melahirkan pengangguran baru dan kemiskinan ekstrem.

Dia menyesalkan, di situasi krisis seperti ini masih ada menteri yang sibuk dengan urusan receh, seperti membahas jalan cerita sinetron, bahkan memberikan penghargaan kepada tayangan sinetron terfavorit.

"Masing-masing menteri-menteri pre-



Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro.

"Karena melihat jumlah kasus COVID-19 belum dapat dikendalikan dan belum ada tanda-tanda penurunan," kata Emrus.

Sedangkan Direktur Lingkaran Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai, ini waktu yang tepat bagi presiden untuk mencari tokoh pengganti Luhut Pandjaitan pada posisi Koordinator PPKM Darurat.

Figur tersebut mesti mampu menarik solidaritas masyarakat dan internal kabinet, menggerakkan masyarakat untuk bertindak sukarela dalam mengatasi pandemi.

tunya bersatu, fokus, terkoordinasi, dan lebih berempati kepada rakyat.

Presiden juga harus mendorong semua pembantunya menjadi garda terdepan menghadapi pandemi dengan segala macam aktivitas yang memungkinkan mereka terlibat secara langsung. Jangan sampai ada agenda menumpang untuk tujuan pribadi.

"Tidak boleh ada yang mencoba mengambil keuntungan baik politik maupun ekonomi bagi pribadi atau kelompok," ucap Ray.

Saat ini ia menilai para elite pemerintah

siden seperti tidak terkoneksi. Sibuk dengan aktivitas dan agenda masing-masing. Tak jarang malah saling membelakangi," kata Ray.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sendiri telah meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Luhut karena pelaksanaan PPKM Darurat belum berjalan optimal.

"Sebagai koordinator PPKM di Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum

optimal,” ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7/2021).

Meski begitu, Luhut berjanji bersama jajaran menteri dan pejabat publik lain akan berusaha keras menekan dan menurunkan jumlah kasus positif COVID-19 varian Delta di Indonesia.

“Saya bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bansos kepada masyarakat bisa dilakukan,” janji dia.

Tapi permintaan maaf Luhut, menurut Politikus Partai Demokrat, Irwan Fecho sudah terlambat.

“Bagi saya bukan tidak optimal, tetapi gagal. Terbukti, PPKM se-darurat apa pun tanpa biaya jaminan hidup bagi masyarakat dari pemerintah, akan sia-sia,” ucap Irwan dalam keterangannya, Sabtu malam (17/7/2021).

Wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu menyarankan sebaiknya kebijakan PPKM Darurat yang tengah dievaluasi pemerintah tidak perlu dilanjutkan.

“Lebih baik pemerintah fokus meningkatkan akselerasi vaksinasi, juga penguatan layanan kesehatan serta bantuan pemerintah pada masyarakat dan pelaku usaha,” ucap Irwan.

Yang lebih penting lagi, lanjut Irwan, perang melawan COVID-19 ke depan harus dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi lebih baik pimpin langsung daripada didelegasikan lagi kepada satu menteri atau yang lain. Tertibkan buzzerp yang noise, juga ganti komunikator istana yang lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat,” ujar politikus asal Kalimantan Timur itu.

Anggota Komisi V DPR RI itu juga mendorong Presiden Jokowi menginisiasi pertemuan dengan para presiden dan eks wakil presiden RI guna mendapatkan masukan yang lebih luas dan jernih.

“Ini perang kita bersama. Saya yakin akan ada rekomendasi yang strategis dan prioritas bagi bangsa ini untuk mengatasi COVID-19 dan pulihkan ekonomi nasional pasca pertemuan,” pungkas Irwan Fecho.

Namun, permintaan maaf saja tidak cukup. Luhut juga diminta bertanggung jawab dengan segera mundur dari jabatan Menko Marves dan Koordina-

tor PPKM Darurat. Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

“LBP minta maaf itu tidak cukup. Sebab dia pernah bilang pandemi terkendali padahal jumlah kasus positif COVID-19 terus bertambah dan kematian ter-

untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit serta mengantri untuk mendapatkan oksigen.

Karena itu, LBP secara moral sangat melukai kemanusiaan dan dia mesti menunjukkan bahwa bukti pengakuan kesalahan tersebut.



**Pengamat politik, Emrus Sihombing**



**Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun**

jadi secara bertubi-tubi. Itu kebohongan yang menyayat nurani kemanusiaan,” ujarnya.

Menurut Ubedilah, Luhut sama sekali mengabaikan data kasus positif Covid-19. Bahkan, juga mengabaikan kematian warga negara yang mengantre

“Salah satunya dengan mundur dari jabatannya sebagai menteri dan ketua PPKM Darurat, bukan sekadar minta maaf. Sebab mundur dari posisinya sebagai menteri adalah wajah paling konkret dari pengakuan kesalahan elit politik,” demikian Ubedilah. ●



## APEC Informal Leaders' Retreat – 16<sup>th</sup> July 2021



### Pertemuan Informal Pemimpin APEC

# HARAPAN PRESIDEN JOKOWI (SEMENTARA) TERPENUHI

Para pemimpin negara dalam kerja sama ekonomi Asia-Pasifik (APEC), sepakat melipatgandakan pembagian dan pembuatan vaksin Covid-19 untuk memerangi pandemi global. Harapan Presiden Jokowi pun mendapat tanggapan positif.

**S**ebenarnya pertemuan para pemimpin negara APEC kali ini bersifat informal. Namun, yang tampil di acara dalam jaringan internet (daring) itu, adalah pemimpin negara-negara yang sangat mempengaruhi konstelasi global. Termasuk antaranya Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat, Xi Jinping dari Tiongkok, dan Presiden Vladimir Putin dari Rusia. Juga Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga yang negerinya menggelar Olimpiade kali ini.

Presiden Jokowi pun berbicara di forum yang berlangsung pada Jumat

malam, 16 Juli 2021 Waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerukan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara di dunia untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19. Kemudian Presiden juga menggarisbawahi pentingnya dunia memastikan upaya vaksinasi global, termasuk memperkecil kesenjangan vaksinasi.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini kesenjangan vaksinasi di dunia masih cukup lebar. Kesenjangan ini dicontohkan oleh Presiden dengan data bahwa penyun-

tikkan dosis vaksin di kawasan ASEAN baru mencapai 17,63 persen dari populasi, di kawasan Afrika baru 4,3 persen dari populasi. Sementara di kawasan Amerika Utara dan Eropa masing-masing sebesar 77,73 persen dan 76,81 persen dari total populasi.

"Dalam kaitan ini, Presiden mengharapkan APEC dapat berkontribusi untuk menutup ketimpangan vaksinasi global, termasuk melalui berbagi dosis lewat COVAX Facility," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, usai mendampingi Presiden dalam



pertemuan tersebut.

Kepala Negara mengingatkan bahwa pertimbangan epidemiologis harus selalu menjadi dasar utama dan bukan pertimbangan pengaruh politik, termasuk dalam isu vaksin ini. Presiden juga menyampaikan bahwa APEC harus mendorong peningkatan produksi vaksin global.

"Terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu diversifikasi produksi vaksin ke negara berkembang, eliminasi hambatan perdagangan terkait bahan baku vaksin, kemudian dukungan terhadap TRIPS waiver untuk mengatasi pandemi, dan alih teknologi vaksin terkini," ujar Menlu Retno.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemulihan ekonomi mustahil dilakukan bila pandemi belum berakhir. Untuk itu, pemulihan kesehatan harus didahulukan sehingga perang melawan COVID-19 bisa segera dimenangkan.

Dalam konteks nasional, Presiden Jokowi menjelaskan mengenai kebijakan utama yang diambil oleh pemer-

intah Indonesia saat ini, antara lain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di seluruh Jawa dan Bali, serta kota-kota yang mengalami lonjakan kasus.

Presiden Jokowi menyampaikan pula upaya penguatan layanan kesehatan, termasuk membangun rumah sakit darurat, upaya mencukupi kebutuhan oksigen dan obat-obatan, serta percepatan vaksinasi nasional.

"Di dalam konteks vaksin, Presiden menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih 55 juta dosis vaksin telah disuntikkan di Indonesia dan akan terus diakselerasi vaksinasi di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia telah menerima 142.973.880 dosis vaksin baik dalam bentuk curah maupun dalam bentuk vaksin jadi," ungkap Menlu.

Presiden Jokowi mengakhiri pidatonya dengan menyampaikan bahwa tantangan dunia ke depan masih berat dan harus diatasi bersama. "Hanya dengan solidaritas dan kerja sama dunia akan mampu keluar dari pandemi dan mampu bangkit bersama," kata Menlu Retno mengakhiri pernyataan-

ya.

Alhasil, usai pertemuan berakhir, para pemimpin negara-negara APEC mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendorong transfer sukarela teknologi produksi vaksin "dengan persyaratan yang disepakati bersama" ketika kawasan itu bersiap untuk guncangan kesehatan di masa depan. "Pandemi terus berdampak buruk pada masyarakat dan ekonomi di kawasan kami," kata para pemimpin dalam pernyataan bersama setelah pertemuan virtual yang dipimpin oleh Selandia Baru.

"Kedaruratan kesehatan ini hanya akan kita atasi dengan mempercepat pemerataan akses terhadap vaksin Covid-19 yang aman, efektif, terjangkau harganya," kata pernyataan bersama yang dibacakan oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Majestic Center Wellington.

Ardern berbicara dalam acara bertajuk APEC Informal Leaders' Retreats sebagai tuan rumah karena menjadi

## • INFO ISTANA

Ketua APEC 2021 ini menjelang pertemuan formal pada November 2021 mendatang. Pertemuan informal ini baru pertama kali terjadi dalam perjalanan APEC. "Diskusi kami menggerakkan kita melampaui nasionalisme vaksin. Sekarang kita berfokus pada semua aspek kontribusi pada upaya vaksinasi global - membuat vaksin, berbagi vaksin, dan menggunakan vaksin," kata wanita PM itu setelah pertemuan.

Dia mengatakan para pemimpin sepakat wabah Covid-19 kali ini tidak akan menjadi pandemi terakhir di dunia dan bahwa kesiapsiagaan sangat penting. Tak kalah penting, kali ini pertemuan menyoroti pula kekhawatiran yang berkembang seputar Covid-19,

rah yang afirmatif, berbasis nilai, dan transparan. Biden juga mengartikulasikan pendekatan AS untuk mengakhiri pandemi dan menguraikan strategi vaksin global kami, saat AS menyumbangkan lebih dari setengah miliar vaksin yang aman dan efektif ke lebih dari 100 negara yang membutuhkan di seluruh dunia, beberapa di antaranya adalah negara-negara APEC.

"Amerika Serikat menyumbangkan vaksin, bukan menjualnya, dan menekankan pentingnya tidak melampirkan kondisi politik atau ekonomi apa pun pada penyediaan vaksin. Tujuan tunggal kami tetap menyelamatkan nyawa," ungkap pernyataan resmi itu.

Presiden Biden juga membahas

ekonomi APEC yang membutuhkan dukungan.

Nah, dalam kesempatan itu Presiden Tiongkok Xi Jinping mengemukakan negerinya telah memberikan lebih dari 500 juta dosis vaksin ke negara-negara berkembang lainnya, dan akan memberikan bantuan lagi senilai tiga miliar dolar AS selama tiga tahun ke depan untuk mendukung respons COVID-19 serta pemulihan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang lainnya.

Presiden Xi juga mengungkapkan Tiongkok telah mendanai pendirian Sub-Dana Kerjasama APEC untuk Memerangi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, yang akan membantu ekonomi APEC memenangi upaya awal mengatasi Covid-19 dan mencapai pemulihan ekonomi. Tiongkok, kata Xi, mendukung pengabaian hak kekayaan intelektual pada vaksin Covid-19, dan akan bekerja dengan pihak lain untuk mendorong keputusan awal oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan lembaga internasional lainnya.

Dia menegaskan, Tiongkok akan mengambil bagian aktif dalam inisiatif kerja sama untuk menjaga rantai pasokan vaksin stabil dan aman, dan mendukung pergerakan barang-barang penting. Dia menekankan bahwa ekonomi digital global adalah entitas yang terbuka dan erat. "Kerja sama win-win adalah satu-satunya jalan ke depan. Sementara kebijakan pintu tertutup, pengucilan, konfrontasi, dan perpecahan hanya akan mengarah pada jalan buntu," kata Xi.

"Kita perlu memastikan implementasi penuh dan seimbang dari Peta Jalan Internet dan Ekonomi Digital APEC, mengembangkan lebih lanjut infrastruktur digital, memfasilitasi penyebaran dan penerapan teknologi baru, dan bekerja untuk lingkungan bisnis digital yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif," tandasnya.

Ada perbedaan tekanan dan selipan pesan dalam pidato para pemimpin negara APEC kali ini. Terutama dari Biden dan Xi Jinping. Apapun, kesepakatan bersama yang dibacakan Ardern semoga saja melegakan bagi semua negara-negara sekawasan. Lebih penting lagi, dapat terlaksana segera. ●



yang berkecamuk di kawasan itu ketika negara-negara termasuk Indonesia, Thailand, dan Australia menghadapi gelombang infeksi baru.

Sedangkan Presiden AS Joe Biden dalam pernyataan resminya menyambut baik kesempatan untuk terlibat langsung dengan para Pemimpin APEC. Dia menggarisbawahi pentingnya Amerika Serikat menempatkan di kawasan itu, mencatat bahwa kita adalah negara Pasifik dan bersumpah bahwa Amerika Serikat akan tetap terlibat secara mendalam di kawasan itu untuk generasi yang akan datang.

Presiden Biden menekankan pentingnya kerja sama multilateral dan menegaskan kembali komitmennya terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ia mengedepankan visi dae-

pentingnya berinvestasi dalam keamanan dan kesiapsiagaan kesehatan global yang lebih baik sehingga kita siap saat menghadapi pandemi berikutnya. Mengenai pemulihan ekonomi global, Presiden Biden menegaskan kembali minat AS untuk menjadi mitra yang kuat dan andal bagi ekonomi APEC saat mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dia membahas cara-cara untuk meleluaskan kekuatan ekonomi kawasan dan untuk memperdalam keterlibatan ekonomi AS di seluruh Indo-Pasifik, termasuk melalui kemitraan Build Back Better World yang baru-baru ini diumumkan. Kemitraan ini akan menyediakan infrastruktur berstandar tinggi, selaras dengan perubahan iklim, dan dibiayai secara transparan untuk



# SEPAKAT DI TENGAH KETEGANGAN AS-TIONGKOK

Si politik, tepatnya perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tak terelakan dalam pertemuan informal para pemimpin APEC kali ini. Terlepas dari kesepakatan bersama yang dibacakan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, memang ada ketegangan di antara anggota APEC, terutama antara Barat dan China - terkait berbagai masalah mulai dari asal usul virus corona hingga perdagangan, Xinjiang, Hong Kong, dan Laut China Selatan.

Seiring pertemuan berakhir, Washington mengumumkan sanksi terhadap tujuh orang China atas tindakan keras Beijing terhadap demokrasi di Hong Kong. Ini merupakan upaya terbaru AS untuk meminta pertanggungjawaban Beijing atas apa yang disebutnya erosi aturan hukum di bekas jajahan Inggris itu.

AS dan China memiliki hubungan yang bermasalah dan keduanya jarang kontak tatap muka tingkat tinggi di bawah pemerintahan Biden sejak pertemuan antara pejabat senior di Alaska, saat pihak China menyatakan kemarahannya atas sanksi AS yang diumumkan tepat sebelum pembic-

araan pada Maret 2021 lalu.

Dalam pertemuan informal APEC, pidato kedua pemimpin, baik Biden maupun Xi pun tampak saling menyindir. Antara lain soal jual-beli vaksin dan hak kekayaan intelektual atas vaksin. Malah Biden lebih menohok ketika berbicara tentang Indo Pasifik.

Sebuah sumber diplomatik yang mengetahui acara informal APEC mengatakan bahwa Presiden Xi menyampaikan pidato video yang direkam sebelumnya pada pertemuan tersebut dan tidak hadir langsung sehingga tak segera berkomentar soal pernyataan Biden maupun sanksi terbaru AS itu.

Pengelompokan APEC yang mencakup 21 negara sebenarnya mencakup tiga ekonomi terbesar di dunia dan negara-negara miskin seperti Papua Nugini, serta anggota pada titik yang sangat berbeda dalam siklus Covid-19, memberikan tantangan lebih lanjut untuk membangun konsensus. Model konsensus APEC telah menghadapi ujian dalam beberapa tahun terakhir.

Pernah terjadi APEC tidak dapat menyepakati komunikasi bersama dalam pertemuan tahunan pada 2018 di Papua Nugini. Perbedaan antara Chi-

na dan Presiden AS saat itu Donald Trump pemicunya. Sedangkan Pertemuan APEC 2019 di Chile dibatalkan karena protes sementara yang di Malaysia tahun lalu teralihkan karena para pemimpin secara tergesa menyelenggarakan pertemuan virtual ketika pandemi melanda dunia.

Pada Juni 2021 lalu, para menteri perdagangan APEC setuju untuk meninjau hambatan perdagangan dan mempercepat transit lintas batas vaksin Covid-19 dan barang-barang terkait, tetapi tidak memenuhi komitmen luas untuk menghapus tarif yang didorong oleh Selandia Baru. Sementara, tercatat lebih dari 50 juta kasus Covid-19 dalam wilayah APEC dengan lebih dari satu juta kematian.

Sebagai dampak Covid-19, produk domestik bruto seluruh APEC turun 1,9 persen tahun lalu, penurunan terbesar sejak Perang Dunia II. Sementara pertumbuhan ekonomi mulai pulih, sekitar 81 juta pekerjaan telah hilang karena pandemi.

Kini kesepakatan bersama telah tercapai lagi soal vaksin. Bagaimana implementasinya, bayang-bayang ketegangan AS-Tiongkok tetap menyertainya.

● (Reuters dan berbagai sumber)



## Desain Mobil Formula 1 Terbaru

# BALAPAN SEMAKIN KETAT, PEBALAP LEBIH AMAN, SEMAKIN RAMAH LINGKUNGAN

Formula 1 memamerkan desain mobil balap baru untuk musim 2022, di Sirkuit Silverstone, Inggris, Kamis 15 Juli 2021. Terjadi sejumlah revolusi besar dalam perombakan baru ini, untuk mendukung regulasi tahun depan.

**R**egulasi musim 2022, seharusnya diterapkan 2021 tapi tertunda karena pandemi COVID-19. Bertujuan menciptakan balapan yang lebih ketat dengan lebih banyak kesempatan menyalip.

Salah satu hal yang menjadi penghambat bagi para pebalap untuk bertarung ketat saat ini, adalah "udara kotor" yang ditimbulkan oleh mobil rival yang ada di depan.

Mobil F1 generasi sekarang kehilangan 35 persen downforce mereka ketika melaju dengan jarak tiga mobil, kurang lebih 20 meter di belakang mobil lain. Sementara apabila mereka mendekat dengan jarak satu mobil mereka kehilangan 47 persen.

Mobil F1 yang baru juga mencoba menekan angka tersebut dengan fokus ke penerapan "ground effect" yang mampu mengurangi hi-

langan 35 persen downforce mereka ketika melaju dengan jarak tiga mobil, kurang lebih 20 meter di belakang mobil lain. Sementara apabila mereka mendekat dengan jarak satu mobil mereka kehilangan 47 persen.

Salah satu desain pembeda mobil 2022 adalah pemakaian winglet di atas ban depan dan penggunaan wheel cover, yang terakhir kali terlihat di ban mobil tahun 2009.

Kendati menyalurkan udara melalui ban bisa meningkatkan downforce, tetapi aliran udara tersebut akan mengganggu mobil lain sehingga wheel cover digunakan untuk mencegahnya.

Sedangkan winglet membantu mengendalikan udara, yang datang dari ban depan, dan mengarahkannya menjauh dari sayap belakang.

Bentuk sayap juga benar-benar

baru, meskipun desainnya cukup sederhana. Namun, tugas sayap depan yang baru bertugas menciptakan downforce yang konsisten saat mobil melaju di belakang mobil lain, dan memastikan aliran udara ban depan terkendali dan diarahkan ke sisi bawah mobil. Cara tersebut tak terlalu disruptif ketimbang membuang udara ke sisi samping atau "outwash".

Pada akhir 1970-an "ground effect" sangat menonjol saat desain mobil mengambil filosofi sayap pesawat yang terbalik. Sehingga menciptakan downforce yang sangat besar ketika dibawa melaju ke trek.

Ground effect penuh dilarang pada akhir 1982, namun akan diterapkan kembali



tahun depan. Alasannya lantai mobil F1 dipahat untuk membuat terowongan atau kanal, demi menghasilkan downforce yang besar.

Downforce dari bawah lantai mobil, akan terjaga lebih baik lewat terowongan-terowongan tersebut. Tanpa bergantung dengan barge board dan pernak-pernik aerodinamika seperti yang digunakan mobil generasi sekarang yang bertugas mengalirkan pusaran udara ke bawah mobil.

Sayap belakang mobil generasi saat ini mengalirkan udara ke atas dan juga ke sisi luar sehingga menyebabkan "udara kotor" bagi mobil yang di belakang.

Namun di desain baru nanti menciptakan aliran udara rotasi yang mengumpulkan aliran udara dari ban belakang, dan menggulungnya melewati diffuser. Sehingga menciptakan udara yang lebih bersih bagi mobil yang melaju di belakang.

Selain bodi mobil dan fungsinya, salah satu perubahan paling menonjol adalah penggunaan ban 18 inci. Pirelli selaku pabrikan ban yang ditunjuk F1 menjelaskan, penggunaan ban 18 inci



demi mengurangi tingkat pemanasan ban ketika slide, yang dapat membantu menciptakan balapan ketat.

Profil karet ban yang lebih tipis juga mengurangi perubahan defleksi sisi luar ban, dan dampak aerodinamika yang ditimbulkan.

"Tim telah bekerja keras melakukan simulasi aliran udara di sekitar ban dan dampaknya terhadap badan mobil. Mengurangi sensitivitas di wilayah itu akan membantu proses perancangan mobil dan sumber daya yang dibutuhkan," tulis laman resmi F1.

Namun, dari sisi

mesin mobil F1 2022, akan tetap menggunakan power unit hybrid turbo 1,6 liter v6 generasi saat ini. Dikarenakan mesin tersebut terkenal cukup efisien. Komponen yang lebih standar akan dipasang di sistem bahan bakar, juga sensor tambahan untuk memonitor power unit.

Sementara itu dari sisi balapan, F1 saat ini menggunakan bahan bakar yang mengandung 5,75 persen komponen bio. Nah, pada musim depan, rasio penggunaan bahan bakar berkelanjutan tersebut akan ditingkatkan menjadi 10 persen, lewat bahan bakar E10, yang merupakan





kependekan dari Etanol dan 10 persen. FIA berharap penggunaan etanol itu mampu menekan jejak karbon hingga nyaris nol.

Meski dapat memberikan balapan lebih ketat, dan persaingan yang sengit, keamanan pebalap menjadi kunci dari mobil baru ini. Pasalnya, sasis mobil generasi baru harus mampu menyerap 48 persen dan 15 persen energi dari tumbukan depan dan belakang.

Belajar dari pengalaman sejumlah kecelakaan besar termasuk insiden Romain Grosjean di Grand Prix Bahrain

2020, mobil sekarang didesain sedemikian rupa sehingga apabila terlibat kecelakaan power unitnya akan terpisah dari sasis tanpa mengekspos tangki bahan bakar.

Menyusul kecelakaan fatal yang menewaskan pebalap Formula 2 Anthoine Hubert di Spa, desain hidung yang lebih panjang akan membantu meredam energi benturan dipadu dengan sasis yang lebih kuat untuk menahan insiden T-bone, ketika sisi depan suatu mobil menabrak sisi samping mobil lainnya. Berat minimal mobil juga

“

Salah satu desain pembeda mobil 2022 adalah pemakaian winglet di atas ban depan dan penggunaan wheel cover, yang terakhir kali terlihat di ban mobil tahun 2009.



dinaikkan 5 persen, dari 752 kilogram menjadi 790 kilogram.

Mobil 2022 ini dikembangkan di terowongan angin milik Sauber di Swiss, dengan 138 konfigurasi dasar yang diuji coba selama dua tahun. Dengan kurang lebih sesi 100 jam di terowongan angin. Sehingga keamanan menjadi kunci utama Formula 1, demi kehatsyatan menonton jet darat. ●

# Gubernur Untuk Negeri



untuk memilih klik [www.infoindonesia.id](http://www.infoindonesia.id)

Polling Gubernur Untuk Negeri memasuki tahap final  
Mulai sekarang, kami menampilkan nama-nama yang berhasil  
menduduki 10 besar pada hasil polling kedua.



**Anies Baswedan**  
Gubernur DKI Jakarta



**Herman Deru**  
Gubernur Sumatera Selatan



**Ridwan Kamil**  
Gubernur Jawa Barat



**Ganjar Pranowo**  
Gubernur Jawa Tengah



**Wahidin Halim**  
Gubernur Banten



**Zulkieflimansyah**  
Gubernur Nusa Tenggara Barat



**Isran Noor**  
Gubernur Kalimantan Timur



**Sri Sultan Hamengkubuwana X**  
Gubernur D.I. Yogyakarta



**Erzaldi Rosman Djohan**  
Gubernur Kepulauan Babel



**Sutarmidji**  
Gubernur Kalimantan Barat



Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Tokyo 2021 di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/7/2021).

## 28 Atlet Menuju Olimpiade Tokyo

# BERIKAN YANG TERBAIK UNTUK BANGSA

Pesta olahraga terbesar akhirnya datang juga. Kali ini tuan rumahnya, kota megapolitan di Negeri Sakura, Tokyo. Sebanyak 28 atlet dari Indonesia akan bersaing memperebutkan medali sebagai yang terbaik. Berharap Merah-Putih berkibar di langit Jepang pada 23 Juli-8 Agustus mendatang.

**P**residen Jokowi juga secara resmi juga telah melepas kontingen Indonesia yang terdiri atas 28 atlet dan 17 ofisial ke Olimpiade Tokyo 2021. Kontingen dipimpin Chef de Mission (Ketua Kontingen) Rosan Roeslani.

Indonesia akan bertanding di delapan cabang olahraga yakni atletik, panahan, rowing, menembak, bulu tangkis, angkat besi, renang dan selancar.

Presiden mengatakan sudah meng-

etahui bahwa para atlet telah berlatih keras untuk mencapai prestasi di Olimpiade Tokyo. Serta dinilai telah siap bertanding secara sportif, dan memiliki potensi untuk meraih medali juara.

"Dan saya yakin perjuangan saudara-saudara akan membuahkan hasil," kata Presiden Jokowi dalam upacara pelepasan kontingen Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, (8/7/2021).

Presiden berpesan agar seluruh kontingen Indonesia terus menjaga

kesehatan, stamina, dan motivasi. Para atlet juga harus fokus untuk meraih prestasi di ajang olahraga multi-cabang paling bergengsi di dunia itu.

"Rakyat menaruh harapan besar kepada saudara-saudara dan prestasi saudara akan menjadi prestasi negara kita Indonesia," kata Jokowi.

Memang tidak ada target khusus pada perhelatan Olimpiade kali ini. Namun, Presiden Joko Widodo tetap menyiapkan bonus untuk atlet yang

meraih medali, sebagai motivasi tambahan.

Melalui, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan bahwa bonus yang bakal diraih atlet peraih medali di Olimpiade Tokyo 2021 tidak berubah dari bonus di Olimpiade Rio 2016.

Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, menyatakan, atlet peraih medali emas di Olimpiade Tokyo akan mendapatkan bonus Rp5 miliar. Gatot juga memastikan bonus yang diterima para atlet nantinya tidak akan dipotong pajak seperti yang telah diterapkan di 2016.

"Bonus masih sama (dengan Olimpiade 2016). Tidak ada perubahan kebijakan. Emas Rp5 miliar, perak Rp2 miliar dan perunggu Rp1 miliar," kata Gatot, Kamis (8/7/2021).

Gatot menyebut tidak ada perubahan nominal bonus bukan lantaran kondisi pandemi COVID-19. Nilai bonus tersebut masih dianggap angka yang relevan diterima para atlet yang mendapatkan medali di Olimpiade.

Gatot mengatakan pertimbangan tidak berubahnya jumlah bonus peraih medali di Olimpiade Tokyo karena pada 2016, Indonesia menjadi negara tertinggi kedua dalam bonus yang diberikan kepada atlet. Indonesia hanya kalah dari Singapura yang menempati puncak daftar negara pemberi bonus di Olimpiade 2016 lewat Rp9,75 miliar per medali emas.

"Karena pada saat itu angka Rp5 miliar itu sudah tertinggi nomor dua setelah Singapura dan jumlah itu diakui negara lain cukup besar. Kami tidak ingin jor-joran, bukan karena faktor pandemi. Angka Rp5 miliar menurut kami masih relevan untuk diterima atlet saat ini," ucap Gatot.

Menpora, Zainudin Amali berharap atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo tidak menjadikan bonus sebagai motivasi utama untuk meraih prestasi. "Namun berjuang atas nama bangsa dan negara," ucap Zainudin.

Dia mengatakan atlet yang akan berlaga di Olimpiade Tokyo merupakan orang-orang terpilih yang pantas mewakili 260 juta lebih rakyat Indonesia. Ia berpesan kepada para atlet untuk tidak menyalahgunakan kesempatan

itu dengan memberikan penampilan semaksimal mungkin di Tokyo.

"Anggaphlah ini Olimpiade terakhir yang Anda ikuti. Anda jangan berpikir kalau gagal di Olimpiade kali ini, Anda masih mempunyai kesempatan empat tahun ke depan. Hilangkan pikiran itu dan tanamkan dalam pikiran Anda bahwa ini adalah yang terakhir," tuturnya.

### Tulang Punggung Emas

Dari delapan cabang yang diikuti kontingen Indonesia, tentu bulu tangkis menjadi andalan untuk mendulang medali. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Main-

membuat kejutan. Gregoria saya harap bisa menyumbang medali. Itu cita-cita kami," sambungnya.

Tim bulu tangkis Indonesia mengirimkan 11 atlet pada Olimpiade. Selain itu, lima pelatih juga bakal mendampingi para pemain. Kontingen badminton juga memboyong sembilan orang tim pendukung yang terdiri dari manajer tim, atlet sparing, pelatih fisik, dokter, fisioterapis, dan masseur ke Jepang.

Sementara, untuk medali emas dipastikan diharapkan digenggam dari nomor ganda putra. Pasalnya, tim Merah-Putih langsung memasukkan dua pasang. Yakni Marcus/Kevin dan



Pasangan ganda putra nomor satu dunia, Marcus/Kevin.

aky, mengakui bulu tangkis menjadi tumpuan Indonesia untuk membawa pulang medali emas, sekaligus mempertahankan tradisi medali emas Indonesia di ajang Olimpiade.

"Beban kami memang berat, tapi mudah-mudahan kami bisa mempertahankan tradisi emas Olimpiade untuk Indonesia. Ganda putra dan ganda campuran yang kami targetkan semoga mereka bisa maksimal," kata Rionny, Selasa (6/7/2021).

"Untuk tunggal putra dan ganda putri juga saya rasa mereka berpeluang mendapat medali dan sebisa mungkin harus dapat medali. Dan tunggal putri yang saya pegang sendiri, bisa

Hendra/Ahsan.

Ganda putra bulu tangkis Tanah Air, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, mengaku sadar akan tantangan berat dalam persaingan grup D Olimpiade Tokyo. Sehingga, mereka siap jika harus bekerja lebih keras agar bisa lolos ke babak selanjutnya.

Menjadi unggulan kedua, Hendra/Ahsan satu grup bersama andalan Malaysia Aaron Chia/Soh Woi Yik, Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae dari Korea Selatan, dan Jason Anthony Ho-Shue/Nyl Yakura dari Kanada.

"Setelah melihat undian, saya rasa memang cukup berat ya. Tetapi masih ada kesempatan," ucap Ahsan melalui

## • INFO SPORT

keterangan tertulis PBSI di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Ia menilai semua pasangan di grup D punya peluang untuk lolos dari fase penyisihan grup. Sehingga, kesiapan fisik dan mental akan menjadi penentu di lapangan.

Berkaca dari Olimpiade Rio de Janeiro 2016 saat The Daddies tidak lolos fase grup, kali ini mereka akan fokus dengan mengejar setiap poin dan bermain lebih berani.

"Kami mau lebih fokus, main dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Main lebih berani dan lebih yakin lagi," ujar Hendra.

Pasang berjudul The Minions, alias Marcus/Kevin telah siap 100 persen demi meraih medali pertamanya di Ol-

lama tidak bertanding tetap terus optimistis. Pasalnya, selama proses persiapan di pelatnas yang cukup lama, menjadi bekal utama menuju Tokyo.

"Ya harus siap. Ada pertandingan sebelumnya atau tidak sama saja lah. Kami juga di sini latihan sudah seperti pertandingan. Lawannya seimbang dan bagus-bagus, kelasnya top level dunia," kata Marcus.

Sementara, Pasangan ganda putri tim bulu tangkis Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu bakal menghadapi lawan-lawan tangguh pada babak penyisihan Olimpiade Tokyo 2021.

Ganda putri terbaik Tanah Air itu akan berlaga di Grup A. Grup ini berisi wakil tuan rumah Yuki Fukushima/Say-

gan sampai sakit atau cedera. Untuk non-teknis bahkan sudah siap 100 persen, mereka sangat menikmati setiap program latihan yang diberikan," ungkapnya.

Pasangan Greysia/Apriyani sendiri menjadi satu-satunya wakil ganda putri Indonesia yang tampil di Olimpiade Tokyo 2021. Pasangan senior-junior itu diharapkan bisa membuat kejutan dan meraih medali pertama untuk nomor ganda putri Indonesia.

Sejak bulu tangkis mulai dipertandingkan di Olimpiade Barcelona 1992, hanya sektor ganda putri Indonesia saja yang belum pernah membawa pulang medali.

### **Panahan Bidik Asa**

Asa mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo juga diserukan oleh cabang panahan. Optimisme itu muncul setelah skor selama latihan masuk ke dalam poin medali di Olimpiade Tokyo.

Panahan Indonesia akan tampil di empat nomor perlombaan Olimpiade. Riau Ega Salsabila, Arif Dwi Pangestu, dan Bagas Prastyadi akan tampil di nomor recurve perorangan dan beregu putra serta campuran. Sedangkan, Diananda Chairunisa di recurve perorangan putri dan beregu campuran.

Menurut Sekretaris Jenderal Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), Iksan Ingratubun, dengan akurasi tersebut, pihaknya optimistis panahan Indonesia akan meraih minimal satu medali emas dan satu medali perak.

"Target kami semua, termasuk atlet, target kami emas. Apapun yang terjadi kami ingin medali emas. Target emas kami adalah beregu putra satu, lantas beregu campuran bisa dapet perak atau perunggu kami sudah bersyukur banget," ujar Iksan.

Berdasarkan hasil rekaman pelatnas di Lapangan Panahan Gelora Bung Karno, Senayan, poin yang diciptakan mencapai 666. Poin ini berdasarkan total anak panah yang ditembakkan ke target dalam sekali latihan.

"Sekarang sudah di 666. Standar itu 634. Latihan sudah 666 untuk dua atlet, Bagas Prastyahadi dan Arif Dwi Pangestu. Itu angka terakhir mereka. Riau Ega tetap di 654 dan 660. Sudah di angka-



**Penembak satu-satunya dari Indonesia, Vidya Rafika.**

impiade. Namun, ganda putra nomor satu dunia ini tak mau sesumbar, karena menurut mereka peta kekuatannya cukup merata.

"Peta kekuatan sekarang kami tidak tahu, sudah lama tidak ada pertandingan, terus kami tidak tahu lawan berkembang seperti apa. Jadi sebenarnya semua 50:50, sama-sama tidak tahu kekuatan masing-masing," tutur Kevin Sanjaya melalui rilis resmi PBSI di Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Menurut Kevin, prediksi yang pasti ialah kekuatan lawan akan merata dan tidak mudah dilalui. Olimpiade yang merupakan ajang paling bergengsi punya beban tersendiri bagi setiap atlet yang ikut serta di dalamnya.

Sementara, Marcus yang sudah

aka Hirota yang merupakan unggulan pertama. Kemudian, Chloe Birch/Lauren Smith dari Inggris, dan wakil Malaysia Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean.

Pelatih pasangan Greysia Polii/Apriyani, Eng Hian, meminta keduanya agar tidak lengah, dalam menjalani pertandingan fase penyisihan grup A Olimpiade Tokyo yang diprediksi akan berlangsung secara ketat.

Meski begitu, pelatih yang akrab disapa Koh Didi itu, masih punya keyakinan kuat Greysia/Apriyani bisa lolos minimal hingga perempat final.

Didi juga mengaku bahwa persiapan Greysia/Apriyani sudah mencapai 99 persen menjelang pertandingan perdana pekan depan.

"Yang kami jaga saat ini adalah jan-

angka yang insya Allah bisa medali di Olimpiade Tokyo,” ucap Iksan.

Melihat hasil latihan itu, Iksan berargumen target meraih satu medali emas dan perak atau perunggu di Olimpiade Tokyo sangat realistis. Pencapaian tim beregu putra Indonesia saat tampil dalam 2021 Archery Final Olympic Qualification Tournament di Paris, jadi acuan.

“Kan Anda sudah bisa melihat saat mereka bertanding di Paris. Itu kan 68 negara. Banyak orang mencibir dan menganggap remeh Indonesia, tapi dengan angka-angka latihan itu sudah angka medali. Makanya tidak heran, pas di Paris kemarin tiga-tiganya dapat nilai 10. Itu sudah biasa terjadi. Jadi bukan target muluk-muluk. Insya Allah bisa kita raih,” katanya.

### Renang Lebih Realistis

Sementara itu, dua perenang yang akan tampil di Olimpiade Tokyo, Aflah Fadlan Prawira dan Azzahra Permatihani ditarget memecahkan rekor nasional. Di Olimpiade, Fadlan akan tampil di nomor 400 meter dan 1.500 meter gaya bebas putra. Sedangkan, Zahra di nomor 400 meter gaya ganti perorangan putri.

Saat ini, rekor renang nasional untuk nomor 400 meter gaya bebas putra dipegang Fadlan dengan waktu 3 menit 52,16 detik. Catatan tersebut ia raih saat tampil di 50th Singapore National Age Group Swimming Championship 2019, sekaligus memecahkan rekornya sendiri di Asian Games 2018 dengan 3 menit 53,01 detik.

Untuk rekor nasional nomor 1.500 meter gaya bebas putra juga masih dipegang Fadlan, yakni dengan 15 menit 15,77 detik. Torehan waktu tersebut tercipta di SEA Games 2019 dan melampaui rekornya sendiri, yakni 15 menit 24,59 detik.

Sementara itu, rekor 400 meter gaya ganti perorangan putri saat ini dipegang Zahra dengan catatan waktu 4 menit 48,51 detik. Adapun rekor nasional sebelumnya juga diciptakan Zahra dengan waktu 4 menit 50,39 detik di SEA Games 2017.

Dengan segala keterbatasan dan kendala menuju Olimpiade Tokyo, PRSI yakin Fadlan dan Zahra tetap tampil optimal. Keduanya tak dibeban-

kan meraih medali, meski tetap berharap kerja keras selama pelatnas bisa menghasilkan prestasi.

Sekretaris Jenderal Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), Wisnu Wardhana, mengatakan, persiapan Fadlan dan Zahra berjalan dengan baik.

“Target PRSI untuk dua atlet yang akan tampil di Olimpiade Tokyo 2020 adalah memperbaiki prestasi dan rekor nasional. Persiapan lancar. Khusus pelatnas olimpiade masih bisa latihan di GBK,” ucap Wisnu.

Wisnu optimistis Fadlan dan Zahra bisa melampaui rekornya sendiri. Jika merujuk hasil Indonesia Olympic Trial (IOT) di Senayan pada Juni lalu, Fadlan dan Zahra berpeluang memecahkan

Perbakin hanya berharap dara kelahiran Depok ini bisa menembus partai final nomor 50 meter rifle three positions putri dan 10 meter air rifle putri.

“Targetnya dia itu masuk final, karena dia masih muda banget. Baru 20 tahun. Target saya sih, 2024 di Olimpiade Perancis. Kalau di Jepang ini dia masuk final. Kesempatan dapet medali sangat besar. Tinggal nasib saja,” ucap Sekjen Perbakin, Firtian Yudit Swandarta.

Dalam perjalanan Vidya menuju Olimpiade, Perbakin menajamkan aspek sport intelligence sebagai bagian dari persiapan.

“Dalam olahraga itu ada sport diplomacy dan sport intelligence. Ini harus kita lakukan kalau mau menang. Nah,



**Tim panahan putra Indonesia Riau Ega Agatha Salsabila, Arif Dwi Pangestu, dan Alviyanto Bagas Prastyadi.**

rekor nasional, walau masih sulit menembus jajaran elite dunia.

Untuk kategori 400 meter putra, rekor Olimpiade adalah 3 menit 40,14 detik, sedangkan rekor dunia adalah 3 menit 40,07 detik. Rekor Olimpiade dan dunia untuk 1.500 meter gaya bebas putra dipegang Sun Yang dengan 14 menit 31,02 detik.

### Minimal Babak Final

Di cabang olahraga menembak, satu-satunya atlet Indonesia yang akan tampil di Olimpiade Tokyo adalah Vidya Rafika yang diberi target masuk final. Persatuan Olahraga Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) mengakui Vidya tak dipatok medali.

sport intelligence ini harus kita lakukan. Siapa sih musuh kita sebenarnya, kekuatannya sejauh mana,” kata Firtian.

“Analisis skuad lawan harus ada. Strength atau kekuatan mereka seperti apa, weakness-nya bagaimana, opportunity kita terhadap strength dan weakness kita apa. Ancamannya apa. Itu harus kita hitung. Kalau tidak, ibarat mau berantem tidak tahu kekuatan, ya habis kita,” sambungnya.

Dalam praktiknya, Vidya berlatih dengan kendali sport science yang telah dirancang Perbakin bersama pelatih. Sport science ini dikembangkan berdasarkan informasi yang didapat dari kekuatan para lawan. Perbakin mengolah data lawan secara ilmiah. •



# MUNDUR-MAJU DANA HIBAH PARIWISATA 2021

Bukan hanya mundur-maju dari sisi waktu, melainkan juga jumlahnya dan validitas penerimanya. Begitulah soal dana hibah pariwisata 2021.

**Y**ang mengamati dengan seksama soal dana hibah pariwisata untuk tahun ini mafhum belaka mundur-maju realisasinya. Sempat terkonfirmasi akan terealisasi pada kuartal ketiga (Juli-September) 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Sala-

huudin Uno malah mengemukakan waktu yang lebih cepat dari dugaan semula.

Pada akhir Juni 2021 yang belum lama berlalu, Sandi mengemukakan dana hibah pariwisata tahun 2021 diharapkan dapat didistribusikan dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.

Katakanlah semester III 2021.

"Sampai saat ini dana hibah pariwisata tahun 2021 yang berjumlah Rp 3,7 triliun masih dalam proses finalisasi. Semoga dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan dana hibah ini dapat segera kita distribusikan ke para pelaku pariwisata dan



ekonomi kreatif yang terdampak oleh pandemi Covid-19," kata Sandi dalam keterangan resmi pada Senin, 28 Juni 2021.

Namun perkembangan terakhir, dana itu akan cair lebih cepat, Juli 2021. Sandiaga mengatakan, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan keberpihakan pemerintah selama PPKM Darurat berlangsung.

"Ini kami hadirkan melalui program dana hibah pariwisata, bantuan insentif dan bantuan sosial, serta mempercepat pelaksanaan program vaksinasi agar tercipta herd immunity di masyarakat," ujar Sandiaga melalui akun twitter @sandiuono seperti dikutip Kamis, 8 Juli 2021.

"Bantuan Sosial ini arahan dari Pak Presiden, bahwa dalam minggu ini harus segera direalisasikan dan tentunya segera ditransfer melalui rekening yang telah disiapkan dan ini merupakan perluasan dari bansos yang telah dijalankan," sambungnya.

Seiring dengan itu, pada Jumat, 16 Juli 2021, Presiden Joko Widodo

(Jokowi) kembali menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat secepatnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat," ujar Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM Darurat, melalui konferensi video, dari Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Jokowi Kepala Negara meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat. Untuk itu, Presiden mem-

inta keduanya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyalurannya.

"Saya minta KaBulog dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP," ujarnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak 15 Juli 2021 lalu. Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar virus korona dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman). "Termasuk dalam hal ini, pemberian obat-obatan gratis. Obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat, ini sangat diapresiasi," ujarnya.

Namun, Presiden menilai 600 ribu paket obat-obatan, yang disalurkan 300 ribu dalam dua tahap, masih dirasa kurang. Untuk itu, Presiden me-

## • INFO WISATA

minta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran guna meningkatkan jumlah ketersediaan paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat sebanyak lebih dari dua juta paket bantuan. "Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas dua juta paket, kan nggak mahal," tandasnya.

Menteri Sandi yang portofolionya ada terkait dengan bantuan bagi pelaku pariwisata pun tanggap mengambil keputusan untuk percepatan. "Dana hibah ini sekarang bolanya sudah bergulir, rekan-rekan kementerian/lembaga sekarang sedang memproses. Harapan kami segera bisa dirampungkan. Ini kita lakukan percepatan, dan diselesaikan hingga bisa

sehingga dapat kita sentuh dengan program dana hibah pariwisata maupun bantuan sosial," ujarnya.

Selain dana hibah pariwisata, Kemenparekraf juga turut menyiapkan bantuan lainnya untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Yaitu bantuan insentif pemerintah, bantuan sosial yang akan disalurkan Kementerian Sosial, maupun bantuan likuiditas lainnya.

"Jadi, bantuan sosial sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa dalam minggu ini harus segera direalisasikan dan tentunya segera ditransfer melalui rekening yang sudah disiapkan, dan ini merupakan perluasan juga dari program bantuan sosial yang sudah dijalankan," ujar Sandiaga saat berkun-

untuk pariwisata, termasuk untuk biro perjalanan, saat ini statusnya masih berproses dalam pengajuan di program PEN 2021," tutur Sandiaga saat weekly briefing, Selasa, 27 April 2021 di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Parekraf, Jakarta Pusat.

Dana hibah yang semula hanya untuk industri hotel dan restoran pada tahun lalu, meluas ke jasa biro perjalanan. "Basis datanya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan tahun 2019, dan pajak penghasilan (PPh)/pajak pertambahan nilai (PPN) 2019 untuk usaha biro perjalanan wisata," jelas Sandiaga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong penyelamatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di masa pandemi Covid-19 dengan berbagai stimulus salah satunya dana hibah pariwisata.

Sedangkan dana yang diajukan tahun ini sebesar Rp 3,7 triliun. Angka tersebut lebih besar dibanding angka di tahun 2020 yaitu Rp 3,3 triliun. "Nantinya teman-teman di daerah akan menentukan biro perjalanan terdaftar yang akan mendapatkan dana hibah sesuai dengan pajak penghasilan yang tercatat dan ini dilakukan dengan tata kelola yang baik," kata Sandiaga.

Namun, tampaknya angka Rp3,7 triliun itu berubah lagi. Ini terungkap dalam kunjungan Sandi ke STP Bandung. "Target sementara hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan, kita akan mengutilisasi dana yang teralokasi sebesar Rp 2,4 triliun dan harapannya ini bisa tereksekusi," ungkap Sandi.

Belum jelas, apakah penurunan angka dari Rp3,7 menjadi 2,4 triliun itu terkait refocusing dan realokasi anggaran, atau terkait verifikasi dan validasi data. Sedangkan jika menghitung jumlah yang terlibat di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, jumlah tenaga kerja yang terlibat dapat mencapai 34 juta orang.

Namun, kita lihat saja realisasi anggaran dana hibah pariwisata. Yang jelas, dana itu berbentuk transfer dari pemerintah pusat ke rekening pemerintah daerah sebelum didistribusikan kepada para penerima. "Kementerian Parekraf tentu saja akan mengawalinya," kata Sandi. ●



diterima di kuartal tiga pertengahan atau akhir. Tapi dengan adanya PPKM darurat, kami mengambil keputusan untuk percepatan," ujar Sandiaga.

Sandiaga berharap proses validasi dapat rampung pada Juli 2021 setelah mekanisme verifikasi berlangsung pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk dengan sertifikasi. "Mekanismenya, verifikasinya diharapkan terealisasi segera kepada para penerima. Belajar dari tahun lalu, karena tahun lalu sampai menunggu akhir tahun yang akhirnya sekitar 30 persen tidak terealisasi," ungkap Sandi.

Menurut dia, untuk tahun ini ia ingin tak ada lagi hambatan penyaluran pada tahun ini. "Terlebih saat ini masyarakat paling membutuhkan,

jung ke Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Sabtu, 17 Juli 2021.

Menyusuri perjalanannya, wacana dana hibah pariwisata tahun ini mulai muncul usai Sandi mengikuti rapat kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa, 16 Februari 2021. "Kami membahas secara detail tentang hibah pariwisata pada 2020 dari total Rp 3,3 triliun terealisasi 70 persen atau Rp 2,26 triliun salah satu evaluasinya data yang disiapkan belum terverifikasi dan tervalidasi," ujar Sandi mengakui bahwa proses validasi dan verifikasi diakuinya masih menjadi pekerjaan rumah Kemenparekraf.

Pada April 2021 berlangsung proses pengajuan. "Perluasan dana hibah



## TENTANG DANA HIBAH PARIWISATA

Untuk menekan dampak Covid-19 dan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, pemerintah sejak tahun lalu menggelontorkan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun, yang menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dana hibah tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah serta industri, hotel, dan restoran yang hingga saat ini sangat mengalami penurunan dan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun lalu, hibah pariwisata merupakan dana tunai melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan ke pemda serta usaha sektor pariwisata di 101 daerah kabupaten/kota berdasarkan pada beberapa kriteria. Kriteria itu antara lain, ibu kota dari 34 provinsi yang berada di 10 destinasi pariwisata prioritas dan lima destinasi superprioritas. Juga daerah yang termasuk 100 calendar of event,

destinasi branding juga daerah dengan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019.

Hibah pariwisata akan dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah sebesar 70 persen untuk hotel dan restoran berdasarkan data realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) 2019 di pemerintah daerah masing-masing, serta 30 persen untuk daerah yang digunakan sebagai bagian dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19 terutama pada sektor pariwisata.

"Ada dana hibah pariwisata yang tahun lalu digelontorkan Rp3,3 triliun dan tahun ini kita tingkatkan menjadi Rp3,7 triliun sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang diperlukan dan ditingkatkan. Dana hibah ini bukan hanya menyentuh hotel dan restoran, melainkan juga menyentuh biro perjalanan wisata, pengelola destinasi, dan taman rekreasi," kata Menteri Sandi.

Ia mengatakan, dana hibah pariwisata diberikan pemerintah untuk

memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19. Menurut Sandiaga, pandemi setahun terakhir membuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berada dalam situasi memprihatinkan.

Setidaknya, ada 34 juta lapangan pekerjaan di sektor itu yang ikut terdampak. Jadi, selain menggelontorkan dana hibah pariwisata, Menparekraf mengatakan, pemerintah juga akan mendorong program-program padat karya dalam program PEN 2021 guna membuka peluang masyarakat mendapatkan mata pencaharian.

Di jajaran Kemenparekraf sendiri bergulir sejumlah program, seperti Bersih, Indah, Sehat, Aman (BISA) di destinasi wisata. Ini merupakan program revitalisasi toilet di tempat-tempat wisata, berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. "Pada intinya kita all out untuk membantu bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," tandasnya. ●



# MINAT DESA WISATA MEMICU HARU

Ribuan desa mengikuti perlombaan untuk meraih anugerah desa wisata. Entah asal daftar atau serius, ini tanda-tanda desa ingin maju. Memicu haru.

Jadi, wajar saja, Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terharu. Ribuan desa wisata mengikuti lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 kali ini yang semula diramal sepi lantaran pandemi.

"Luar biasa, hari ini saya terharu dan hampir menitikkan air mata. Di awal dari ADWI, bahwa ADWI mungkin tidak bisa mencapai target 700 desa wisata yang mendaftar," kata Sandiaga Uno dalam Bimtek dan Workshop Anugerah Desa Wisata 2021, Rabu, 14 Juli 2021.

Ternyata, dua hari sebelum pendaftaran tutup, yang sudah masuk menjadi peserta hampir 1.500 desa. "Saya mendapat informasi target diturunkan ke 350 (desa). Namun, berkat kerja sama kita semua dan tim ADWI yang

luar biasa, alhamdulillah hari ini saya dilapor 1.484 yang sudah mendaftar dan masih ada dua hari lagi, mudah-mudahan masih bisa mencapai 1.480 lebih dan kita harapkan ini merupakan betul-betul simbol kebangkitan ekonomi nasional dua kali lipat dari target yang kita canangkan," kata Sandiaga.

Kini, desa wisata pun sudah banyak dilirik oleh banyak wisatawan. Hal ini pun sangat didukung oleh Kemenparekraf. "Di era pandemi kita ubah pola hidup menjadi lebih bersih dan lebih sehat. tren pariwisata kini sudah terlihat desa wisata melonjak diakibatkan preferensi masyarakat untuk mengunjungi desa wisata. Kemenparekraf selalu all out mendorong penguatan desa wisata," kata Sandiaga.

Menparekraf mengajak masyarakat mendukung pengembangan desa

wisata. Hal ini menjadi upaya untuk melestarikan potensi budaya dan nilai kearifan lokal setempat. "Kita percepat kemajuan desa wisata menuju desa yang mandiri dan kami yakin juga bahwa ini adalah upaya melestarikan potensi budaya dan nilai kearifan lokal setempat, wawasan global tetap berkearifan lokal. Mari kita dukung program prioritas pengembangan desa wisata melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 dengan total hadiah miliaran rupiah," tambahnya.

Sandiaga menuturkan hal ini bisa membuka lapangan kerja yang luas dan memiliki manfaat ekonomi yang berkeadilan. Tentunya yang lebih banyak menyentuh anggota masyarakat yang membutuhkan. "Mari bersama hadirkan kepedulian ekonomi dan kebangkitan pariwisata. Mari wujudkan visi membangun pariwisata

Nasional Indonesia sebagai negara yang bertujuan untuk pariwisata yang berkualitas, berkelas dunia berdaya saing berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan mensejahterakan rakyat," tandasnya.

Malah Sandi mengemukakan, dengan pengembangan banyak desa wisata, desalah yang akan membangkitkan Indonesia. "Pengembangan potensi desa dapat kita percepat seiring dengan kolaborasi kita dengan kementerian desa dan kemudian lembaga lainnya agar kemajuan desa menuju kemandirian dan Indonesia sejahtera adil dan makmur dapat kita wujudkan, bukan Indonesia yang membangun desa tapi desalah yang membangun Indonesia. ini upaya kita bersama untuk melestarikan potensi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal setempat," ujarnya.

Anugerah Desa Wisata Indonesia menjadi cara mengembangkan desa wisata yang ada di Indonesia. Ini diharapkan bisa membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan. "ADWI 2021 ini adalah betul-betul anugerah, karena kita ingin kembangkan desa wisata untuk menopang ekonomi bangsa pasca pandemi," sambung Sandi.

Sandi pun memberikan semangat optimisme pada peserta yang turut serta dalam ADWI 2021. Dalam opening dan bimtek workshop kali ini, para peserta yang hadir adalah dari zona B yaitu wilayah NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. "Kita harapkan ini mampu meningkatkan daya saing pariwisata dan kita akan lihat juri-juri mulai dari Budi Arie Setiadi sampai Atta halilintar. mereka akan mampu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di desa wisata untuk bertransformasi terutama di bidang digital dan kreativitas untuk membangun konten kreatif," tambah Sandi.

la pun menyalakan semangat optimisme pada peserta yang turut serta dalam ADWI 2021. "Untuk 500 lebih peserta yang meliputi kepala daerah provinsi kabupaten/ kota kepala dinas provinsi kabupaten/ kota dan peserta," kata Sandi.

"Zona wilayah B ini betul-betul

merupakan zona yang kaya akan potensi. Saya melihat bahwa di sini dalam zona wilayah B, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat adalah kandidat-kandidat kuat untuk menjadi pemenang dari pada anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021," tambahnya.

Sandi juga mendorong kolaborasi

dan kementerian/lembaga lainnya.

Di akhir sambutan, Menparekraf mengajak para peserta untuk mewujudkan Indonesia sebagai pariwisata kelas dunia melalui desa wisata yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional.

"Mari bersama hadirkan pemulihan ekonomi dan kebangkitan pariwisata. mari wujudkan Indonesia sebagai



antarpemangku kepentingan dalam bingkai 3C yaitu competence, commitment dan champions. Serta menghadirkan program yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Atas dasar itu, Sandi memastikan akan mempercepat pengembangan potensi desa wisata seiring dengan kolaborasi dengan Kementerian Desa PDTT

negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyatnya dari desa wisata simbol kebangkitan ekonomi nasional," tutur Sandi.

Yang belum jelas adalah siapa saja penerima ADWI 2021. Pada saatnya akan kita ketahui bersama-sama. ●



Festival Film Indonesia 2021

# KENANG SEJARAH UNTUK MELANGKAH KE DEPAN



**D**i tengah situasi pandemi yang tak menentu, para insan perfilman tetap berupaya melahirkan karya-karya terbaik. Semua itu demi menjaga marwah perfilman Indonesia tetap kreatif dan bergerak meski banyak keterbatasan.

Ketua Komite Festival Film Indonesia (FFI) periode 2021-2023, Reza Rahadian mengatakan, situasi pandemi menjadi tantangan terbesar bagi para sineas. Termasuk untuk penyelenggaraan festival film tahunan ini.

"Film Indonesia akan terus hidup. Karya sineas dan kecintaan masyarakat terhadap film Indonesia akan menjadi semangat untuk terus memajukan film Indonesia," kata Reza saat mengumumkan FFI 2021, Rabu

(14/7/2021).

Dalam Konferensi pers virtual, Reza mengatakan, FFI berupaya konsisten untuk memberi apresiasi pada pencapaian pekerja film Indonesia selama satu tahun terakhir. Pada tahun ini, FFI mengangkat tema "Sejarah Film dan Media Baru" yang bermakna, sejarah film Indonesia merupakan sebuah karya yang perlu diingat. Kemudian menjadi bahan renungan bersama dan pelajaran berharga, tak hanya bagi insan film tapi juga seluruh ekosistem perfilman di era media baru saat ini.

Adapun pandemi COVID-19 yang melanda seluruh lini bisnis, kehidupan sosial, termasuk dunia seni, hendaknya menjadi momen kontemplatif bagi sineas untuk tetap fokus dalam

berkarya.

"FFI diharapkan menjadi milik dari seluruh elemen perfilman Indonesia. Satu hal yang utama adalah mengedepankan keterbukaan dalam keterlibatan dari berbagai ekosistem," kata Reza Rahadian yang dikenal sebagai pemeran karakter BJ Habibie dalam film "Habibie & Ainun".

Salah satu strategi serta cara FFI untuk menjawab tantangan di tengah pandemi, adalah melalui komunikasi yang terbuka bagi seluruh ekosistem atau elemen yang ada di dalam perfilman nasional. Termasuk pemanfaatan teknologi untuk mengambil peluang yang ada demi memajukan iklim industri layar lebar dengan mengadopsi digitalisasi.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Hilmar Farid mengatakan, perfilman Indonesia belum menggembirakan akibat situasi pandemi. Meski demikian, para sineas terus berjuang untuk melahirkan karya-karya terbaik.

"Saya mencatat tidak kurang dari 41 film yang sudah tayang, baik di bioskop maupun platform digital yang akan ikut di FFI 2021," ujar Hilmar.

"Ini semua adalah tanda keta-

hanan yang luar biasa dari para sineas dan pekerja film Indonesia," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Chand Parwez Servia berharap, agar FF1 2021 mampu berfungsi sebagai pendorong dan sekaligus pembuktian eksistensi perfilman Indonesia.

"Semoga FFI 2021 dapat mengingatkan penonton bahwa film Indonesia masih ada dan menggugah pemerintah untuk selalu mendukung perfilman Indonesia, mendorong produksi, distribusi, dan eksibisi film," kata Chand Parwez.

Ketua Bidang Penjurian Festival Film Indonesia (FFI) 2021, Garin Nugroho mengatakan, proses penjurian dalam era pandemi memerlukan koridor-koridor tertentu. Yaitu prioritas untuk menjaga keselamatan sekaligus keakuratan.

Dia menjelaskan gambaran sistem penjurian FFI 2021, pada tahap pertama, film terdaftar yang telah dikurasi panitia akan disebar dan bisa diakses seluruh anggota asosiasi film Indonesia untuk dipilih tanpa perlu datang ke bioskop. Situasi pada tahap ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka karena jumlah anggota asosiasi sangat banyak.

"Sehingga kenyamanan, keselamatan, keakuratan, akan dipecahkan lewat jalan komunikasi online yang telah disediakan oleh panitia FFI," tutur sutradara film "Kucumbu Tubuh Indahku" itu.

Pada tahap kedua, penjurian akan diwakili setiap asosiasi film dengan total sekitar 40-45 orang. Jika kondisi memungkinkan, maka penjurian bisa diadakan secara tatap muka dan

gan menjalankan protokol kesehatan. Jika keadaan pandemi memburuk, maka panitia juga bersiap untuk menjalankan metode penjurian online.

"Untuk tahap ketiga dengan jumlah juri sekitar 15 orang, kami mengusahakan film-film nominasi diputar di gedung bioskop agar seluruh juri bisa menonton," lanjut Garin.

Kesadaran arsitektur film di negara-negara maju selalu tumbuh dari dukungan asosiasi-asosiasi film sebagai tiang, dari ekosistem perfilman. Berkaca dari hal tersebut, maka sistem penjurian akan melibatkan asosiasi-asosiasi film dalam tiga pertemuan yang berjenjang dan sangat terbuka.

"Komite FFI tahun ini membangun tiga hal penting dalam aspek penjurannya, yaitu peran asosiasi profesi perfilman, keterlibatan aktif masyarakat, dan juga sistem dewan juri," katanya.

Selain sistem penjurian, kepanitiaan FFI 2021 juga tak luput dari upaya penyempurnaan.

Reza Rahadian selaku Ketua Komite FFI 2021 mengatakan, bidang-bidang di kepanitiaan diisi oleh para profesional yang memiliki rekam jejak serta pencapaian pada profesinya masing-masing, dan masih berkaitan erat dengan dunia film. "Peran serta perempuan dalam kepanitiaan FFI tahun ini juga cukup besar," tambah Reza.

Sebagai informasi, malam nominasi rencananya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021. Sedangkan malam penghargaan diadakan bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2021 dipilih sebagai momentum untuk mengusulkan Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional.

Pendaftaran film akan dibuka mulai tanggal 15 Juli sampai 30 Agustus 2021. Sementara seleksi dan penjurian akan berlangsung mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai 25 Oktober 2021.

Dengan demikian, FFI 2021 diharapkan bisa menjadi refleksi bagi industri perfilman nasional untuk bersama-sama mencari solusi atas segenap tantangan yang dihadapi di era pandemi, sejalan dengan upaya bersama untuk menyongsong berbagai peluang yang bisa dihadirkan oleh sineas dan industri terkait di masa mendatang. ●





# VAKSIN GOTONG ROYONG UNTUK NYAWA RAKYAT ATAU NYAWA BUMN

Berdalih mempercepat kekebalan komunal atau herd immunity, pemerintah bersama PT Kimia Farma sepakat untuk menjual vaksin jenis Sinopharm kepada masyarakat. Walau pada akhirnya ditunda, tapi keputusan itu sudah blunder dan melukai hati rakyat.

**D**i saat lonjakan kasus COVID-19 kian menggila sejak awal hingga pertengahan Juli, Kimia Farma, membuat pengumuman yang bikin kaget. BUMN yang bergerak di sektor farmasi itu, berencana menjual vaksin berbayar kepada masyarakat pada Minggu (11/7/2021).

Pengumuman penjualan vaksin disampaikan oleh Juru Bicara PT Bio Farma (Persero), Bambang Heriyanto. Vaksin yang dipakai sama dengan vaksin yang digunakan dalam program vaksin gotong royong, buatan China, Sinopharm. Dijual Rp879.140 per orang untuk dosis lengkap.

Harga itu ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021, tentang harga vaksin per dosis sebesar Rp321.660, serta harga layanan Rp117.910. Dengan begitu, total harga satu dosis vaksin yang disuntik sebesar Rp439.570.

Pemerintah ternyata sudah menyiapkan dasar hukum vaksin gotong

royong individu. Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan 19/2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Peraturan baru ini diteken Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, pada 5 Juli 2021.

Dalam Permenkes sebelumnya, vaksin gotong royong didefinisikan sebagai pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Di Permenkes baru ini, definisinya diubah menjadi: "Vaksin Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha".

Pasal 3 juga dijelaskan bahwa vaksin gratis hanya diberikan bagi penerima vaksin dalam pelayanan vaksinasi program. Kemudian, pada Pasal 3 Ayat (4b) disebutkan, selain untuk karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga, badan hukum/badan usaha juga dapat melaksanakan vaksinasi gotong royong untuk individu/orang perorangan.

Lalu, pada Ayat (5) pasal yang sama tertulis bahwa karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga, dan individu/orang perorangan sebagai penerima vaksin COVID-19

“  
Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak

dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang digelar oleh badan hukum/badan usaha

tidak dipungut bayaran/gratis. Sementara itu, pada Pasal 43 Ayat (2) dikatakan, pen-

danaan vaksinasi gotong royong oleh individu/orang perorangan dibebankan pada yang bersangkutan.

Bambang Heriyanto mengklaim, penjualan vaksin bertujuan mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok agar Indonesia cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Selain itu, mengikuti anjuran dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 19/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan pandemi COVID-19.

"Seperti kita ketahui, Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sedang berlangsung, maka program vaksinasi adalah satu langkah penting menghadapi kenaikan kasus COVID-19," kata Bambang dalam konferensi pers yang disaksikan secara daring.

Tentu saja, isu ini membuat gaduh dan tanggapan tidak enak dari banyak pihak. Karena dinilai pemerintah melalui BUMN sedang mencari untung di saat rakyat dalam kesusahan.

Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, latar belakang kebijakan vaksinasi berbayar bagi individu adalah demi mempercepat laju penyuntikan program gotong royong.

"Untuk memberikan latar belakang, pada tanggal 26 Juni itu, ada rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif dari KPC-PEN melihat bahwa vaksinasi gotong royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan," katanya saat hadir secara virtual dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI dan dipantau dari Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Budi menyebutkan kecepatan penyuntikan vaksinasi Gotong Royong pada saat itu diperkirakan baru mencapai 10 ribu hingga 15 ribu per hari. "Dari target 1,5 juta, baru mencapai 300 ribu," katanya.

Dalam rapat tersebut, dikemukakan sejumlah strategi untuk

**Menteri kesehatan,  
Budi Gunadi Sadikin**



## • INFO KHUSUS

mempercepat laju penyuntikan vaksinasi gotong royong. Seperti perluasan layanan ke sejumlah rumah sakit di daerah, vaksinasi anak, vaksinasi ibu hamil dan menyusui, termasuk vaksinasi berbayar bagi individu.

Selanjutnya, kata Budi, sejumlah gagasan tersebut kembali dibahas dalam agenda Rapat Kabinet Terbatas pada 28 Juni 2021. Saat itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartato mengusulkan kepada KPC-PEN dan Kemenkes sehingga dilakukan akselerasi hingga dikeluarkan keputusan vaksinasi berbayar untuk individu.

"Vaksin gotong royong kami lihat harus lebih cepat karena swasta se-

akses ke program vaksinasi gratis yang dilaksanakan pemerintah.

Selain itu, kata Budi, vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong individu ini, hanya menggunakan vaksin Sinopharm dan CanSino. Sehingga tidak berbenturan dengan program vaksinasi pemerintah.

"Diskusinya waktu itu disampaikan bahwa karena ini biaya ditanggung oleh individu. Ini dapat meringankan beban APBN. Itu adalah landasan pemikiran pemerintah," katanya.

Ekonom senior Faisal Basri menilai, upaya pemerintah melalui BUMN yang menerapkan program vaksin berbayar kepada masyarakat, adalah tindakan

bahan kebijakan dalam vaksinasi COVID-19. Ia mengaku khawatir bahwa vaksin yang dijual oleh Kimia Farma itu berasal dari bantuan internasional.

Seperti diketahui, Indonesia menerima hibah sebanyak 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab (UEA). Iklim korupsi yang melanda Tanah Air membuat Andi dan rakyat, mempertanyakan vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi gotong royong individu bukan dari hibah UEA.

"Saya percaya vaksin bantuan internasional akan disuntikkan ke rakyat. Tapi di tengah iklim korupsi saat ini bagaimana agar rakyat tahu bahwa yang dijual di Kimia Farma bukan vak-



**Juru Bicara PT Kimia Farma (Persero), Bambang Heriyanto.**

harusnya lebih cepat gerakannya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata Budi.

Ia menyebutkan, vaksinasi gotong royong tidak menggunakan APBN, tetapi menggunakan anggaran dari BUMN dan perusahaan swasta. Sehingga tidak ada keterlibatan Kemenkes dan negara dari sisi anggaran.

Budi menegaskan bahwa vaksinasi gotong royong berbayar, untuk individu merupakan pilihan yang bisa diambil masyarakat. Sebab masih ada

biadab. Apalagi, pasokan vaksin di Indonesia masih terbatas.

Ia menilai, sejak awal BUMN farmasi memandang vaksinasi sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. "Pasokan vaksin masih terbatas. Praktik jualan vaksin adalah tindakan biadab. Pemerintah harus melarangnya, apalagi yang jualan BUMN," kata Faisal melalui akun Twitter-nya, @FaisalBasri.

Sementara itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengkritik per-

sin bantuan internasional," demikian cuit Andi.

Dia juga menyoroti keputusan Presiden Jokowi yang menyetujui program tersebut. "Lagian Pak Jokowi sempat-sempatnya terpikir dan menyetujui jualan vaksin ke rakyat," katanya.

Kebijakan vaksin gotong royong individu juga mendapat kritik publik karena tidak sejalan dengan komitmen yang dimumkan Presiden Jokowi pada Desember 2020, bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali ber-

hak mendapatkan vaksin secara gratis.

Bahkan, Kepala Negara saat itu memerintahkan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, tak mempermasalahkan program Vaksinasi Gotong Royong Individu. Namun, tidak elok dilakukan, karena program vaksinasi pemerintah yang gratis belum tuntas dilakukan.

Diketahui, memasuki bulan keenam vaksinasi COVID-19 di Indonesia, tampaknya pemerintah sulit mencapai target untuk menuntaskan vaksinasi pada 70 persen populasi. Pemerintah menargetkan vaksinasi bisa tuntas akhir tahun ini dan paling lambat Maret 2022.

Walau program sudah separuh jalan dari tenggat maksimal 15 bulan, penyuntikan vaksin baru mencapai 14 persen dari 363 juta dosis yang ditargetkan. Dari sisi pasokan, sampai Juni, Indonesia telah menerima sekitar 70 juta dosis vaksin.

"Intinya pasokan yang diupayakan pemerintah sudah melebihi dari yang dibutuhkan, yakni untuk cakupan 70 persen masyarakat Indonesia. Program vaksinasi bagi 180 juta rakyat Indonesia harus dituntaskan dulu. Kalau itu sudah terpenuhi, tidak masalah vaksinasi gotong royong individu," kata Laura kepada Info Indonesia.

Di sisi lain, stok vaksin yang ada saat ini harus segera disuntikkan kepada masyarakat. Hal itu untuk meminimalisasi potensi adanya vaksin yang kedaluwarsa.

"Artinya tidak perlu menunggu vaksinasi berbayar kalau memang ketersediaan vaksin itu ada. Daripada nanti vaksinnya kedaluwarsa," kata dia.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai, vaksinasi berbayar dalam program vaksinasi gotong royong individu harus ditolak. Sebab, kata Tulus, program tersebut sangat tidak etis.

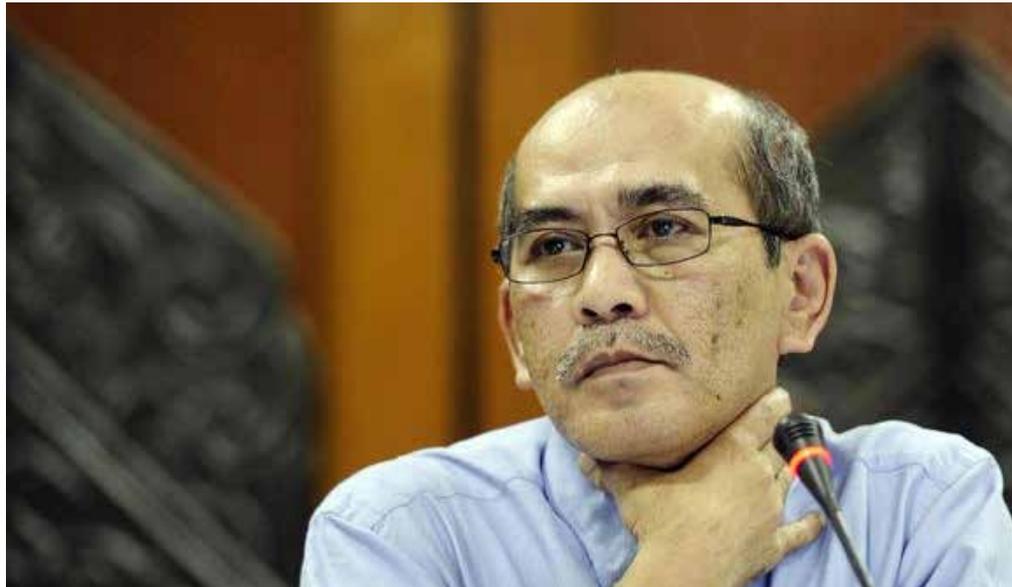
"Vaksin berbayar itu tidak etis, di ten-

gah pandemi yang sedang menggan-  
nas. Oleh karena itu, vaksin berbayar  
harus ditolak," kata Tulus.

Dikatakan Tulus, kebijakan ini bisa  
jadi hanya akan makin membuat  
masyarakat malas untuk melakukan  
vaksinasi. Untuk vaksin yang digratiskan  
saja masih banyak yang enggan  
memanfaatkan, apalagi vaksin yang

masyarakat. Dia khawatir, masyarakat  
akan menganggap kualitas vaksin  
gratis dari pemerintah tidak bagus jika  
dibandingkan kualitas vaksin yang  
berbayar.

Di banyak negara, justru masyarakat  
yang mau divaksinasi COVID-19 di-  
berikan hadiah oleh pemerintahnya.  
Hal itu dimaksudkan agar makin ban-



**Ekonom senior Faisal Basri.**



**Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.**

berbayar.

Selain itu, vaksinasi gotong royong  
individu juga membingungkan masya-  
rakat, mengapa ada vaksin berbayar  
dan ada vaksin gratis. Dari sisi komuni-  
kasi publik, hal tersebut sangat buruk.

Vaksin berbayar juga bisa men-  
imbulkan ketidakpercayaan pada

yak warga negaranya yang mau divak-  
sin. Bukan malah disuruh membayar.

"Oleh karena itu, YLKI mendesak  
agar program vaksin berbayar untuk  
kategori individu dibatalkan. Kembal-  
ikan pada kebijakan semula, yang  
membayar adalah pihak perusahaan,  
bukan individual," tegasnya. ●



# SEMUA VAKSIN GRATIS

Presiden Joko Widodo, membatalkan opsi vaksin berbayar bagi masyarakat.

**"S**etelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Sebelumnya PT Kimia Farma membuka program vaksinasi gotong royong individu, dengan menggunakan vaksin Sinopharm. "Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disam-

paikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," ujar Pramono menambahkan.

PT Kimia Farma rencananya akan menjadi pihak yang menyelenggarakan vaksinasi berbayar. Dengan harga vaksin berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma adalah Rp879.140.

Rinciannya pembelian vaksin sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp117.910 per dosis. Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin adalah sebesar Rp643 ribu, sedang-

kan untuk dua kali layanan vaksinasi tarifnya Rp253.820.

"Hal yang berkaitan dengan vaksin gotong royong mekanismenya tetap melalui perusahaan, dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada," papar Pramono.

Artinya, menurut Pramono, mekanisme untuk seluruh vaksin baik vaksin gotong royong maupun vaksinasi yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah.

Menjual vaksin kepada masyarakat kepada individu rencananya dimulai pada Senin, 12 Juli 2021, yang dilaksanakan pada delapan klinik milik Kim-



SINOPHARM



ia Farma yang tersebar di enam kota akhirnya ditunda.

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Corporate Secretary Kimia Farma, Ganti Winarno Putro dalam keterangan resmi.

Ganti mengatakan besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk atas pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu, membuat manajemen memutuskan memperpanjang masa sosialisasi serta pengaturan pendaftaran calon peserta.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," terang dia.

Meski ditunda, pemerintah sempat kukuh untuk tetap menjual vaksin berbayar. Kementerian Kesehatan pun menunggu petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu

guna lebih memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

"Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian BUMN dan PT Bio Farma Persero yang saat ini bersa-

ma-sama menyiapkan petunjuk teknis tersebut, yang kita harapkan dapat segera mungkin kita finalisasi," ujar Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Se-



**Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi.**

## • INFO KHUSUS

lasa (13/7/2021).

Dia mengatakan, saat ini fasilitas layanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi gotong royong individu diminta untuk menunggu dulu dikeluarkannya petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi.

Selain itu, PT Bio Farma selaku distributor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan vaksin COVID-19, agar dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan. Terutama terkait dengan pelaksanaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong individu.

"Kami juga meminta Dinas Kesehatan kabupaten dan kota untuk menunggu petunjuk teknis yang akan segera ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sebelum memberikan user ID kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melayani vaksinasi gotong royong individu," ujar Nadia.

Kimia Farma bahkan telah mendatangkan 15 juta dosis tambahan un-

“  
Sehingga semua  
vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya

tuk mempersiapkan vaksinasi gotong royong. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury.

"Kami berharap vaksin Sinopharm yang didatangkan oleh PT Kimia Far-

ma yang merupakan anak perusahaan dari Bio Farma akan digunakan untuk vaksin gotong royong di mana kami sudah memiliki kerja sama untuk mendatangkan 15 juta dosis vaksin Sinopharm tersebut," kata Pahala Mansury di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Pahala menjelaskan vaksin gotong royong merupakan vaksin komplementer untuk bisa melengkapi program vaksin pemerintah dalam rangka mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity, sekaligus meringankan beban pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani berkomitmen untuk mempercepat Program vaksinasi gotong royong menyusul kedatangan 1,4 juta dosis vaksin Sinopharm, Jumat siang (16/7/2021).

Percepatan program vaksinasi gotong royong untuk sektor swasta, dilakukan guna mendukung pemerintah



Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury.

untuk segera mencapai target herd immunity. Dengan begitu diharapkan pemulihan kesehatan dan sektor ekonomi bisa segera terwujud.

“Wujud nyata dan komitmen Kadin untuk membantu mempercepat vaksinasi nasional akan terus dilakukan. Buat kami membangkitkan kesehatan adalah upaya

juga membangkitkan ekonomi Indonesia,” kata Shinta.

Ia pun mengapresiasi upaya dan kerja keras pemerintah dalam memenuhi ketersediaan vaksin bagi masyarakat baik yang diberikan secara gratis maupun berbayar yang pembiayaannya dilakukan perusahaan.

Kedatangan vaksin Sinopharm diharapkan bisa memberi asa di tengah meningkatnya kasus COVID-19. “Kami harapkan dengan ketersediaan vaksin yang aman bisa terus berlangsung dan terus memenuhi semua kebutuhan vaksinasi bagi semua, termasuk pekerja di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Shinta menambahkan,



**Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani**

Kadin juga menyiapkan program untuk meringankan beban pemerintah dan masyarakat dengan membangun sentra vaksinasi di kawasan industri, membangun rumah oksigen, pembagian bantuan beras dan obat-obatan. “Dukungan ini merupakan pernyataan sikap kami perang terhadap pandemi,” katanya.

Shinta menegaskan Kadin mendukung langkah dan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 termasuk PPKM Darurat.

Meski dia mengakui kebijakan ini berkonsekuensi banyak terhadap anggota Kadin yang tidak dapat beroperasi secara optimal, karena terbatasnya mobilitas. Namun tentu hal ini demi menekan segera laju penularan pandemi.

“Maka kami berkomitmen memenuhinya, sebagai wujud gotong royong bersama memerangi pandemi. Kami yakin perjuangan bersama kita bisa bangkit melewati krisis kesehatan,” ujarnya. ●



**Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.**

# NGAKUNYA TIDAK PAKAI APBN, PADAHAL UANG BUMN PUNYA NEGARA

Vaksin gotong royong individu yang dijual secara komersial oleh Bio Farma, diklaim Menteri BUMN, Erick Thohir tidak menggunakan uang negara alias APBN. Juga bukan hibah dari negara lain, atau vaksin program pemerintah.

"Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, semua vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi gotong royong, baik untuk badan usaha atau lembaga yang saat ini sudah berjalan maupun untuk individu, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari vaksin yang sudah dialokasikan untuk program vaksinasi pemerintah. Juga, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerjasama bilateral dan multilateral, seperti hibah dari

UAE dan yang melalui GAVI/COVAX," ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Vaksinasi untuk individu itu ujanya, merupakan perluasan dari program vaksinasi gotong royong yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 19/2021 yang disahkan per 5 Juli 2021, ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Kesehatan 10/2021. Tujuannya untuk memberikan opsi pilihan atau opsi yang lebih luas ke masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Pengadaan vaksin yang digunakan di vaksinasi gotong royong serta pelaksanaannya menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi, yang dilakukan oleh holding farmasi BUMN. Sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Sementara, biaya vaksinasi gotong royong individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh BPKP," ujar Erick.

la menambahkan, pada hasil rapat koordinasi Senin, 12 Juli 2021 salah satunya menyepakati hal baru terkait penerima vaksinasi gotong royong untuk individu. Termasuk peruntukannya. "Semua penerima vaksinasi gotong royong individu harus dinaungi badan usaha atau lembaga tem-

pat ia bekerja. Tentu data yang akan digunakan adalah data badan usaha atau lembaga yang telah terdaftar untuk vaksinasi gotong royong melalui Kadin, dan divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini akan dirinci lebih lanjut dalam sosialisasi vaksinasi gotong royong individu," jelas dia.

Namun, klaim Erick Thohir itu patut dipertanyakan. Terutama mengenai pernyataan tidak memakai uang negara. Sebab menurut mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah penggunaan istilah "keuangan negara" harus dipahami lebih lanjut. Lewat akun Twitter pribadinya (@febridiansyah), Febri mengatakan, hanya karena vaksin gotong royong dibeli oleh BUMN maka bukan berarti pembelian itu tidak menggunakan uang negara.

"Saran saya lihat lagi definisi keuangan negara, ya. Ada undang-undang dan Putusan MK, ditambah sejumlah putusan pengadilan yang menegaskan keuangan BUMN itu masuk ruang lingkup keuangan negara," terang Febri dalam unggahannya, Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, yang perlu dilindungi dengan mekanisme tata kelola yang baik bukan sekadar APBN. Tapi lebih luas lagi yaitu keuangan negara. Karena itu UU Tindak Pidana Korupsi tidak menyebut istilah "kerugian APBN" melainkan "kerugian keuangan negara".

"Tapi jangan salah arti ya, bukan berarti saya sedang bilang ada korupsi. Poin utamanya adalah edukasi publik agar paham bahwa uang BUMN itu masuk ruang lingkup keuangan negara. Karena itu keputusan bisnis yang diambil harus sesuai hukum dan akuntabel. Dan memikirkan dampak ke masyarakat juga," tulis eks aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Dia mengingatkan, pengelolaan



Menteri BUMN Erick Thohir

BUMN belum seluruhnya sudah sudah akuntabel atau mengikuti tata kelola good corporate governance. Untuk masalah ini, ia percaya Menteri BUMN akan memperbaikinya.

Namun, mengenai vaksin gotong royong, jangan sampai pesannya bias dengan mengatakan tidak memakai APBN seolah hanya Business-to-Business. Ia juga merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 19/2021.

“Nggak. Coba perhatikan Pasal 3 ayat (1) PMK 19/2021 ini. Ditegaskan: Pemerintah Pusat yang melakukan vaksinasi, baik (vaksinasi) program dan gotong royong. Kemudian disebut bisa melibatkan Pemda, badan hukum/usaha,” terangnya.

“Saran saya sederhana: buatlah terang benderang. Jelaskan dan dengar masukan publik,” imbuh Febri.

Sementara itu, Ketua KPK Firlil Bahuri yang menghadiri rapat koordinasi (rakor) membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong pada Senin 12 Juli 2021, ikut memberikan saran.

“Saya hadir dalam rapat dan saya sampaikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi fraud (kecurangan), saran tindak lanjut. Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program,” kata Firlil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Dia menerangkan, gadir dalam rakor Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri BUMN, Erick Thohir; Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh; dan Jaksa Agung S.T. Burhanuddin.

Dalam rakor, Firlil menyampaikan saran dan langkah-langkah strategis menyikapi potensi kecurangan jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar kepada masyarakat serta vaksinasi selanjutnya. “Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi,” ucap Firlil.

Ada enam saran yang disampaikan Firlil. Pertama, KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya

percepatan vaksinasi. Kedua, penjualan vaksin gotong royong kepada individu melalui Kimia Farma meskipun sudah dilengkapi dengan Permenkes, menurut KPK berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin, (reseller bisa muncul dan lain-lain), efektivitas rendah, dan jangkauan Kimia Farma terbatas.

Ketiga, perluasan penggunaan vaksin gotong royong kepada individu ini

erti Kimia Farma, dan perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kedaluwarsa dan distribusi lebih merata.

Keempat, sesuai dengan Perpres 99/2020, Menkes diperintahkan untuk menentukan jumlah, jenis, harga vaksin, serta mekanisme vaksinasi. Kelima, perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring pelaksanaan vaksin gotong



Ketua KPK Firlil Bahuri.



Febri Diansyah

direkomendasikan, yakni hanya menggunakan vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin hibah. Baik bilateral maupun skema COVAX, dibuka transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong (by name, by address, dan badan usaha).

Selanjutnya, pelaksanaan hanya melalui lembaga atau institusi yang menjangkau kabupaten/kota, misalnya rumah sakit swasta se-Indonesia atau Kantor Pelayanan Pajak. Karena mereka mempunyai database wajib pajak yang mampu secara ekonomis, atau lembaga lain selain retail, sep-

royong secara transparan, akuntabel, dan dipastikan tidak terjadi praktik kecurangan.

Terakhir, data menjadi kata kunci. Sehingga Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong sebelum dilakukan vaksinasi.

Selain itu, Firlil juga memberikan tiga catatan lainnya, yakni KPK tidak mendukung pola vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya berisiko, KPK mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar. ●

# BEDA PENDAPAT VAKSIN BERBAYAR

Di saat pandemi makin menggila, masyarakat terbelah dalam isu vaksin individu berbayar. Sejumlah pihak sebut saja Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan sejumlah anggota DPR, satu suara mendukung vaksin dijual secara komersil. Tapi, di sisi lain pakar epidemiologi dengan ekonom, menolak keras vaksin yang harusnya gratis malah jadi berbayar.

**K**etua Umum Hipmi, Mardani H Maming mendukung rencana vaksin gotong royong berbayar atau mandiri untuk bisa mempercepat target vaksinasi nasional. "Untuk mempercepat vaksinasi, Hipmi mendukung pemerintah harus ada vaksin yang berbayar. Karena tidak semua masyarakat mau gratis bagi yang mampu. Bayar sendiri tidak masalah, yang penting bisa vaksin dan

juga bisa bantu pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Menurut Maming, kombinasi vaksin gratis dan berbayar merupakan langkah baik karena target vaksinasi pemerintah bisa segera tercapai. Selain itu, vaksinasi berbayar juga dinilai mendorong vaksinasi yang merata.

Kebijakan vaksinasi berbayar juga dinilai menjadi alternatif untuk mem-

percepat pelaksanaan program vaksinasi nasional dan target kekebalan kelompok. Pasalnya, program vaksinasi gotong royong sebelumnya hanya memperbolehkan perusahaan berbadan hukum saja untuk menyelenggarakan bagi para karyawan.

"Saat ini, pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan agar akselerasi semakin cepat. Tujuannya pelaksanaan vaksinasi se-



anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.

makin cepat, masyarakat semakin banyak pilihan. Kita harapkan perekonomian bisa cepat pulih solusinya adalah vaksinasi ini,” ungkapnya.

Maming menilai program vaksinasi gratis dari pemerintah tidak mengganggu meski ada vaksin berbayar tersebut. Vaksinasi gotong-royong perorangan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengakses vaksin COVID-19.

“Lebih baik lagi jika swasta juga bisa turut membantu untuk memasukkan merk lain untuk mengakselerasi dan mempercepat vaksinasi,” pungkash Maming.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Dr Evita Nursanty. Dia menyatakan dukungan pelaksanaan vaksin gotong royong untuk individu maupun badan usaha guna mempercepat terbentuknya kekebalan komunal (herd immunity).

“Ini juga demi mempercepat tercapainya vaksinasi secara nasional dengan keikutsertaan vaksinasi yang makin luas,” kata Evita di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Menurut politikus PDIP tersebut, vaksinasi individu merupakan pengembangan dari vaksin gotong royong, untuk badan usaha yang saat ini terus berlangsung. Mengingat masih banyak pihak belum tersentuh program vaksinasi gotong royong yang digawangi Kadin Indonesia.

“Ternyata tidak sedikit perusahaan pribadi, perusahaan kecil, bahkan termasuk adanya kesulitan yang dihadapi warga negara asing mendapatkan akses vaksin,” katanya.

Perlu diingat, lanjut dia, program vaksinasi gotong royong individu ini dibuka setelah dipastikan pasokan vaksin milik pemerintah makin masif.

Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena program vaksinasi gotong royong untuk individu dan perusahaan tidak akan mengganggu jatah vaksin masyarakat.

Dikatakan pula bahwa jenis vaksin yang digunakan maupun sumber pendanaannya berbeda. Vaksin gotong royong tidak menggunakan vaksin yang dialokasikan pemerintah. Selain itu, juga tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan atau hibah dari kerja sama bilateral.

“Vaksin gotong royong berasal dari keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan BUMN farmasi, sedangkan program vaksinasi pemerintah sumbernya dari APBN,” katanya.

Ia berharap program vaksinasi gratis dari pemerintah maupun mandiri atau gotong royong dapat berjalan lancar



Ketua Umum Hipmi, Mardani H Maming.

## • INFO KHUSUS

sehingga target vaksinasi nasional bisa segera tercapai.

Namun, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta, pemerintah mengkaji ulang program vaksinasi individu berbayar untuk masyarakat. Agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

Dia mengungkapkan bahwa program vaksinasi individu berbayar tersebut belum didiskusikan dengan Komisi IX DPR RI. Menurutnya, materi

Sejahtera itu.

Sementara itu, kolega Netty lainnya di Komisi IX, yakni Kuraisih meminta agar vaksin gotong royong apapun bentuknya tidak perlu ada berbayar dulu untuk saat ini.

"Kita putus saja nggak usah dulu ada berbayar ini. Ikuti presiden saja dulu bahwa vaksin gotong royong juga tidak dipungut biaya atau gratis. Karena ini bisa menjadi bentuk inkonsistensinya Pak Presiden, bahwa ini

nundaan pelaksanaan program vaksinasi gotong royong individu. Selanjutnya, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes untuk melakukan kajian intensif terkait penyempurnaan pelaksanaan program tersebut," seperti tertulis dalam poin kesimpulan raker dengan Menkes, Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (13/7/2021).

Selanjutnya, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah ting-



Komisi VI DPR RI, Dr Evita Nursanty.

yang telah dibahas dan disetujui oleh parlemen hanya vaksin gotong royong perusahaan, bukan vaksin individu berbayar.

"Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan, itu pun diizinkan dengan banyak catatan, sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu," ungkap politisi Partai Keadilan

gratis dan hak semua rakyat. Kasihan Pak Presiden," kata Kuriasih.

Namun, Komisi IX pada akhirnya mendukung program vaksin gotong royong Individu dengan beberapa persyaratan. Dalam kesimpulan hasil rapat kerja bersama menkes, Komisi IX DPR menyatakan mengapresiasi penundaan program vaksinasi berbayar dan meminta Kementerian Kesehatan mengkaji secara intensif penyempurnaan pelaksanaan program tersebut.

"Komisi IX DPR mengapresiasi pe-

kat provinsi dan kabupaten atau kota, untuk dan mengutamakan percepatan program vaksinasi, terutama di daerah-daerah zona merah COVID-19.

Komisi IX DPR juga mendesak Kemenkes berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk memperbaiki distribusi vaksin dari pusat ke daerah, memperbanyak sentra vaksinasi daerah, serta memastikan percepatan pemberian honorarium vaksinator.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, keberadaan vaksin berbayar individu kontraproduktif terhadap langkah penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Langkah ini ia nilai tak tepat dan bisa memicu adanya diskriminasi.

"Kalau bicara vaksin itu jangan sampai ada terkesan vaksin bagus untuk yang bisa bayar, itu gak boleh. Selain tak etis, itu diskriminatif," kata Dicky.

Prinsip vaksin dalam masa pandemi

yang optimal," kata Dicky.

Bila pemerintah merasa mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan vaksin dan membutuhkan kontribusi pihak swasta, Dicky mengatakan pemerintah sebaiknya terbuka saja. Sikap terbuka akan memicu pencarian solusi bersama.

"Asal pemerintah ya terbuka. Kalau memang ada kendala ya terbuka saja. Karena ini masalah bersama, ya tentu kita ambil solusi bersama juga," kata

ada kepercayaan publik kepada penguasa dan pengusaha, kalau vaksin ini dibiarkan dijual di Kimia Farma," kata Anthony.

Dia mempertanyakan, kesanggupan pemerintah dalam menyediakan vaksin gratis jika vaksin mandiri bergulir. Jika tidak ada jaminan dari pemerintah, lanjutnya, maka bisa saja pemerintah beralih sudah tidak ada vaksin sehingga membuat masyarakat harus membeli di Kimia Farma.



**Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.**

adalah gratis agar menjamin kesetaraan dan akses yang merata untuk semua penduduk tanpa diskriminasi. Hal itu akan membantu peningkatan cakupan vaksinasi.

Jika memang vaksin harus berbayar, ia mengatakan saat ini adalah bukan saat yang tepat karena pandemi masih berlangsung. Vaksin baru bisa dikomersilkan hanya jika penyakit sudah menjadi endemi, penyakit yang sudah melewati masa kritisnya. "Vaksin gratisnya itu yang harus digas supaya mencapai cakupan

Dicky.

Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, adanya vaksin berbayar membuat penguasa dan pengusaha, kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menguntungkan segelintir pihak saja.

"Sebaiknya jangan ada dualisme dalam pendistribusian vaksin ini, sebaiknya semua ditanggung oleh pemerintah agar program vaksin bisa merata ke setiap orang. Sudah tidak

"Kalau tidak ada jaminan tersebut, maka bisa saja pemerintah bilang sudah tidak ada vaksin, sehingga rakyat harus membeli di Kimia Farma," tuturnya.

"Dan saya rasa ini yang akan terjadi. Manipulasi keberadaan dan ketersediaan vaksin pemerintah, agar pemerintah dapat menghindari pengeluaran dan pengusaha dapat untung besar. Sangat bahaya. Ya memang tujuannya untuk menguntungkan segelintir pihak saja," tutup Anthony. •



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

# AIRLANGGA DAN ERICK THOHIR CARI UNTUNG

Gara-gara Kimia Farma langsung mengumumkan adanya vaksinasi berbayar, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menuai kritik. Tapi bukannya meluruskan, dia malah menunjuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selaku inisiator vaksin gotong royong terlambat melakukan program tersebut.

**P**adahal Budi mengaku bahwa, membuat opsi untuk menyediakan vaksin berbayar berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, atas inisiatif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada 26 Juni 2021.

Lalu, melalui rapat tersebut, disepakati beberapa opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi gotong royong, di antaranya membuka ke rumah sakit yang juga memiliki program vaksinasi gratis pemerintah, memberikan kepada anak dan ibu hamil atau menyusui, serta membuka kepada

individu. Budi mengatakan, hasil rapat tersebut pun dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) kabinet pada 28 Juni 2021 untuk kembali dibahas.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sekaligus sebagai Ketua KPC-PEN, ucap Budi memberi masukan untuk membuka vaksinasi gotong royong bagi individu. Kemenkes pun melakukan harmonisasi aturan lama mengenai vaksinasi gotong royong dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

la menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan vaksinasi gotong

royong berbayar. Di antaranya pelaksanaan program vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan peranannya dalam mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.

Lalu, program vaksinasi gotong royong tidak memiliki keterlibatan negara dari sisi anggaran atau tidak menggunakan APBN, tetapi dana dari BUMN dan perusahaan swasta "Pada diskusinya waktu itu juga disampaikan, karena ini biaya ditanggung oleh individu, maka ini dapat meringankan beban APBN," imbuh dia.

Pertimbangan lainnya, kata Budi, vaksinasi gotong royong menjadi

opsi bagi masyarakat dalam mendapatkan akses vaksin COVID-19. Pilihannya bisa dengan vaksin berbayar atau dengan vaksin gratis dari pemerintah.

Selain itu, pelaksanaan vaksinasi gotong royong tersebut tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi gratis pemerintah karena menggunakan jenis vaksin yang berbeda. Vaksinasi gotong royong menggunakan Sinopharm dan Cansino, sedangkan vaksinasi gratis menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer.

"Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya kami buka dan vaksinasi gotong royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik, serta bisa menjadi pilar baru untuk bisa mempercepat vaksinasi kita," papar Budi.

Dengan pernyataan dari Menkes, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan vaksin gotong royong individu alias vaksin berbayar, tak mungkin merupakan ide Budi Gunadi Sadikin.

Menurut Pandu, gagasan program itu berasal dari Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN, Erick Thohir. "Tidak mungkin itu ide Menkes. Siapa dalangnya? Airlangga bersama Erick berdua," kata Pandu dikutip dari Tempo.

Pandu mengatakan Budi Gunadi justru ditekan-tekan untuk mengharmonisasi peraturan demi mengakomodasi program vaksin berbayar. Menurut dia, Menkes pun sebenarnya bingung lantaran tak mau didesak-desak.

"Tapi itu bekas bosnya waktu dia jadi Wamen BUMN. Saya udah bilang berkali-kali di Twitter, Menkes didesak," kata Pandu.

Di Twitternya, Pandu pernah mengomentari pernyataan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi yang membantah bahwa pihaknya ditekan oleh Kementerian BUMN. Menurut Pandu, bantahan itu justru berbahaya lantaran secara tidak langsung menuduh ide itu berasal dari Menkes sendiri.

"Tidak mungkin Menteri Budi begitu, dia sekarang jadi Menteri Kesehatan, dia pikirannya, tugasnya hanya satu, mempercepat vaksinasi saja. Tapi

kan dia didesak kiri-kanan, dari obat macam-macam sampai vaksin," ujar Pandu.

Pandu mengatakan KPC-PEN terbukti hanya mengurus persoalan ekonomi. Ia menduga KPC-PEN khawatir lantaran PT Bio Farma (Persero) telanjur membeli vaksin gotong royong, tetapi banyak pengusaha yang justru mundur dari program tersebut.

Menurut Pandu, vaksin yang kadang dibeli itu mestinya didonasikan saja kepada pemerintah. Opsi lainnya, kata Pandu, Kadin yang menjadi pengusul program tersebut menginisiasi iuran, untuk membayar PT Bio Farma sehingga perusahaan pelat merah itu

Jadi harus ada langkah penyelamatan stok vaksin," ungkapnyanya mengutip akun sosial media Twitter Faisal Basri, kemarin.

Faisal mengatakan, jika Kimia Farma benar-benar tidak mencari keuntungan, maka mereka sebaiknya menjadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat pemerataan sistem kekebalan komunal (herd immunity).

"Jika tak cari untung, jadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat herd immunity. Dulu ngakunya sebagai peluang bisnis," ucapnya.

Faisal menyayangkan usulnya agar pemerintah membeli stok vaksin yang dikelola BUMN ditolak. "Menteri Kesehatan menolak karena kemahalan.



**Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono.**

tak terlalu merugi.

"Problemnya kan mereka khawatir, telanjur beli banyak tapi pengusaha mundur karena mahal banget. Ya udah donasikan aja daripada expired enggak kepakai. Tapi ini kan malah diakal-akalin," kata Pandu.

Sementara, itu ekonom senior, Faisal Basri menjelaskan, bahwa Bio Farma melalui anak perusahaannya sudah ketahuan mencari untung dalam penjualan vaksin. Padahal masyarakat dalam situasi genting.

"Aku sajalah dengan jujur. Stok vaksin berbayar sebentar lagi mendekati 15 juta dosis. Target vaksin berbayar korporasi yang dikoordinir Kadin seret.

Pemerintah bisa beli lebih murah," katanya.

Selain itu, Faisal juga mengkritisi vaksin yang dikuasai oleh BUMN berdasarkan aspek bisnis. Hal itu menjadi tidak tepat untuk barang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat luas saat ini.

"Menurut Menteri Kesehatan, vaksin yang dikuasai BUMN didapat berdasarkan business to business murni. Barang publik kok diprivatisasi? Ya salah pemerintah sendiri. Sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap sebagai peluang bisnis oleh BUMN," ungkapnyanya. ●

# WARAS

Gunawan Effendi

Untuk yang terinfeksi Covid-19 hingga terbaring sakit, kita berharap semua dapat pulih seperti sedia kala. Kepada yang sudah tanpa sakit dan meninggalkan dunia, mari berdoa semoga kehidupan di alam sana lebih baik lagi.

Sedangkan untuk yang dalam keadaan sehat, mari bersama-sama bukan hanya sehat. Melainkan lebih waras.

Alangkah mendebarkan masa di awal hingga pertengahan Juli 2021. Bagi sebagian yang kehilangan keluarga, kerabat, sahabat, handai-tolan, dan orang-orang dekat yang bermakna dalam kehidupan (significant others), mungkin juga mencekam.

Lonjakan demi lonjakan yang terinfeksi Covid-19 berlangsung secara berturut-turut. Begitu pula jumlah mereka yang meninggalkan dunia pada awal hingga pertengahan Juli 2021 ini.

Akhir Juni 2021, tambahan yang terinfeksi tercatat 21.807 orang dalam sehari. Akhir bulan itu juga mencatatkan jumlah yang meninggal dunia mulai menyentuh angka 400 orang per hari. Periode Juni juga mencatat jumlah total yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia mulai menapak angka dua juta orang.

Pada 1 Juli, jumlah kematian memasuki 500 orang per hari. Di hari yang sama, catatan jumlah penularan dalam 24 jam terakhir menembus angka 24.836 orang. Angka penularan Covid-19 menembus 30 ribu orang dalam sehari pada 6 Juli, naik lagi menjadi 40 ribu lebih pada 12 Juli 2021. Akhirnya, secara berturut-turut, pada 14-15 Juli 2021, jumlah penularan tercatat menembus 50 ribu orang per hari. Sedangkan jumlah kematian pada 16 Juli 2021 tercatat 1.205 orang dan menjadi rekor tertinggi selama pandemi terhitung sejak 2 Maret 2020.

Pada pertengahan Juli 2021 ini juga total jumlah terinfeksi mencapai angka 2,78 juta orang, sekitar satu persen penduduk Indonesia. Jumlah itu lebih banyak dari seluruh penduduk Kota Bandung, atau Kota Surabaya. Sedangkan kasus aktif masih melampaui angka 500 ribu

orang dalam perawatan, yang berarti kapasitas tempat tidur perawatan (bed occupancy ratio, BOR) semakin menipis, bahkan di beberapa kota sudah melampaui kapasitas.

Nah, untuk yang sehat, kembali lagi perlu lebih dari itu. Hendaknya kita lebih waras dan tetap berupaya keras bersama-sama menekan mulai dari penularan, kasus, aktif, hingga jumlah yang meninggal. Mari mulai dengan diri sendiri dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mewujudkannya pula di lingkungan terdekat: keluarga, tetangga, dan berlanjut ke wilayah yang lebih luas.

Dengan lebih waras, pikiran akan lebih jernih untuk menemukan cara terbaik mengatasi masalah. Toh bukan Indonesia saja yang menghadapi wabah, pandemi Covid-19. Pada pertengahan Juli, data John Hopkins

University Amerika Serikat yang kerap menjadi rujukan menunjukkan angka terinfeksi di seluruh dunia mencapai 188,3 juta orang. Dari jumlah itu angka kematiannya sudah mencapai 4,05 persen dari total yang terinfeksi. Sedangkan vaksinasi tercatat mencapai 3,5 miliar dosis.

Di sekitar Indonesia, Singapura mencatat kasus baru tertinggi sejak

10 bulan terakhir pada Kamis, 14 Juli 2021 dalam temuan kluster KTV Karaoke termasuk pengunjung dan pemandunya. Sedangkan di Melbourne dan seluruh negara bagian Victoria juga Sydney di negara bagian Queensland, Australia, menggelar penguncian (lockdown).

Pada sisi lain, negara-negara kerja sama ekonomi Asia-Pasific (APEC) menggelar pertemuan informal secara online pada 16 Juli 2021. Pertemuan ini membahas dampak ekonomi Covid-19. Yang menjadi ketua pertemuan kali ini adalah Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Selandia Baru adalah salah satu negara yang berhasil mengendalikan Covid-19 di sekitar kita. Brunei Darussalam sebaiknya juga menjadi catatan.

Sekali lagi, ketika masih sehat, ayolah lebih waras. Yang waras kali ini bukan hanya sanggup menegakkan pada pembatasan Covid-19, melainkan juga mengendalikannya. ●





# info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

www.infoindonesia.id

Network

**INFO  
PASANG  
IKLAN**  
KIKI IBRAHIM  
+62 818 931 562



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi iNFO kepada masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B  
KELURAHAN CILANDAK  
BARAT, KECAMATAN  
CILANDAK, JAKARTA  
SELATAN (12430)  
TELP 021-27812397



# INOVASI UNTUK NEGERI info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #10 JULI 2021



**NADIEM MAKARIM,  
CAHAYA TERANG  
DI UJUNG JALAN  
PENDIDIKAN**

**BRIN, NEGARA  
HADIR TANPA  
MENDOMINASI  
EKOSISTEM RISET**

**BASUKI HADIMULJONO,  
ANAK KOLONG YANG  
HOBI MENABUH DRUM  
DAN MEMBANGUN  
INFRASTRUKTUR**

**SITI NURBAYA  
BAKAR, MENJAGA  
MASA DEPAN HUTAN  
DAN ALAM**

## **COVID MEROKET EKONOMI MEROSOT**

**SRI MULYANI  
INDRAWATI, PENGATUR  
KAS NEGARA YANG  
DIPUJA DUNIA**